

**ULAMA DAN POLITIK**  
**(Study Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten**  
**Polewali Mandar)**



**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Megister dalam Bidang Pemikiran Islam pada Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

*Oleh :*

**SAID USMAN UMAR**  
**NIM: 80100215071**

**Promotor : Prof. Dr. Usman Jafar, M.Ag**

**Kopromotor : Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

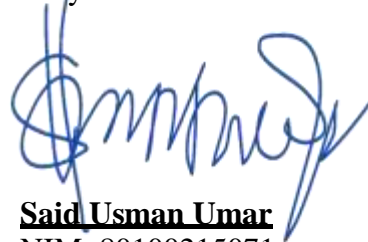
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Said Usman Umar  
NIM : 80100215071  
Tempat, Tgl. Lahir : Bumiayu, 07 Agustus 1979  
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : Dirasah Islamiyah / Pemikiran Islam  
Fakultas/Program : Pascasarjana  
Alamat : Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali  
Mandar, Sulawesi Barat.  
Judul : Ulama dan Politik (Study Peran Ulama dalam  
Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Polewali Mandar, 10 Sept.2020

Penyusun



**Said Usman Umar**  
NIM: 80100215071

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Ulama dan Politik (Study Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar)*", yang disusun oleh Saudara/i Said Usman Umar NIM: 80100215071 NIM}, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Pemikiran Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. Usman Jafar, M.Ag

()

### KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

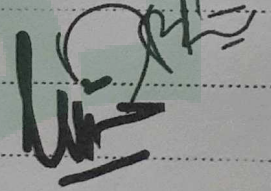
()

### PENGUJI:

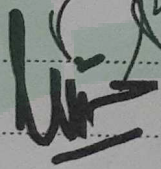
1. Dr. Hamzah Harun, Lc., M.Ag

()

2. Syahril Karim, M.A., Ph.D

()

3. Prof. Dr. Usman Jafar, M.Ag

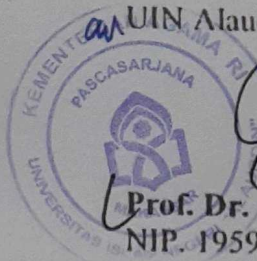
()

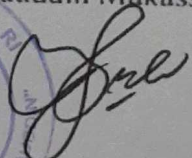
4. Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

()

Makassar, 12 September 2020

Diketahui oleh:  
Direktur Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,



  
Prof. Dr. H.M. Galib, M., M.A.  
NIP. 195910011987031004

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Said Usman Umar**  
**NIM : 80100215071**  
**Konsentrasi : Pemikiran Islam**  
**Judul Disertasi : Ulama dan Politik (Studi Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar)**

---

Tesis ini membahas topik ulama dan politik, khususnya yang berkenaan dengan peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Permasalahan pokok yang dikaji berfokus pada kiprah ulama dalam kontestasi politik, pandangan (tokoh) masyarakat terhadap kiprah, dan pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Polman.

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan kualitatif-deskriptif, Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan pemikiran politik Islam untuk mengulas visi, posisi, peran, kiprah dan pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Polman. Pendekatan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kritis.

Kiprah politik ulama masih sangat minim dalam kontestasi politik di Polman, ulama yang terlibat langsung dalam politik praktis masih sangat kurang, hanya dua nama yang diidentikkan sebagai ulama dari Polman yang terlibat aktif dalam politik praktis, yaitu AGH.Syibli Shahabuddin dan H. Zainal Abidin, Lc. Posisi strategis ulama dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Polman tidak membuat ulama yang terlibat dalam dunia politik praktis mendapat dukungan signifikan dari masyarakat. Visi politik ulama masih belum kuat mengakar di masyarakat, karena strategi dan komunikasi politik yang dijalankan oleh ulama masih terbilang sangat tradisional dan konvensional. Pengaruh politik ulama sedikit menonjol ketika ulama dijadikan salah satu *proxy* dalam suksesi calon kepala daerah baik dalam pemilihan gubernur maupun bupati. Berkenaan dengan pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan publik di Polman masih belum optimal. Ulama hanya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan yang terkait masalah-masalah keagamaan. Pada pengambilan kebijakan yang lebih luas, ulama masih belum dilibatkan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif karena masih dipandang belum memiliki keahlian di bidang tersebut. Respons tokoh masyarakat terkait kiprah politik ulama dalam kontestasi politik di Polman pada dasarnya sangat apresiatif, hanya saja diakui peran dan pengaruh yang dimainkan oleh ulama di Polman selama ini masih belum optimal. Oleh karena itu, semuanya mengharapkan maksimalisasi peran ulama dalam dunia politik di Polman dengan mendorong ulama yang punya kapasitas dan integritas untuk terlibat aktif kontestasi politik di Polman serta memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan publik di Polman.



## **ABSTRACT**

**Name : Said Usman Umar**  
**Reg. Number : 80100215071**  
**Departement : Islamic Thought**  
**Dessertation Tittle : Ulama and Politics (A Study on the Roles of Ulama in the Political Contestation of Polewali Mandar Regency)**

---

The main objective of this thesis was on the issue of ulama' and politics, especially on the subject related to the roles of ulamas in the political contestation of Polewali Mandar (Polman) regency. In particular, this dissertation will examine three main problems namely the roles of ulamas in the political contestation of Polman, the perceptions of community leaders on ulamas' involvement on politics, and the influences of ulamas in Polman political contexts.

The methodological approach taken in this study was descriptive-qualitative field research. The main approach employed in this study was Islamic political thought in which the intentions, positions, roles, responsibilities, and influences of ulamas in the political contestation of Polman were carefully reviewed. The secondary approaches used in this research were the sociological politics, the historical, and the comparative approaches. The research data were analysed using descriptive-critical analysis.

From this research, it is apparent that Ulama's political roles in the political contestation of Polman was still minimal. There were only two ulamas identified from this research who were actively involved in the political practices in Polman, namely AGH. Syibli Shahabuddin and H. Zainal Abidin, Lc. The strategic position of ulamas in the social and cultural structure of Polman did not make the ulamas to participate any political campaigns and gain significant supports from the society. In addition, the ulamas' political vision was yet to be firmly rooted in the society as most of the political strategies and communication carried out by the ulamas were considered to be fairly traditional and conventional. However, the political influences of ulamas were rather prominent when the ulamas became the proxies of a candidate succession in the election of governors or regents. In terms of the ulamas' influences on public policy decision making, it has been considered that ulamas did not play a significant roles in influencing the decisions taken by the government. Ulamas were only involved in the governmental policies related to religious matters. In a broader policy decision making, the ulamas were yet to be involved by the government either in the executive or in the legislative matter as the ulamas were considered to have no expertise in the political and governmental field. Furthermore, The response of community leaders related to the ulama's political gait in the political contestation of Polman was receptive in nature.

Nevertheless, the roles and influences of the ulamas in Polman were still not optimal. Therefore, it is expected that the roles of ulama in the political contestation of Polman should be further maximized in which the ulamas who have the capacity and integration were encouraged to be actively involved in the political contestation of Polman. Last but not the least, the Ulamas were also expected to have influences on public policy decision making in Polman.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Ridho-Nya, tesis yang berjudul “Ulama dan Politik (Study Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar)”, dapat diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar magister pada program pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh Ummat Islam yang beriman dan beramal shaleh.

Dalam penyusunan tesis ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berupa moril maupun material. Untuk maksud tersebut, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua peneliti yang telah berada dalam dekapan Ridho-Nya Habib Umar bin Hamid al Azuz (alm) dan Syarifah Azizah bin Hasan bin Sahl (alm.). semoga amal ibadah keduanya di terima disisi-Nya, diampuni segala khilafnya dan diberikan tempat terbaik disisi-Nya.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D beserta Wakil Rektor, yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. M.

Galib M, M.A, beserta civitas akademika Pascasarjana yang senantiasa berkomitmen mengembangkan mutu pendidikan.

4. Prof. Dr. Usman Jafar, M.Ag sebagai Promotor, dan Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag sebagai Kopromotor yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan dan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Hamzah Harun, M.Ag dan Syahrir Karim, M.A., Ph.D sebagai penguji yang telah mengasah dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan proses penelitian hingga selesainya ujian tutup.
6. Para Guru Besar dan segenap dosen di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh literatur selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
8. Kepada segenap informan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
9. Kepada istri tercinta Syarifah Aliyah Habibu Sahel yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini, begitu juga segenap teman-teman angkatan 2015 Konsentrasi Pemikiran Islam serta semua teman-teman yang tidak disebutkan satu- persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt.



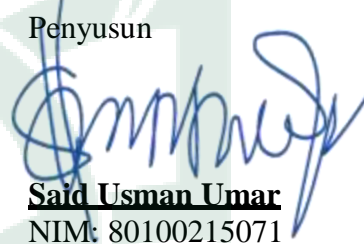
Penyusunan tesis ini telah dilakukan secara maksimal, namun dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga Allah swt, senantiasa meridhai semua amal dan usaha yang dilakukan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan karena Allah swt.

*Wassalamu'alaikum*

Polewali, 10 September 2020

Penyusun



**Said Usman Umar**

NIM: 80100215071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	13
D. Kajian Pustaka .....	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	25
A. Teori Peran dan Pengaruh Sosiali.....	25
B. Teori Perilaku dan Kontestasi Politik .....	32
C. Teori Relasi Agama dan Politik .....	41
D. Teori Ulama dan Politik .....	45
E. Kerangka Konseptual.....	59
BAB III METODELOGI PENELITIAN .....	60
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Sumber Data .....	62

D.	Metode Pengumpulan Data .....	64
E.	Instrumen Penelitian .....	67
F.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	67
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	71
IV TEMUAN DAN PEMBAHASA .....		73
A.	Setting Lokasi Penelitian .....	73
B.	Kiprah Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar .....	78
C.	Pengaruh Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar .....	102
D.	Respon tentang Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Polman .....	120
BAB V PENUTUP .....		127
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Implikasi Penelitian .....	130
DAFTAR PUSTAKA .....		131
DAFTAR PUSTAKA .....		131
RIWAYAT HIDUP .....		137



## DAFTAR TABLE

Table 1 : Daftar Ulama di Polewali Mandar .....	81
Table 2 : Daftar Ulama yang Mengikuti Kontestasi Politik di Polman .....	92



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam merupakan agama mayoritas bagi penduduk Indonesia, sekitar 88%, dari 250 juta Penduduk Indonesia adalah muslim, hal ini membuat negara Indonesia menjadi Negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia. Meskipun Islam tidak disebutkan dalam konstitusi negara Indonesia, Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik di Negara ini. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 1297 di Samudera Pasai (Aceh), Islam telah menjadi satu sumber inspirasi dalam pembentukan nilai-nilai, norma-norma dan tingkah laku rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Pada masa pemerintah kolonial Belanda, Islam telah membantu memelihara, mempertahankan, dan bahkan mensymbolisasikan identitas dan ciri khas rakyat Indonesia serta oposisinya terhadap kekuasaan kolonial Belanda.<sup>2</sup> Di era Indonesia merdeka, Islam masih dipelihara fungsinya sebagai tolok ukur moralitas dan tingkah laku bagi umat Islam bahkan bagi masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Dan acapkali pula Islam menjadi dalil legitimasi dalam hal pengambilan kebijakan publik dan bahkan menjadi legitimasi terhadap proses pembangunan politik, terutama masalah-masalah yang prinsip seperti persoalan dasar negara, kekuasaan, dan otoritas. Meskipun dasar Negara adalah Pancasila, tapi selalu saja dicarikan pembenaran dan persesuaian

---

<sup>1</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 1.

<sup>2</sup>WF. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change* (Bandung: Van Hove Ltd, 1996), h. 205.

<sup>3</sup>Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi merupakan bukti kongkret betapa Islam kerap dijadikan tolok ukur dalam hal moralitas kebangsaan bahkan masuk hingga pada aspek normatif seperti undang-undang.

dengan Islam agar mendapat legitimasi dan dukungan dari rakyat dan tokoh Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Tanpa legitimasi dari Islam, melalui tokoh-tokohnya, proses pembangunan politik atau pada pembangunan nasional pada umumnya tidak akan berjalan secara efektif. Ini menunjukkan keunikan sistem sosio-kultural dan politik bangsa Indonesia, di mana ketika banyak negara proses pembangunan politik dan nasional berjalan searah dengan kecenderungan sekularisasi, tapi untuk kasus Indonesia, kebijakan atau keputusan politik yang diambil tidak dapat mengabaikan otoritas keagamaan (Islam) yang berlaku.<sup>5</sup> Sedemikian vital peran Islam di Indonesia, meski tidak disebutkan secara formal, tapi Islam memberikan kontribusi dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pri kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Keunikan inilah yang ditampilkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara muslim yang lain. “Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler”, itulah jargon yang selalu didengungkan dalam berbagai kesempatan untuk mendeskripsikan pilihan model Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan wujud sintesa politik yang mengakomodir berbagai kepentingan kebangsaan yang majemuk (multi agama dan multi etnik), yang mewakili aspirasi mayoritas tanpa menegasi eksistensi kalangan minoritas. Pancasila merupakan model yang unik, sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang benar-benar unik dalam pilihan model negaranya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Sabara Nuruddin, “Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI” dalam Jurnal *Pappasang*. Volume I Nomor 1 tahun 2013 h. 1.

<sup>5</sup>WF. Wertheim, *Indonesian Society in..*h. 207.

<sup>6</sup>Sabara Nuruddin, “Islam dalam Lanskap...”, h.2.



Meskipun penerapan Pancasila secara murni dan konsekwen acapkali “ternodai” oleh penguasa *despotic* yang memanfaatkan pancasila sebagai tameng kekuasaan dan alat untuk mencapai kepentingan, seperti yang terjadi di masa orde lama dan orde baru. Namun, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, tetaplah menjadi kajian yang unik dan dapat menjadi ikon yang mencitrakan kekhasan Islam di Indonesia. Eksistensi negara Indonesia acapkali dipandang secara positif dan optimis oleh para pemikir Islam dunia. Oleh Malik bin Nabi pada dekade 90-an diprediksi akan menjadi tempat bagi cahaya fajar Islam yang menyemburat,<sup>7</sup> dan oleh Asghar Ali Engineer, meyakini jika moderasi Islam terus dipertahankan di Indonesia, maka hal ini akan menjadi model negara Islam di dunia.<sup>8</sup>

Begitu strategis dan sentralnya peran dan posisi Islam dalam dinamika sosial politik Indonesia dilatari karena masuknya Islam di Indonesia melalui kombinasi antara jalur politik dan kultural. “*Islamisation is a process which has continued down to the present day*”, kata MC. Ricklefs sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sewang, bahwa Islamisasi adalah proses yang tidak pernah berhenti.<sup>9</sup>

Setidaknya, penyebaran Islam di wilayah Nusantara berlangsung dalam tiga pola.

1. Pola integratif yaitu berlaku di kepulauan Melayu termasuk sebagian pulau Jawa.
2. Pola dialog seperti terjadi di pulau Jawa, khususnya di wilayah pedalaman dan pusat keraton.

---

<sup>7</sup>Lihat Malik bin Nabi, *Musykilat al-Afkar fi al-'Alam al-Islam*, Diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Abdul Adhiem dengan Judul *Membangun Dunia Baru Islam* (Cet, II; Bandung : Mizan. 1995), h. 24.

<sup>8</sup> Lihat, Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Diterjemahkan oleh Tim Postudia (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 183.

<sup>9</sup>Lihat Ahmad M. Sewang. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII)* (Cet, II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 7-8.

3. Pola kombinasi antara integratif dan dialog seperti Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Polarisasi ini terbentuk melalui perbedaan *modus vivendi* dan corak perkembangan Islam di tiga kawasan tersebut.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan konteks agama Islam dan politik tulisan Bryan S. Turner cukup menggambarkan fakta tersebut. Menurut Turner, agama secara historis telah membantu kelas berkuasa untuk bertahan secara politik, tetapi bantuannya ini tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi masyarakat modern (kapitalis). Kepatuhan politik tetap bisa dipelihara dan dipertahankan, meski tidak ada tuntutan dan aturan yang *legitimate*.<sup>11</sup> Seiring perkembangan zaman dan perubahan sistem politik, kekuatan legitimasi dan otoritas agama telah mengalami penggerusan, meski pengaruh dan otoritas tidak serta-merta hilang. Kekuatan dan otoritas agama dalam mempengaruhi dinamika sosial politik lebih pada konteks dan pengaruh kulturalnya. Kekuatan otoritas agama (Islam) masih memiliki pengaruh yang kuat melalui tokoh-tokohnya dalam memengaruhi opini dan pilihan publik.

Aksi 4 November 2016 (411), aksi 2 Desember 2016 (212) yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Fatwa ulama cukup efektif memengaruhi opini dan pilihan publik dengan isu penistaan agama (Al Qur'an) yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

---

<sup>10</sup>Pola integratif sebagaimana yang terjadi di tanah Melayu dan Pulau Sumatera secara umum yaitu dengan mengintegrasikan secara penuh antara kebudayaan, politik dan identitas Melayu dengan Islam. Pola dialog sebagaimana yang terjadi di Jawa, yaitu Islam masuk melalui perangkat kebudayaan dan memberi warna kepada kebudayaan Jawa. Adapun di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur, memadukan dua pola tersebut sekaligus, yaitu dengan mengintegrasikan identitas lokal dengan Islam secara politik namun dalam hal kebudayaan terjadi pola-pola dialog. Lihat Mansyur Suryanegara, *Islam dalam Sejarah dan Kultur Nusantara* (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 34.

<sup>11</sup>Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dengan judul *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: IRCISOD.2003. h. 384.

Melalui kasus tersebut, fatwa ulama menemukan momentumnya secara optimal dalam sebuah kontestasi politik.

Sosok ulama bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagamaan masyarakatnya. Ulama tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada masyarakat tradisional biasanya ulama menjadi tempat untuk meminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilihkan waktu untuk memulai suatu pekerjaan hingga soal-soal politik. Karena kemampuan agamanya yang cukup tinggi, maka ulama ditempatkan sebagai sosok “guru” baik dalam ilmu bathin (esoterik) maupun ilmu zahir (eksoterik). Jika dilihat dari sejarahnya, bahwa gelar ulama memang tidak mudah untuk didapat.<sup>12</sup>

Kedudukan sosial ulama dianggap cukup tinggi, sehingga ulama termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, ulama berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat. Suzanne Keller memposisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal: pertama, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, kedua, sebagai pendukung kekuasaan moral, dan ketiga, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat. Seorang tokoh dituntut untuk berhasil dalam mengembangkan suatu citra umum yang memudahkan hubungan timbal balik yang bersifat simbolis antara tokoh agama dengan masyarakat. Tokoh agama dapat juga ditempatkan sebagai kolektif model dan cermin dari ambisi, harapan dan pergolakan

---

<sup>12</sup>Hasanatul Jannah, “Kyai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan” dalam *Jurnal Fikrah* Volume 3 Nomor 1 tahun 2015, h. 158.

masyarakat.<sup>13</sup> Potret sejarah kelahiran bangsa ini tampaknya sarat dengan tampilnya agama dalam ruang politik. Agama tidak sekadar diposisikan secara sakral dengan segala ritualistik simbolik di dalamnya, namun juga diorientasikan kepada “nafas” kehidupan berpolitik di Indonesia. Agama dengan demikian menjadi variabel penting yang memengaruhi kehidupan politik di Indonesia.<sup>14</sup> Wajah agama, dalam hal ini wajah Islam pada masa pembentukan Negara Indonesia, bukan tampil dengan wajah formalis, melainkan wajah Islam politik yang mengedepankan nilai dan substansi universal, Hal inilah yang membuat Pancasila diterima oleh mayoritas tokoh ulama dan umat Islam serta mereka dengan rela hati menyetujui penghapusan deapan kata pada piagam Jakarta.<sup>15</sup>

Beranjak dari historitas politik Islam di Indonesia, ulama sudah dari dulu terlibat dalam perpolitikan. Ulama tidak terpisah dari urusan politik yang hanya mengurus kepentingan akhirat saja. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Ulama selalu terlibat dan tidak terlepas dari politik.<sup>16</sup> Pertama, bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup yang tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. Kedua, dengan posisi atau kedudukannya sebagai (elit) pemuka agama, ulama memiliki pengikut dan pengaruh yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Hal

---

<sup>13</sup>Suzanne Killer, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), h. 213.

<sup>14</sup>Hakim Syah, “Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangkaraya” dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 15 Nomor 29 Januari-Juni 2016, h. 63.

<sup>15</sup>Delapan kata tersebut adalah, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kalimat tersebut diubah pada sidang konstitusi 18 Agustus 1945 menjadi,”Ketuhanan yang Maha Esa.

<sup>16</sup>Koiruddin, *Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai dalam Partai Politik)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h.46.

ini menyebabkan Kiai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial serta pengembangan pendidikan dan ekonomi. Ketiga, dilihat dari sisi sejarah, Kiai memiliki peran yang cukup besar dalam politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam pergolakan melawan penjajahan hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan RI diproklamasikan.

Ulama sebagai politikus sekarang ini menjadi hal yang biasa karena pada dasarnya, pendiri bangsa Indonesia pun banyak tokoh yang bergelar ulama sehingga perannya di dunia politik menjadi kewajaran belaka. Hal yang menjadi keresahan adalah bahwa ulama yang lalai akan statusnya sebagai ulama. Ulama yang seharusnya mempunyai karakter agamis, malah melupakan nilai-nilai moralitas keagamaan. Bahkan lebih parah lagi, menjual dalil-dalil kitab suci dengan harga yang murah hanya demi kepentingan partai politiknya. Padahal, dalil-dalil tersebut merupakan sakralitas dalam ajaran agama, bukan sesuatu yang bersifat profan. Dengan demikian, luntur pula sakralitas teks-teks keagamaan sehingga menjadi profanitas murahan.<sup>17</sup>

Kehadiran sosok ulama hendaknya menjadi teladan bagi elit politik yang lain, juga kepada umat manusia di Indonesia khususnya. Ulama adalah sosok yang dikenal 'alim (berlimu) dan mempunyai moralitas yang baik. Dengan kehadiran ulama seharusnya bisa mewarnai politik kekuasaan menjadi harmonis, bukan malah menambah kontras permusuhan antargolongan atau antarpantai. Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh ulama.

Sebagaimana diisyaratkan oleh sebuah hadis:

---

<sup>17</sup>Muhammad Amin MS, *Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) ,h. 86.

مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسَلَا فِي غَنَمٍ بِأَقْسَدَ لَهَا مِنْ جُرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

“Dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan karena rakus harta dan kedudukan.”<sup>18</sup>

Hadis tersebut menyiratkan makna bahwa harta dan kedudukan (tahta) memiliki daya rusak yang cukup tinggi, dan hal yang paling dirusak adalah agama. Harta dan kedudukan sangat identik dengan politik, oleh karena itu demimelihara efek kerusakan yang ditimbulkan oleh politik, orang-orang yang memiliki integritas keagamaan baik dari segi pengetahuan maupun sifat wara’ perlu tampil di dunia politik demi menyelamatkan umat dari kerusakan agamanya. Orang-orang yang dimaksud adalah ulama, yang dengan integritas dan kewaraannya mampu menjadi penjaga dan penyeimbang dunia politik sehingga tetap berjalan di atas koridor prinsip dan nilai Islam.

Sebenarnya yang dititikberatkan adalah peranan ulama dalam melakukan aktualisasinya di hadapan semua umatnya. Jika seorang ulama itu ikut andil dalam dunia politik, maka tidak lain adalah untuk menjadi figur dan teladan yang baik, entah itu bagi tokoh politikus yang lain atau masyarakat yang memandangnya. Namun jika ulama tersebut tidak mau berkecimpung dalam dunia politik, maka sewajarnya menjadi ulama yang sebenarnya. Artinya, ulama yang memang benar-benar mengasuh dan menuntun umat agar mendapat siraman rohani dalam menjalani kehidupan bersosial vertikal dan horisontal.<sup>19</sup>

Keterlibatan ulama dalam kontestasi politik terbagi dalam dua jenis peran; yaitu keterlibatan langsung sebagai aktor dalam kontestasi politik melalui partai

<sup>18</sup>Hadis Riwayat. Ahmad Nomor 16198, Ibnu Hibban Nomor 3228 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth.

<sup>19</sup>Muhammad Amin MS, *Mengislamkan Kursi dan Meja...* h.97.



politik atau suksesi pemilihan kepala daerah atau kepala Negara, serta keterlibatan secara tidak langsung, bukan sebagai aktor namun memberikan dukungan pada partai atau calon kepala daerah tertentu. Keterlibatan ulama dalam kontestasi politik memicu kontroversi pandangan dari beberapa pihak antara yang pro dan kontra. Menurut mereka yang tidak setuju akan keterlibatan ulama dalam politik memandang bahwa keterlibatan ulama dalam wilayah politik kekuasaan justru menjadikan kerja-kerja kultural ulama terabaikan. Ulama yang selama ini fokus di wilayah kultural seperti melakukan pendidikan (keagamaan) kepada masyarakat, melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang menyimpang, memerangi kebobrokan akhlaq, membumikan kesantunan dan keadaban, menebarkan kebaikan dan kebajikan mulai tak terurus karena ulama terserap hampir sepenuhnya untuk kerja-kerja politik kekuasaan. Apalagi sistem kekuasaan dewasa ini sangat korup sehingga bukan mustahil ulama bisa *terjebak* dalam sistem yang korup tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan yang kontra, sebaiknya ulama tetap berada di wilayah kultural saja, jangan memasuki wilayah politik agar tugas sebagai penyampai kebenaran tidak terkontaminasi. Lebih elegan, bermartabat dan humanis menyuarakan kebenaran dari luar struktur untuk mengingatkan pengambil kebijaksanaan (*decision making*) agar tetap pada koridor keadilan bagi kemaslahatan ummat sembari memperbaiki akhlaq umat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kelompok yang setuju dengan keterlibatan ulama dalam kontestasi politik memandang bahwa episentrum dakwah ulama sekarang ini bukan hanya berada di wilayah kultural semata, atau hanya pada peran-peran tradisional saja. Seiring dengan transformasi zaman wilayah-wilayah struktural yang dahulu dianggap tidak menarik dewasa ini semakin dilirik. Terlepas dari kontroversi, namun

munculnya “*uztad entertainment*” membuktikan bahwa wilayah hiburanpun sekarang sudah diisi dengan nuansa religi. Hadirnya ulama dalam politik kekuasaan akan memberi arti bagi kekuasaan itu sendiri karena “*ter-spritualisasi*”. Kekuasaan akan dijadikan sarana pengabdian kepada Tuhan untuk kemudian didedikasikan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. tidak ada alasan bagi ulama untuk meninggalkan politik, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Alasan logisnya bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan namun lebih dari itu Islam secara luas dipandang sebagai agama yang paripurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara (*rahmatan lil alamin*). Hal lain yang dianggap juga penting adalah mengimplementasikan amar ma’ruf nahi mungkar ditengah carut marut dunia politik yang kebablasan. Penegakan amar ma’ruf nahi mungkar ini terasa penting mengingat ancaman degradasi moralitas yang menimpa kehidupan anak bangsa dalam berbagai ranah kehidupan sudah termasuk kategori darurat termasuk hilangnya etika dan fadsun politik yang dibingkai peradaban.<sup>20</sup>

Kabupaten Polewarii Mandar, (selanjutnya disebut Polman) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya disebut Sulbar) yang memiliki corak identitas keislaman yang cukup kuat. Sejak kedatangan dan keberterimaan Islam oleh masyarakat Mandar pada awal abad 17, Islam masuk dan diterima melalui saluran politik, kultur, dan pendidikan.<sup>21</sup> Sejak saat itu, ulama memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Mandar, khususnya di Kabupaten Polman. Islam diterima sebagai

<sup>20</sup>Ahmad Danuri, *Ulama dan Pusrat Kekuasaan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h.76.

<sup>21</sup>Mengenai Islamisasi di Tanah Mandar lihat Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan* (Makakssar: Lamacca Press, 2003), h.118-138.

bagian integral dari identitas masyarakat Mandar. Menggunakan perspektif teori identitas, merujuk pada teori Amartya Sen, Islam dipilih sebagai identitas dengan memperhatikan aspek signifikansi sosialnya. Bukan cuma nalar yang berperan dalam pilihan identitas, melainkan pertimbangan akan konteks sosial dan relevansinya.<sup>22</sup> Identitas tampil dalam ruang perbedaan berjaln kelindan dengan kesadaran dan pemaknaan.<sup>23</sup> Identitas Islam dalam masyarakat Mandar menjadi bagian yang integral dalam konteks sosial dan relevan dalam konteks kehidupan politik lokal mereka.

Sejak berdirinya provinsi Sulbar pada tahun 2004, kehidupan politik di Polman bergerak cukup dinamis dalam sebuah kontestasi demokrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dinamika ini setidaknya secara signifikan lebih dinamis dibandingkan ketika Polman masih menjadi bagian dari Provinsi Sulsel. Diantara pemantik dinamika politik di Sulbar dan Polman khususnya adalah munculnya beberapa klan yang bertarung dalam kontestasi demokrasi, dan hal tersebut tidak terlihat menonjol ketika Polman masih bernama Polewali Masama (Polmas) dan amsih tergabung dalam Provinsi Sulsel

Ulama dalam istilah lokal disebut *annangguru*<sup>24</sup> merupakan salah satu elemen masyarakat yang terlibat secara aktif dalam kontestasi politik di Polman. Istilah *annangguru* sudah dipergunakan sejak tahun 1605, masa pemerintahan Raja Pamboang, I Sallarang Tomatindo Di Agamana. *Annangguru* di Mandar digunakan juga oleh perempuan, sedangkan di Bugis (*anreguru*) dan Makassar (*anrongguru*)

---

<sup>22</sup>Amartya Sen, *Identity and Violence: the Illusion of Destiny* (Cet, I; Ne Yowk-London: W.W. Norton and Company, 2006),h. 28.

<sup>23</sup>Peter J Burke dan Jan E. Steets, *Identity Theory* (New York: Oxford University Press, 2009), h. 38

<sup>24</sup>Dalam istilah Bugis disebt *anreguru* dan Mak politikassar *anrongguru*.

hanya kepada laki-laki. *Annangguru* adalah sebutan bagi ulama di Mandar. Kata *annangguru* merujuk kepada figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam Karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi, dalam struktur masyarakat Mandar, khususnya di Polewali Mandar, figur *annangguru* memperoleh pengakuan akan posisi penting di masyarakat.<sup>25</sup>

Keterlibatan ulama/*annangguru* tersebut terlibat baik secara langsung sebagai aktor dalam kontestasi politik dan keterlibatan secara tak langsung melaluiperan sosio-kultural mereka. Konteks ke-ulama-an di Polman tidak hanya berkenaan dengan status dan peran ulama dalam bidang fikih dan dakwah saja, melainkan ulama sebagai pimpinan tarekat (*sufi order*). Di tanah Mandar, khususnya Polman kelompok tarekat cukup massif dianut oleh masyarakat dan pimpinan tarekat (*mursyid*) cukup memiliki kharisma dan pengaruh yang kuat dan mengakar di masyarakat. Pengikut tarekat merupakan massa yang memiliki loyalitas penuh kepada ulama mereka, termasuk dalam urusan pilihan politik. Diantara tokoh tarekat yang secara langsung terlibat dalam kontestasi politik di Polman adalah AGH.Muhammad Syibli Syahabuddin yang telah 2 kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) tahun 2009 dan 2014. Beliau adalah salah satu pimpinan tarekat Qadiriyyah yang memiliki pengikut cukup banyak di Sulbar. Syibli 2 kali lolos sebagai senator mewakili Sulawesi Barat berkat dukungan penuh dari jamaah tarekat Qadiriyyah yang dipimpinnya. Keterlibatan langsung Syibli Syahabuddin dalam kontestasi politik merupakan contoh nyata peran ulama dalam kontestasi politik di Polman.

---

<sup>25</sup>Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Polman: Gerbang Visual, 2018), h. 5-6.

Pada setiap kontestasi politik lokal di Polman ulama memainkan peran yang sangat strategis dalam hal memengaruhi masyarakat dan menentukan arah dinamika kontestasi politik di Polman. Pengaruh tersebut, tidak hanya dalam membangun opini public tapi hingga pada penentuan pilihan politik masyarakat pada setiap kontestasi politik di Polman. Mengingat begitu signifikan peran ulama dalam kontestasi politik di Polman, peneliti tertarik untuk menelaahnya secara lebih mendalam dengan mengeksplorasi kiprah, pengaruh, serta pandangan masyarakat terkait keterlibatan ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini membahas pokok masalah Bagaimana peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Pokok masalah tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam tiga sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana kiprah ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman?
2. Bagaimana pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman?
3. Bagaimana respons masyarakat tentang peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Penelitian ini berfokus pada relasi ulama dan politik dengan mengeksplorasi peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman. Ada pun yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki pengetahuan keagamaan

yang luas serta memiliki peran dan pengaruh dalam dinamika keislaman di Polman, baik sebagai pimpinan/tokoh tarekat, pimpinan pesantren, pimpinan/tokoh organisasi Islam, maupun mereka yang secara cultural mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan dipanggil dengan gelar *annanggur*, yaitu gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan sebuah tarekat, pesantren dan kelompok-kelompok pengajian kitab.<sup>26</sup>

Politik dalam penelitian ini adalah politik dalam artian praktis, yaitu kontestasi politik dalam mekanisme dan saluran demokrasi baik pada pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur), maupun pemilihan presiden. Definisi operasional politik dalam penelitian ini juga diperluas dalam kontestasi terkait pengambilan kebijakan melalui saluran legislatif maupun eksekutif di Polman. Kontestasi politik merujuk pada kontestasi politik pada tingkat lokal Kabupaten Polman, meski domain dari kontestasi tersebut pada ranah yang lebih luas (skala Provinsi Sulawesi Barat maupun skala nasional). Kabupaten Polman adalah lokus penelitian ini dengan mengambil durasi kontestasi politik sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Pendekatan utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik.

Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian komprehensif dan kritis yang didapatkan melalui riset yang mendalam sehingga didapatkan analisis tentang masalah penelitian dengan sistematis, universal, analitis, kritis, dan reflektif tentang ulama dan politik di Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar.

---

<sup>26</sup>Aco Musaddad, *Annangguru...*, h.6.



Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sikap dan perilaku dari seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang berefek pada banyak orang atau sekelompok orang. Konteks peran yang dimaksud dalam penelitian ini membawa pengaruh dalam dinamika konstalasi politik di Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar.

Secara akademik, Kabupaten Polman dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa ulama (*annangguru*) memiliki peran sentral dan pengaruh strategis dalam dinamika sosial dan politik. *Annangguru* secara kultural cukup dihormati dan menjadi tempat merujuk bagi sebagian masyarakat Polman, tidak hanya dalam persoalan keagamaan, tapi termasuk dalam persoalan kehidupan sosial dan politik. Dibandingkan daerah lain di Sulbar, Polman adalah daerah dimana figur *annangguru* memperoleh pengakuan penting di masyarakat.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Guna mendapatkan data awal sebagai bahan perbandingan dalam penulisan ini, peneliti memaparkan beberapa pandangan peneliti yang melakukan penelitian tentang ulama dan politik, dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang memiliki nilai akademik dan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian ini, sebagai berikut:

1. Aco Musaddad. *Annangguru* di Mandar: sebuah Riset tentang Kedudukan dan Peran para *Annangguru*. Disertasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 dan telah diterbitkan tahun 2018 oleh Penerbit Gerbang Visual Polman dengan judul *Annangguru: dalam Dinamika Perubahan Sosial di Mandar*.

*Annangguru* sebagai pemimpin kharismatik yang berkedudukan sebagai elit masyarakat, dalam sejarahnya berperan cukup signifikan di semua aspek kehidupan sosial, budaya, agama dan politik. *Annangguru* dapat melampaui fungsi khususnya sebagai pemangku di bidang keagamaan dan ditempatkan pada posisi paling tinggi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena *annangguru* masih dipandang sebagai tokoh yang cukup berpengaruh, karena pengetahuan yang dimiliki dan tingkat spiritualitas yang mendalam. Terbatasnya informasi ke masyarakat, membuat *annangguru* dijadikan sandaran untuk menjawab problem-problem sosial, bahkan *annangguru* dipandang sebagai orang sakti yang mempunyai ilmu yang melebihi manusia pada umumnya, tentunya juga sangat didukung faktor sosiologis masyarakat Mandar yang religious.

2. Musafir Pababari. Tarekat Qadiriyyah di Mandar. Disertasi Universitas Hasanuddin 2003. Penelitian tersebut berfokus pada pola hubungan otoritas agama dan politik dalam perpektif sosiologis di Mandar.

Hasil penelitian Pababari menunjukkan bahwa kondisi politik pemerintah dipandang akomodatif terhadap kepentingan Islam, maka pengamal tarekat akan memberikan respons positif dan dukungan politik kepada yang berkuasa. Kemudian dalam kondisi politik pemerintah dipandang tidak sesuai, menyimpang, merugikan atau mengancam kepentingan Islam, maka pengamal tarekat akan memberikan kepada pemerintah yang berkuasa, dan munculnya multitafsir, dalam perbedaan penafsiran ini kaum internal tarekat akan memberikan respon yang berbeda. *Annangguru* sebagai pemimpin tarekat dan para muridnya serta otoritas mereka dalam politik.

3. Asep Muslim dkk. *Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten*. Laporan Penelitian dari Program Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Diterbitkan dalam jurnal Mimbar tahun 2015. Penelitian ini mengeksplorasi peran sosial politik ulama dan jawara di Kabupaten Pandeglang Banten.

Penelitian ini melakukan perbandingan peran ulama dan jawara sebagai 2 kelompok sosial yang memiliki pengaruh dalam dinamika sosial politik masyarakat Pandeglang. Menurut Asep Muslim, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi dinamika peran sosial politik ulama dan jawara yaitu; kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan aspek sosial-budaya yang melingkarinya. Artinya, terdapat beberapa kebijakan yang langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempersempit atau memperluas gerakan ulama dan jawara. Misalnya, kebijakan yang dilakukan kolonial Belanda dengan mempolitikasi jawara sebagai bandit sosial jelas merupakan langkah pelabelan negatif kaum jawara yang pada akhirnya menurunkan derajat sosialnya. Begitu pula halnya dengan yang terjadi pada masa Orde Baru dimana pembentukan satkar ulama dan jawara tidak lebih dari upaya dari pemerintah untuk mengontrol aktivitasnya (menghegemoni ulama dan jawara). Sementara itu, menyangkut nilai sosial-budaya terutama karakter agraris, tradisional dan religius dari masyarakat Pandeglang relatif tidak mengalami perubahan meskipun proses modernisasi lambat laun memengaruhinya.

Penelitian ini lebih melihat konteks dinamika sosial peran ulama dan jawara dalam skala makro. Ulama dan jawara diposisikan sebagai kelompok sosial

yang dijadikan alat oleh politisi. Dengan demikian, dalam penelitian Asep Muslim dkk, posisi ulama bukan sebagai subjek dalam dinamika sosial politik di Pandeglang.

4. Jajat Burhanuddin. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia. Buku ini diterbitkan Mizan tahun 2012 membahas sejarah peran dan pergumulan ulama dalam konstasi politik di Indonesia.

Buku ini berusaha menelusuri upaya para ulama membangun peran dan legitimasi sosio-intelektual dan budaya mereka di Indonesia. Satu poin penting untuk ditekankan adalah, posisi strategis ulama ini tidak datang secara tiba-tiba. Ulama merupakan hasil perjuangan panjang melewati berbagai proses perubahan sosial-politik dalam sejarah Indonesia?mulai dari masa awal perkembangan Islam, kolonialisme Belanda, jaringan dengan Timur Tengah, hingga zaman pergerakan; semuanya menjadi basis sosio-historis bagaimana elite Muslim ini terus terlibat, dengan bahasa konseptual yang terus berubah, dalam penerjemahan dan pendefinisian Islam untuk kaum Muslim Indonesia, bahkan hingga kini. Salah satu yang berkaitan dengan keterlibatan ulama dalam politik ditinjau dari sisi tujuan masuknya ulama ke ranah politik merupakan pilihan-pilihan mulia.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan historis, sehingga hasil penelitian berupa penyajian data yang bersifat historis dan bukan pendekatan sosiologi politik.

5. Firdaus. Peran Ulama HUDA dalam Politik Pasca Orde Baru. Disertasi IAIN ar-Raniri Banda Aceh 2009. Membahas peran ulama Aceh yang tergabung

dalam HUDA pada dinamika politik Aceh pascaorba, tsunami 2004, dan perjanjian Helsinki 2005.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah bahwa dengan adanya Partai Lokal (Partai Aceh) di Aceh, yang memegang kuasa pemerintahan Aceh, Partai Aceh melakukan berbagai upaya dalam meresosialisasikan Syariat Islam di Aceh, dengan memberikan bantuan kepada majelis Taqlim atau Majelis Dzikir dan memberikan bantuan kepada kedayah agar para Ustad atau tenaga pengajian lebih mudah dalam memberikan pengajian Agama terhadap masyarakat Aceh baik itu tentang syariat Islam maupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keagamaan, dalam hal lain Partai Aceh selaku partai yang memegang kekuasaan juga membuat himbauan kepada masyarakat untuk membuat pengajian rutin di setiap Desa, dan juga aturan wajib belajar Alquran untuk anak-anak usia dini. Dalam hal lain Partai Aceh juga membuat larangan bagi wanita tidak boleh berkelian di atas jam 10 malam, dan juga larangan duduk ngangkang dengan yang bukan muhrim. Kontribusi Partai Aceh terhadap penerapan Syariat di Aceh sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Aceh dengan memberikan bantuan terhadap Majelis Taklim, Masyarakat Aceh lebih senang menghadiri Majelis taqlim ketimbang duduk yang tidak bermanfaat. Dengan mengikuti majelis taqlim masyarakat Aceh lebih sadar melakukan perbuatan yang dilarang Agama, maka dengan ini Syariat Islam akan muncul dengan kesadaran diri masyarakat Aceh dan juga pemuda-pemuda Aceh sekarang yang lebih senang terhadap kegiatan keagamaan itu didasari dengan ada sosialisasi pengajian di setiap gampong, dan juga Partai Aceh turut membantu baik dari segi dana

maupun bantuan terhadap balai-balai pengajian anak-anak tujuan agar anak-anak lebih nyaman dalam hal menuntut ilmu agama.

Penelitian di atas berfokus pada peran ulama HUDA dalam lokus peran di partai lokal Aceh. Partai lokal Aceh sebagai media peran politik ulama dalam penegakan syariat Islam di Aceh pasca orde baru.

6. Hakim Syah. Politik dalam Persepsi Ulama Palangkaraya. Penelitian yang telah diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Dakwah 2016. Penelitian ini membahas tentang pandangan ulama di Palangkaraya tentang politik dan demokrasi. Penelitian ini menjelaskan Secara umum ulama di Kota Palangka Raya berpandangan bahwa berpolitik harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama dan politik meskipun dua hal yang bertolak belakang, namun masing-masing saling memengaruhi. Agama bisa berkembang juga karena politik, politik menjadi baik dan santun juga dipengaruhi oleh agama. Ulama Kota Palangka Raya berpandangan bahwa demokrasi bukan pilihan ideal dalam penyelenggaraan negara karena demokrasi yang diterapkan cenderung banyak membawa mudarat ketimbang maslahat bagi rakyat. Kepemimpinan perempuan pun masih dipandang tabu sebab secara eksplisit dan tegas, Islam tidak mengenal kepemimpinan perempuan. Idealnya kaum laki-laki yang menjadi pemimpin meskipun demokrasi telah memberikan ruang bagi munculnya pemimpin dari kalangan perempuan. Money politic dan Golput merupakan praktik politik yang tidak dibenarkan dalam Islam. Keduanya justru merusak dan merugikan kepentingan umat Islam sendiri. Keterlibatan ulama dalam politik merupakan keniscayaan dan pilihan bebas dari individu ulama.



Penelitian di atas lebih berfokus pada pandangan ulama, bukan kajian tentang peran ulama.

7. Muhammad Amin MS. Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan. Buku diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 2009.

Buku ini menjelaskan pengaruh besar yang diberikan oleh ulama dalam bidang politik di Indonesia. Ulama dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah hal yang asing. Semenjak dahulu, peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia ini memang perlu diakui. Tidaklah mengherankan jika ulama terlibat dengan urusan politik, atau bahkan ulama itu sendiri yang dengan sengaja terjun sendiri ke panggung politik sebagai tokoh utama partai politik. Sementara itu, sosok ulama adalah sosok yang dikenal dengan pemandu umat (Islam) karena kepandaianya dalam hal keilmuan Islam. Ulama adalah pemimpin umat Islam, pewaris Nabi dalam menegakkan dan menjalankan perintah Tuhan. Muhammad Amin MS dalam bukunya "Mengislamkan Kursi dan Meja, Dialektika Ulama dan Kekuasaan" menguraikan dengan paparan yang nyata tentang perpolitikan di Indonesia yang sering kali melibatkan atau menggunakan peran ulama. Bahkan ulama itu sendirilah yang bermain politik dan menjadi tokoh utama dalam suatu partai politik. Kursi diartikan sebagai singgasana yang mana hal tersebut dalam dunia politik disebut dengan kekuasaan. Sementara meja mempunyai arti papan sebagai tempat berkas-berkas birokrasi yang mana menjadi urusan kenegaraan. Jika kursi dan meja tersebut dijadikan dalam satu istilah, kursi dan meja berarti kekuasaan dalam birokrasi politik. Sementara keikutsertaan ulama yang menjadi judul tersebut karena memang ulama mempunyai

pengaruh dan daya gertak besar dalam hal tersebut. Ulama sebagai politikus sekarang ini menjadi hal yang biasa karena pada dasarnya, pendiri bangsa Indonesia pun banyak tokoh yang bergelar ulama sehingga perannya di dunia politik menjadi kewajaran belaka. Yang menjadi keresahan adalah bahwa ulama yang lalai akan statusnya sebagai ulama. Ulama yang seharusnya mempunyai karakter agamis, malah melupakan nilai-nilai moralitas keagamaan. Yang lebih parah lagi, menjual dalil-dalil kitab suci dengan harga yang murah hanya demi kepentingan partai politiknya. Padahal, dalil-dalil tersebut merupakan sakralitas dalam ajaran agama, bukan sesuatu yang bersifat profan. Dengan demikian, luntur pula sakralitas teks-teks keagamaan sehingga menjadi profanitas murahan. Kehadiran sosok ulama hendaknya menjadi teladan bagi elit politik yang lain, juga kepada umat manusia di Indonesia khususnya. Ulama adalah sosok yang dikenal 'alim (berlimu) dan mempunyai moralitas yang baik. Dengan kehadiran ulama seharusnya bisa mewarnai politik kekuasaan menjadi harmonis, bukan malah menambah kontras permusuhan antargolongan atau antarpolisi. Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh ulama.

Buku di atas berfokus pada kajian umum tentang ulama dan kekuasaan dan secara spesifik pada dialektika ulama dan kekuasaan. Peran politik ulama tidak menjadi subjek utama dalam buku tersebut.

Posisi penelitian ini berfokus untuk memahami dinamika ulama dan politik di Kabupaten Polman, khususnya dalam hal kontestasi politik. Untuk memahami signifikansi peran dan pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman. Peran tersebut mencakup dinamika kontestasi ulama dalam perpolitikan di

Polman, serta bagaimana pengaruh ulama dalam memengaruhi dinamika percaturan politik tersebut, dan persepsi masyarakat dalam menanggapi peran politik ulama di Polman.

Hal khas dalam penelitian ini adalah pendekatan pemikiran politik Islam dan ditunjang dengan pendekatan sosiologi politik yang digunakan untuk membaca peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar. Pendekatan tersebut sekaligus pembeda yang memberikan penajaman pada karakteristik penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Secara komprehensif mengulas tentang kiprah, strategi dan pengaruh. Ulama dalam politik yang diharapkan dapat memberi rekomendasi terkait penguatan peran politik ulama baik dalam hal strategi suksesi maupun dalam pengambilan kebijakan strategis.

Penelitian ini cenderung memotret secara general mengenai peran politik ulama di Polman, dan lebih banyak menyoroti peran tersebut dalam masa pasca terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga masih banyak hal yang belum tuntas penelitian ini dan menyisakan ruang bagi penelitian selanjutnya. Diantaranya adalah penelitian mengenai historisitas peran politik ulama pada masa-masa sebelum pembentukan Provinsi Sulbar. Tema yang lebih ideografis mengenai pemikiran politik ulama di Polman juga masih belum banyak disentuh dalam penelitian ini.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan***

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kiprah ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman dan sejauh mana kiprah tersebut ke depannya tetap eksis dalam kontestasi politik di Polman.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ulama serta perkembangan pengaruh tersebut ke depannya dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman
3. Untuk mengetahui dan menganalisis respons masyarakat tentang peran ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman.

Hasil pemikiran yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna :

### **1 Kegunaan ilmiah**

- a. Untuk memahami dinamika ulama dan politik di Kabupaten Polman, khususnya dalam hal kontestasi politik.
- b. Untuk memahami signifikansi peran dan pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman.
- c. Menambah khasanah literatur ilmiah tentang studi ulama dan politik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Polman.

### **2 Kegunaan Praktis**

- a. Untuk membangun kesadaran tentang peran dan pengaruh besar ulama dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
- b. Untuk membangun kesadaran tentang kontestasi politik yang memerhatikan nilai etika politik Islam.
- c. Sebagai acuan akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan ulama dan politik.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Teori Peran dan Pengaruh Sosial*

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam lapangan ilmu sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori lintas orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, di mana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>27</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role perfomance*).<sup>28</sup> Peran adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan

---

<sup>27</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 215.

<sup>28</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Aplikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.3.

(status), yaitu apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peran.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya: sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.<sup>29</sup> Ahli ilmu sosial tersebut di atas memberikan pengertian makna kata dari peranan, artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa, atau kumpulan pola tindakan tertentu yang diwujudkan seseorang dalam kerangka struktur sosial tertentu.<sup>30</sup>

Peran merupakan aspek yang dinamis dari status atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi orang tersebut dalam interaksi sosial masyarakat. *Social-position* atau posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam suatu organisasi masyarakat. Posisi dan tempat inilah yang meniscayakan seseorang menjalankan peranannya dalam masyarakat.<sup>31</sup> Teori peran memberi dua ekspektasi, yaitu; harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran dan harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.<sup>32</sup> Kedua harapan

---

<sup>29</sup>Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Polman: Gerbang Visual, 2018), h. 29.

<sup>30</sup>R.K.Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: Press Co inc, 1992), h.65.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press,1993), h.220-221.

<sup>32</sup>David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press,1991), h.41.

tersebut berjaln kelindan satu sama lain, sehingga antara subjek pemegang peran dan masyarakat selaku objek sasaran peranan terjadi hubungan timbal balik yang seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Sarlito Wirawan mengutip Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran menjadi empat; orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, prilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam prilaku, dan kaitan antara orang dan prilaku. Orang yang berperan adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial yang terdiri atas aktot atau pelaku dan target atau sasaran. Aktor maupun target bisa berupa individu maupun kumpulan individu (kelompok). Prilaku dalam peran terdiri atas harapan tentang peran, norma yang mengatur prilaku peran, wujud prilaku dalam peran, serta penilaian dan sanksi. Kedudukan dan prilaku orang dalam peran dipengaruhi oleh tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang aktor dalam posisi tertentu, yaitu; sifat-siat yang dimiliki bersama, prilaku yang sama, dan reaksi orang terhadap mereka (aktor). Kaitan orang dan prilaku menurut Biddle dan Thomas terdiri atas criteria kesamaan, derajat saling ketergantungan, dan gabungan antara keduanya<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Edy Subardono, *Teori Peran ...*, h. 4.

<sup>34</sup>Lihat Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial...*, h. 215-230.

Biddle memperkenalkan lima jenis peran, meliputi:

1. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional). Jenis peran ini memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil.
2. *Symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksional yang simbolis) Jenis ini memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan menginterpretasikan sebuah tingkah laku.
3. *Structural role theory* (teori peran struktural). Jenis ini memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditujukan pada kedudukan sosial yang lain.
4. *Organisation role theory* (teori peran organisasi). Jenis ini memfokuskan kepada peran yang dihubungkan dengan kedudukan sosial pada sistem sosial yang hirarkis, yang berorientasi pada tugas dan belum direncanakan.
5. *Cognitive role theory* (teori peran kognitif) Jenis ini difokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran.<sup>35</sup>

Pengertian dan aplikasi teori peran dalam penelitian ini merujuk pada figur *annangguu* selaku aktor sosial yang memiliki kedudukan sosial yang stabil dalam sistem sosial masyarakat Polman. *Annangguu* memiliki peran secara fungsional dan simbolik yang memengaruhi masyarakat sebagai sasaran dalam peran tersebut. *Annangguru* dengan kedudukannya terikat oleh norma kultural keagamaan

---

<sup>35</sup>Aco Musaddad, *Annangguru....*, h, 31.



yang dianggap sakral oleh masyarakat, yang dengan dasar ini masyarakat memberikan penilaian atas sakralitas tersebut dan akhirnya berimplikasi keberikutan masyarakat atas pilihan dan tingkah laku yang ditampilkan baik secara fungsional maupun simbolik oleh *annnagguru*.

Kajian tentang teori pengaruh dalam kajian psikologi sosial terdiri atas konformitas dan *compliance* (pemenuhan). Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Norma sosial merupakan aturan yang mengatur bagaimana individu berperilaku.<sup>36</sup> Misalnya dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai tradisi, maka individu yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut akan mengikuti norma sosial yang berlaku dengan menjadikan aktor tertentu yang memiliki kedudukan dalam peran sosial sebagai rujukan. Pada masyarakat transisi atau *luminal*, di mana norma tradisional telah bersaing dengan norma modern, maka konformitas individu yang terjadi akan lebih fleksibel. Secara sederhana konformitas dapat juga diartikan dimana seseorang melakukan perilaku tertentu disebabkan orang lain melakukan hal tersebut.<sup>37</sup>

Konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Konformitas merupakan suatu bentuk sikap penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat/kelompok karena didorong untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang sudah ada. Konformitas berarti keselarasan, kesesuaian perilaku individu-individu anggota masyarakat dengan harapan-harapan masyarakatnya sejalan dengan kecenderungan manusia dalam kehidupan kelompok yang membentuk norma sosial. Konformitas sosial adalah

<sup>36</sup>Sarlito W.Sarwono dan A.Eko Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba, 2009), h.55.

<sup>37</sup>David O.Sears et.al, *Psikologi Sosial Edisi Kelima Jilid II*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h.76.

pilihan sikap untuk ikut apakah karena tekanan atau karena keberikutan secara sukarela baik karena konsensus maupun karena kekaguman pada satu tokoh sebagai figur sentral dalam suatu komunitas.

Bentuk-bentuk konformitas tergantung pada siapa dan bagaimana pengaruh sosial itu dilakukan. Ada tiga tipe konformitas, yaitu;

1. Konformitas membabi-buta. Jenis konformitas ini diwarnai sikap masa bodoh dalam arti meniru dan mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman atau penghayatan serta tanpa pertimbangan pemikiran dan perasaan.
2. Konformitas identifikasi. Jenis konformitas ini ditandai dengan kharisma dari orang yang berpengaruh, sehingga seseorang yang dipengaruhi menjadi percaya dan mengakui serta menerima tanpa ada tendensi *reward* (imbalan) maupun *punishment* (sanksi).
3. Konformitas internalisasi. Jenis konformitas ini ditandai sikap kebebasan untuk menentukan konformitas atau non konformitas dengan didasarkan pertimbangan pemikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertindak laku.<sup>38</sup>

Menurut Barnon dan Byrne, ada tiga faktor yang memengaruhi konformitas, yaitu:

1. Kohesivitas, yaitu derajat ketertarikan yang dirasakan oleh individu terhadap suatu kelompok. Semakin tinggi tingkat kohesivitas suatu kelompok, maka tekanan untuk melakukan konformitas semakin bertambah.

---

<sup>38</sup>Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h.72-73.

2. Ukuran kelompok, konformitas meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok, dengan demikian semakin besar suatu kelompok, maka semakin besar pula tingkat konformitas yang terjadi dalam kelompok tersebut.
3. Norma sosial deskriptif, yaitu norma yang mendeskripsikan mengenai apa yang sebagian besar orang lakukan dalam situasi tertentu. Norma-norma ini memengaruhi tingkah laku dengan cara memberi tahu mengenai apa yang umumnya efektif atau adaptif pada suatu situasi, selanjutnya menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang diterima dan apa yang tidak diterima pada suatu situasi tertentu.<sup>39</sup>

Selain konformitas, *compliance* merupakan bagian dari teori pengaruh sosial yaitu cara untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. *Compliance* memiliki enam prinsip dasar, yaitu:

1. Pertemanan atau rasa suka, yaitu kecenderungan untuk lebih memenuhi permintaan dari orang yang disukai daripada orang yang belum dikenal atau orang yang dibenci.
2. Komitmen dan konsisten, yaitu kecenderungan untuk lebih mudah memenuhi permintaan dari hal-hal yang konsisten.
3. Kelangkaan, yaitu kecenderungan untuk memenuhi permintaan karena menghargai keberadaan sesuatu yang langka.
4. Timbal balik, yaitu kecenderungan memenuhi permintaan seseorang yang pernah memberikan bantuan.

---

<sup>39</sup>Lihat Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 56-

5. Validitas sosial, yaitu kecenderungan untuk memenuhi permintaan dengan cara bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain.
6. Otoritas, yaitu kecenderungan melaksanakan permintaan dari pihak yang memiliki kekuasaan (baik kekuasaan yang bersifat kultural maupun kekuasaan yang bersifat struktural).<sup>40</sup>

Konformitas dan *compliance* dalam penelitian ini merujuk pada konformitas identifikasi, dimana *annangguru* sebagai figur sentral dalam posisi sosial yang memiliki kharisma untuk memengaruhi kecenderungan pilihan masyarakat karena adanya ikatan norma sosial yang mensakralkan posisi seorang *annangguru*. *Compliance* masyarakat pada *annangguru* didasarkan pada otoritas atau kekuasaan kultural yang dimiliki oleh seorang *annangguru* dalam memengaruhi masyarakat sebagai audiens.

### **B. Teori Prilaku dan Kontestasi Politik**

Menurut pandangan kaum behaviorialis, untuk memahami segala aspek yang berkenaan dengan kehidupan politik sangat bergantung pada pemahaman mengenai prilaku dari aktor-aktor politik.<sup>41</sup> Prilaku politik merupakan tindakan atau kegiatan yang berhubungan pada proses penentuan dan implementasi sebuah keputusan politik. Pemerintah dan masyarakat adalah dua agen yang bermain dan berperan dalam prilaku politik. Dua variabel yang berperan dalam prilaku politik adalah individu dan struktur politik.<sup>42</sup> Ada tiga hal yang memengaruhi bentuk dan

<sup>40</sup>Sarlito W. Sarwono dan A. Eko Meinarno, *Psikologi Sosial...*, h. 89.

<sup>41</sup>Yoyoh Rohaniah dan Elfridza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Imrans Publishing, 2015), h. 42.

<sup>42</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu-ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 167-168

tingkat partisipasi politik dalam tinjauan perilaku politik, yaitu partisipasi, orientasi dan intensitas dari partisipasi tersebut.

Partisipasi politik yang dipilih oleh seorang individu sangat bergantung pada tingkat kapasitas dan kecakapan yang dimiliki individu oleh individu tersebut. Diantaranya berkenaan dengan memikul tanggung jawab, pengambilan keputusan, kemampuan dalam hal memilih dan kemampuan kesadaran politik yang kritis, serta memiliki orientasi pada pelayanan terhadap masyarakat serta minat untuk memecahkan problematika sosialnya. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah menjadi motif psikologis untuk berpartisipasi dalam kancah politik.<sup>43</sup>

Masyarakat sebagai aktor, perilaku politiknya sangat memengaruhi arah dan jalannya pemerintahan melalui para politisi yang berkontestasi memperebutkan posisi dalam dunia pemerintahan. Masyarakat dan pemerintah sebagai dua aktor penting berjalinkan dan saling membutuhkan dalam sebuah sinergitas dinamika politik yang harmonis. Masyarakat sebagai pemilih menentukan legitimasi pemerintahan yang sah secara demokratis. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan yang menjalankan roda kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Ada tiga faktor yang memengaruhi perilaku politik, yaitu faktor sosiologis, psikologis dan faktor pertimbangan pragmatis. Karakteristik sosial serta pengelompokannya memengaruhi secara cukup signifikan bagi seseorang dalam menentukan perilaku politiknya. Variabel agama termasuk dalam karakteristik dalam pengelompokan ini. Agama sebagaimana karakteristik sosial lainnya semisal suku,

---

<sup>43</sup>Utsman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Inter media, 2000), h.99-100

lapisan sosial dan lainnya menjadi pertimbangan utama dalam preferensi politik seseorang yang secara langsung akan sangat memengaruhi perilaku politiknya. Kultur dan karakteristik sosial juga menjadi sangat penting. Perilaku politik dalam pemilihan misalnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengalaman dan preferensi personal, Perilaku memilih merupakan suatu pengalaman kelompok, di mana seseorang akan cenderung mengikuti arah predisposisi politik dari lingkungan sosial sebagai tempat tinggalnya.<sup>44</sup> Akhirnya, aspek-aspek sosiologis utamanya berkenaan dengan variabel-variabel utama yang membentuk kultur suatu masyarakat akan sangat menentukan bagaimana seseorang menentukan perilaku politiknya. Masyarakat dengan kultur keagamaan yang kuat akan sangat memengaruhi perilaku politiknya dengan menjadikan ulama sebagai patron.

Faktor psikologis yang sangat menentukan perilaku politik adalah persepsi, penilaian dan identifikasi. Konsep sosialisasi merupakan konsep utama dalam menentukan sikap dan perilaku politik. Oleh karena itu, sosialisasilah yang sesungguhnya sangat menentukan perilaku politik seseorang. Persepsi, penilaian dan identifikasi akan menemukan stimulusnya melalui proses sosialisasi tersebut. Sosialisasi menjadi medium yang mempertemukan antara pemilih dan politisi dan bagaimana politisi memainkan strategi dengan memainkan psikologi konstituen dengan membangun opini yang pada akhirnya membentuk persepsi dan penilaian dan berujung pada sebuah identifikasi.

Faktor pertimbangan pragmatis atau biasa disebut juga pendekatan pilihan rasional menandai turunnya pengaruh struktur kelas sosial dan kultur serta agama

---

<sup>44</sup>RR. Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. XII, Nomor 1 tahun 2015, h. 119.

dalam politik. Pertimbangan rasional-pragmatis yang mendorong perilaku memilih menemukan penjelasannya selain sekadar variabel psikologis dan sosiologis. Pertimbangan ini yang semakin mencuat dan mengemukakan faktor ekonomi, preferensi pribadi dan hal-hal lain. Terdapat pergeseran dalam studi perilaku memilih ke model yang lebih menekankan individu warga negara sebagai aktor yang relatif mandiri dari partai dan struktur kolektif serta ikatan kesetiaan lainnya.<sup>45</sup> Independensi individu membuat penentuan perilaku politiknya lebih ke arah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasionalitas pribadi.

Konsep kontestasi diambil dari kata “kontes” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlombaan atau arena perebutan sesuatu, di mana mereka yang memenangkan kontes berhak mengenakan mahkota atau disebut juara. Kontestasi merujuk pada adanya persaingan atau perlombaan untuk memperoleh posisi sebagai pemenang atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan.<sup>46</sup> Dalam konteks politik, kontestasi adalah persaingan untuk merebut kursi kekuasaan baik dalam ranah legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) serta eksekutif (presiden dan kepala daerah). Sebagaimana definisi politik menurut Lord Acton, bahwa politik adalah tentang “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.<sup>47</sup>

Kontestasi politik adalah persaingan politik dalam rangka perebutan kekuasaan dengan saling berebut pengaruh di tengah masyarakat sebagai subjek pemilih. Dengan demikian, kontestasi politik hanya dimungkinkan terjadi jika sistem politik menganut sistem demokrasi. Kontestasi politik merupakan konsekuensi logis

---

<sup>45</sup>RR. Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, “Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik...*, h. 120.

<sup>46</sup>Cosmas Gatot Haryono, “Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga”, dalam *Jurnal Scriptura* Volume 7 Nomor 1 Juli 2017, h. 30-31.

<sup>47</sup>Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Bgraf, 2000), h.1.

dari sebuah proses demokrasi. Jika proses demokrasi yang terjadi adalah proses demokrasi yang sehat, maka kontestasi politik akan terjadi secara kompetitif dan sehat pula. Sebaliknya, jika proses demokrasi berlangsung dengan penuh kecurangan, maka dinamika kontestasi politik yang terjadi menunjukkan proses *pseudo* demokrasi (demokrasi semu). Jika makna kontestasi politik diperluas, maka maknanya juga mencakup persaingan antar elit atau kelompok elit dalam penentuan kebijakan strategis berupa regulasi maupun kebijakan lainnya pada tingkat legislatif maupun eksekutif.

Diskursus politik sebagai entitas kekuasaan sebagaimana yang dipahami oleh subyek kekuasaan itu, yakni rakyat, yang mendapatkan posisi sebagai aktor. Menurut pandangan Apter, pemahaman rakyat itu tergantung pada apa yang mereka saksikan pada hari ini, dan karena itu pemahaman dimaksud tergantung di mana posisinya dalam hubungan perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang siklus kehidupannya. Karena itu ketika rakyat disadarkan tentang kehadiran politik sebagai sebuah entitas, lalu menjadi penting bagi para-agen untuk dapat mengubah kesempatan membangun kondisi untuk bisa masuk ke dalam sistem, atau sekurang-kurangnya mengubah suatu keadaan negatif menjadi hasil positif. Itulah sebabnya, sebuah tindakan politik itu pada dasarnya rasional; dan, sesungguhnya agak sulit membayangkan adanya rasionalitas tindakan yang dikaitkan dengan kepentingan kolektif. Pasalnya, masyarakat itu pada dasarnya tidak relevan dikenakan status rasional, karena yang rasional adalah orang-orang atau aktor yang melakukan tindakan. Padahal di sisi lain, tidak mungkin tindakan politik dapat dilakukan tanpa melibatkan orang lainnya, termasuk mereka yang sebenarnya hanya berstatus sebagai pembonceng (*free riders*) yang mendapatkan keuntungan dari adanya tindakan politik orang lain namun yang



bersangkutan tidak memberikan kontribusi yang berarti atas kemunculan tindakan tersebut.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, demokrasi adalah persaingan antar elit melalui kendaraan partai politik dan rakyat sebagai subjek, pemilihlah yang akan menentukan pilihannya. Dengan demikian, kontestasi politik adalah upaya merebut hati dan simpati masyarakat untuk memilih mereka, yang dengannya maka kemenangan akan diraih. Aspek paling penting dalam sebuah kontestasi politik yang ideal adalah sejauh mana kontestan dapat ‘merebut hati’ rakyat melalui program kerja yang ditawarkan. Masyarakat berada dalam posisi yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Dengan demikian, kemenangan kontestan merupakan fungsi dari kedekatan dan keberpihakan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Setiap kontestan berusaha menjadi yang terbaik di hadapan rakyat. Kenyataan ini semakin meningkatkan udara persaingan yang ada diantara para kontestan yang terlibat dalam Pemilu. Dalam hal ini strategi untuk memenangkan kontestasi politik menjadi hal penting yang menjadi unsur utama dalam menentukan kemenangan dalam kontestasi.

Dinamika kontestasi politik muncul ketika aksi dan reaksi muncul dalam persaingan. Meskipun pada kenyataannya terdapat bentuk koalisi, dalam hal ini koalisi dilihat sebagai struktur yang tidak tetap dan sangat stabil. Artinya, ketika kepentingan dan tujuan politik sudah tidak sama lagi, koalisi tersebut biasanya pecah. Dalam politik perlu dilihat bahwa kontestasi adalah sesuatu yang wajar. Setiap aktor politik dituntut untuk menerima normalnya persaingan didalam dunia politik. Dalam iklim demokrasi, persaingan tidak dapat dielakkan. Menghilangkan

---

<sup>48</sup>Mukhtar Sarman, *Banalitas Konetstasi Politik: Refleksi Pemilu Legislatif di Kalimantan Selatan 2014* (Banjarmasin: MSAP UNLAM, 2014), h. 2-3.

persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi system otoriternya, absolut, dan meniadakan alternatif. Kalau sudah begitu, kepada masyarakat hanya disodorkan satu kebenaran tunggal yang tidak dapat diganggu gugat.

Persaingan politik untuk tingkatan tertentu, merupakan suatu keadaan yang sehat demi kemajuan, sejauh persaingan tersebut diatur oleh aturan main yang terlegitimasi. Artinya aturan main tersebut mendapatkan basis pengakuan yuridis dan kultural dari masyarakat yang bersangkutan. Kontestasi politik juga harus dimaknai sebagai pembelajaran untuk mendorong semua pihak yang terlibat terus-menerus dalam proses pembelajaran politik. Dengan adanya kompetisi masing-masing pihak akan saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong pihak yang berkompetisi untuk terus berpikir supaya selalu memahami persoalan actual yang ada di masyarakat.<sup>49</sup>

Kontestasi politik pada tingkat lokal merupakan persaingan antar *local strongmen* yang merupakan elit-elit lokal di suatu daerah. *Local strongmen* tersebut bisa terdiri dari berbagai latar belakang, bangsawan lokal, birokrat, pengusaha, akademisi, hingga ulama/tokoh agama. *Local Strongmen* adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, *local strongmen* merupakan sebuah terminologi yang identik dengan elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa, begitupun dengan *local strongmen*.

---

<sup>49</sup>Haris Maulana, *Kontestasi Politik dan Demokratisasi Pasca Otonomi Daerah* (Bandung: Almira, 2011), h. 47-48.

Keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan.<sup>50</sup>

Di dalam proses kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat dalam pemilu, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan kontestasi adalah mereka yang memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kontestan yang hendak mengikuti kontestasi adalah modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Kontestan yang memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar modalitas yang mampu diakulasi dari tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai pemenang. Peluang terpilihnya seseorang dalam sebuah kontestasi politik merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.<sup>51</sup> Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.<sup>52</sup>

Pada pertarungan/kompetisi setiap kontestan, modal (kapital) berperan penting dalam mempertahankan eksistensi kontestan dan bahkan memberikan kesempatan dalam merebut kemenangan atau mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya. Menurut Pierre Bourdieu ada empat tipe modal yang dimaksud, yaitu

---

<sup>50</sup>Nur Aliyah Zainal dan Ibnu Khaldun, “*Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi atas Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muhammad Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015, dalam Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 1 tahun 2017)*”, h. 49.

<sup>51</sup>Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas dalam Kontestasi Politik: Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximillian Lomban Pada Pemilu di Kota Bitung, Sulawesi Utara Tahun 2010*. Tesis Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012.h. 15-16.

<sup>52</sup>Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Langsung* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h.89.

modal politik, modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial.<sup>53</sup> Maksimalisasi dalam memanfaatkan akumulasi modal-modal tersebutlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam sebuah kontestasi politik.

Modal politik merupakan pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu. Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.<sup>54</sup>

Ulama merupakan bagian dari elit *localstrongmen* yang memiliki modal yang cukup kuat dalam kontestasi politik. Sebagai seorang elit agama, seorang ulama setidaknya memiliki modal kultural dan modal simbolik. Simbolitas keagamaan jika

---

<sup>53</sup>Secara lengkap mengenai konsep modal menurut Pierre Bourdieu lihat Pierre Bourdieu, *the Field on Cultural Production, Essays on Art and Literature* (Cambridge: Polity Press 1993).

<sup>54</sup>Stella Maria Ignasia Pantouw. *Modalitas dalam Kontestasi...* h.17-18.

dikelola dengan baik dengan memanfaatkan kharisma serta kekuatan simbol religiusitas akan lebih mudah memengaruhi opini dan pilihan publik pada masyarakat tradisional. Secara kultural, seorang ulama biasanya dekat dengan umat serta menjadi tempat rujukan dalam berbagai persoalan kehidupan akan sangat membantu terbangunnya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Tingginya tingkat kepercayaan ini tentu saja akan berbanding lurus dengan keterpilihan seorang ulama dalam sebuah kontestasi politik atau setidaknya kontestan pemilu maupun pilkada yang mendapat dukungan secara langsung dari seorang ulama dan dukungan ini memberikan pengaruh elektoral atas keterpilihan kontestan tersebut.

### ***C. Teori Relasi Agama dan Politik***

Membincang relasi agama dan politik adalah proses resiprokal antara yang satu dengan lainnya. Kedua entitas tersebut (agama dan politik) berjaln-kelindan dalam proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan kaitannya dengan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi negara. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan para pemuka agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampuran unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler yakni persoalan

agama kemudian termarginalkan dan tersubordinasikan, hingga padatataran praktis, agama mengalami reduksi dalam pengaruhnya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menguatnya negara dengan menyingkirkan adanya peran agama malah justru menjadikan demoralisasi masyarakat yang justru akan terjadi secara massif. Konsekuensinya adalah adanya depolitisasi agama justru akan menimbulkan anarki, sedangkan apabila terjadi gejala politisasi agama justru menciptakan adanya hipokrisi dan vigilantisme (tindakan main hakim sendiri).<sup>55</sup>

Berdasarkan konteks kehidupan kenegaraan, hubungan agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut *The Encyclopedia of Religion* adalah sebuah ideologi, di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.<sup>56</sup>

Berkenaan dengan konteks orientasi warga negara dalam kehidupan bernegara secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, agama sebagai ideologi, orientasi ini didukung oleh mereka yang ingin menjadikan agama sebagai ideologi negara yang manifestasinya berupa pelaksanaan ajaran agama (syariah dalam konteks Islam) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi

---

<sup>55</sup>Lihat Wasisto Raharjo Jati, "Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama" dalam Jurnal *Walisongo* Volume XXII Nomor 1 Mei 2014, h. 134.

<sup>56</sup>Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" dalam Jurnal *Ahkam* Volume XIII Nomor 2 Juli 2013, h.248.

kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga hal ini akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita mereka. *Kedua*, agama sebagai sumber nilai etika-moral, orientasi ini didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etikamoral agama (religio-ethics), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal. Di satu sisi orientasi ini membawa hal yang positif, karena dapat menghilangkan ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok-kelompok lain serta sangat kondusif bagi terwujudnya integrasi bangsa yang mejemuk. *Ketiga*, agama sebagai sub ideology atau sumber ideologi. Orientasi ketiga tersebut lebih realistis dan moderat, karena meski orientasi ini berupaya melaksanakan etika-moral serta hukum agama atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama masih tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan fleksibel, maka agama dituntut untuk memberikan kontribusi dalam penjabaran konsep-konsep operasional di pelbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal inilah nilai-nilai dan norma-norma agama menjadi input dan legitimasi bagi pembentukan dan penguatan etika-moral serta sistem nasional dan kebijakan publik. Di samping itu, orientasi ini mendukung pluralisme

dan toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan bangsa ini, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sejajar<sup>57</sup>

Pancasila dalam pandangan Kuntowijoyo mengenai posisinya dalam konteks kenegaraan serta relasinya dengan agama, bahwa Pancasila selama ini lebih berfungsi sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia secara politis, tetapi belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial, dan budaya, karena Pancasila lebih dipahami sebagai mitos. Di samping itu menurut Kuntowijoyo, perlu mengisi ideologi dengan agama, karena ideologi tanpa agama adalah kekacauan. Bahkan Pancasila sebagai ideologi adalah “objektifikasi” dari agama-agama, sehingga pancasila memperoleh dukungan ganda, yaitu ideologi yang mempunyai “*categorical imperative*”, dan melalui proses “internalisasi” Pancasila bisa masuk ke dalam agama.<sup>58</sup> Pada konteks inilah, Pancasila menjadi jalan tengah dalam relasi agama dan negara di Indonesia, agama tidak disubordinasi dalam ideologi negara, namun tidak pula menjadi sumber yang dominan.

Posisi agama (Islam) dan Pancasila sebagai ideologi negara tidaklah layak untuk dipertentangkan secara *vis a vis* apalagi dengan mempertanyakan posisi agama (Islam) dihadapan pancasila, apakah sejajar atau subordinasi. Pancasila bukanlah agama, namun –sebagaimana dikatakan oleh Kuntowijoyo- Pancasila merupakan objektifikasi dari agama-agama, terutama Islam, sehingga posisi Islam dan pancasila tidak layak untuk dipertentangkan. Pancasila merupakan karakteristik khas dalam model sistem politik sebuah bangsa muslim terbesar seperti Indonesia. Dan dengan Pancasila pun, Islam tetap akan selalu mewarnai corak sosio-kultural dan politik

---

<sup>57</sup>Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama dan Negara...”, h. 251.

<sup>58</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Cet, I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 173.



bangsa Indonesia, meski bukan secara simbolik, tapi lebih pada tataran nilai universal dari Islam yang bersesuaian dengan kultur dan tradisi masyarakat Indonesia. Pilihan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tak akan pernah menggerus peran Islam dan umat Islam, malah akan semakin menempatkan peran Islam dan umat Islam dalam peran yang proporsional sesuai dengan konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk. Dan mengutip pernyataan M. Rusli Karim, dengan berideologikan pancasila, maka akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang “sosialistis-religius”.<sup>59</sup>

Relasi agama dan negara dalam penelitian ini merujuk pada konteks Pancasila sebagai ideologi Negara yang tidak mensubordinasi dan memarginalkan peran-peran agama. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, tokoh-tokoh agama dilibatkan secara penuh sebagai perumus dan pendiri bangsa. Oleh karena itu, dalam konteks politik kenegaraan Indonesia, peran-peran ulama menjadi penting dalam suatu proses kontestasi politik baik dalam arena suksesi dan penentuan kebijakan publik pada tingkat local maupun nasional. Konteks politik kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh komponen bangsa, termasuk ulama sebagai komponen keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kultur politik di sebagian masyarakat Indonesia.

#### ***D. Teori Ulama dan Politik***

Di dalam masyarakat Islam, ulama merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada dinamika sosial masyarakat. Ulama menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat

---

<sup>59</sup>Sabara Nuruddin, “Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI” dalam Jurnal *Pappasang*. Volume I Nomor 1 tahun 2013 h. 12.

karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ulama juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Oleh karenanya, ulama kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis ulama, khususnya dalam aspek dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia.

Dalam Alquran, kata ulama disebutkan sebanyak dua kali, yaitu di QS Fatir/35 : 28 dan QS al - Syu'ara/26 : 197.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS 35:28)

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

Artinya: Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya (QS 26 : 197).

Ayat 28 QS Fatir mengandung pengertian bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kauniyah*. Sedangkan ayat 197 QS al-Syu'ara disebutkan pengakuan ulama Bani Israil tentang kebenaran

Alquran.<sup>60</sup> Berdasarkan kedua ayat tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan pengertian ulama tidak hanya mengacu pada pengetahuan agama melainkan pada ilmu-ilmu umum atau pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyah* maupun *Qur'anyah*. Ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah dan dengan ilmu yang dimilikinya mengantar manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, dan takut kepadaNya.<sup>61</sup>

Pandangan lain disampaikan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairy yang mengidentifikasi ulama sebagai mereka yang menguasai, mengamalkan, dan menyebarluaskan ilmu agama. Mereka itulah orang-orang yang menjaga tegaknya agama Islam dan menjadi petunjuk bagi manusia yang lainnya.<sup>62</sup> Pengertian kedua ini merupakan pengertian ulama dalam artian khusus. Dalam konteks budaya Indonesia, pengertian ulama merujuk pada pengertian khusus tersebut. Pada setiap komunitas Islam local di Indonesia, ulama memiliki beberapa sebutan, seperti Ulama di Jawa, *ajengan* di Sunda, *teungku* di Aceh, tuan guru di Lombok, *anregurutta* di Bugis, dan *annangguru* di Mandar.

Secara sosiologis, seorang ulama memiliki peran dan tanggung jawab sebagai dai (penyiar agama Islam), pemimpin ruhani, serta sebagai Pembina dan penuntun umat. Sebagai dai seorang ulama berkewajiban menyampaikan ajaran kebaikan yang bersumber dari agama Islam kepada masyarakat luas. Sebagai pemimpin ruhani, ulama memimpin dan membimbing umat agar mereka benar dalam menghayati agamanya, memberikan bimbingan ruhaniah yang mengantarkan umat menemukan jalan kebbaikannya. Ulama sebagai Pembina dan penuntun umat berkewajiban

<sup>60</sup>Lihat Abdul Kadir Ahmad. *Ulama Bugis* (Jakarta: Indobis, 2008),h.113-114.

<sup>61</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan,2004), h.356.

<sup>62</sup>Abdul Kadir Ahmad. *Ulama..*,h.117.

membina umat tidak hanya menyangkut urusan keagamaan, lebih dari itu, ulama berkewajiban secara sosiologis memberikan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada umat.

Masyarakat tradisional menurut Karel A. Steenbrink memandang seseorang sebagai ulama (ulama) karena diterima oleh masyarakat sebagai ulama, orang datang untuk minta nasehat kepadanya, atau mengirimkan anaknya supaya belajar kepadanya. Dengan demikian, untuk menjadi ulama tidak ada kriteria formal seperti ijazah.<sup>63</sup> Secara kultural, untuk memenuhi kriteria sebagai seorang ulama biasanya disebabkan faktor; pengetahuan, kesalehan, jumlah murid, dan keturunan. Tugas sosial ulama bersifat normatif sebagai konsekuensi pewaris Nabi. Menurut Harry J. Benda, tugas normatif seorang ulama adalah sebagai penasehat (*consellers*), hakim (*qadhi*), dan guru agama. Sedangkan menurut Hiroko Hirokoshi seorang ulama berperan sebagai pemangku masjid atau madrasah, pengajar dan pendidik, serta ahli dalam bidang hukum Islam.<sup>64</sup>

Hal yang paling menonjol dari seorang ulama dalam menjalankan peran-peran sosial keagamaan di tengah masyarakat adalah kharisma yang dimiliki seorang ulama yang dengannya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakatnya. Menurut Martin van Brunnessen salah satu kunci dari Islam tradisional adalah kepribadian ulama (ulama) yang kharismatik. Sikap kharismatik ditandai dengan sikap hormat, takzim, dan kepatuhan mutlak pada ulama. Kharisma ulama juga didasarkan pada kekuatan spiritual dan kemampuan memberi berkah karena hubungannya dengan alam gaib.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Lihat Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta :LP3ES,1994), h.109.

<sup>64</sup>Abdul Kadir Ahmad. *Ulama...*,h.126.

<sup>65</sup>Martin van Brunnessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), h.18-19.

Berkaitan hubungannya dengan kharisma ulama, Achmad Zainal Arifin mengurai bagaimana mekanisme kharisma yang melekat pada ulama di pesantren bekerja. Menurutnya, kharisma harus dimaknai secara sosiologis, dimana kharisma erat hubungannya dengan otoritas atau Weber menyebutnya dengan *charismatic authority*, kharisma semacam ini, bagi individu yang memilikinya mampu memengaruhi dan memerintah atau bahkan mendominasi, tanpa adanya perlawanan. Kharisma semacam ini digerakan secara organik oleh semangat agama.<sup>66</sup>

Peran dominan ulama dalam proses pembinaan keagamaan kemudian membentuk sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur yang tidak terpisahkan, saling mengandaikan, saling membutuhkan dan membangun suatu keseluruhan sehingga sampai pada keseimbangan yang cenderung untuk mempertahankan diri. Maka analisa teori fungsional Parson sangat relevan dengan menggunakan konsep relasional atau peranan, sebagaimana diuraikan oleh K. J. Veeger yang mengkaji teori fungsionalisme Talcot Parson dengan mengintrodusir ke dalam dua ciri khas, yaitu: Konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan sistem sosial. Serta konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial. Maka dalam analisis Sosiologis, menurut Weber sebagai kacamata fakta sosial, kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada personal leadership. Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi umatnya (*client*) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Kompetensi Ulama dalam bidang agama

---

<sup>66</sup>Achmad Zainal Arifin, *Charisma and Rationalisation in a Modernising Pesantren: Changing Values in Traditional Islamic Education in Java* (Dissertati: The University of Western Sydney, 2013), h. 6

menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Ulama senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Bahkan dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, Ulama mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.<sup>67</sup>

Sebutan ulama merupakan suatu *achieved* status yang diusahakan oleh seseorang melalui proses yang panjang. Status tersebut diperoleh tidak hanya karena penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam tetapi juga karena penerapan ajaran-ajaran agama Islam dalam sikap dan perilaku keseharian. Selain itu, bahkan yang terpenting adalah bahwa status ulama itu dilegitimasi oleh pengakuan masyarakat atas penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam dan kesalehan religius yang bersangkutan. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, ulama dikategorikan sebagai elit tradisional yang telah dan sedang memainkan peranan penting dan strategis. Secara historis-sosiologis, ulama di Indonesia telah memainkan berbagai peranan : politik, social kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan tentu saja yang terpenting, keagamaan.<sup>68</sup>

Secara historis, ulama menjadi bagian sosok agamawan yang posisinya cukup dipentingkan dalam konteks berbagai pertimbangan-pertimbangan menyangkut kebijakan, apalagi kebijakan yang melibatkan masyarakat, terutama bila berhubungan dengan kebutuhan gerakan-gerakan maupun mobilisasi. Maka ulama dinilai dan ditempatkan sebagai penentu maju dan tidaknya sebuah peradaban. Oleh sebab itu, kemajuan selalu identik dengan perubahan, kemudian muncul tuduhan apakah ulamanya terlebih dahulu yang harus berubah ataukah masyarakatnya.

---

Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam Jurnal *Fikrah* Volume 3 Nomor 1 Juni 2015, h. 160-161.

<sup>68</sup>Fatimah Zuhrah, "Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat", dalam Jurnal *Hikmah* Volume 16 Nomor 1 tahun 2016, h. 92.

Tudingan tersebut kemudian ditempatkan dalam berbagai kepentingan ketika ulama selalu ditempatkan sebagai penjaga tradisi yang harus stagnan dan tidak dinamis, sehingga benturan-benturan perubahan sosial harus dihadapi atas nama agama. Atau sebaliknya, ulamalah yang harus berada di garda paling depan untuk menyesuaikan dengan berbagai pergolakan perubahan akibat tuntutan zaman.<sup>69</sup>

Ulama menjadi aktor utama dari segala konsepsi sosial agamanya sekaligus menjadi institusi yang menjadi penyebarannya, sehingga ulama memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa ulama beserta pengaruh di dalamnya menjadi pembentuk sistem dalam pola kehidupan masyarakatnya, selain itu juga dapat menjadi penentu budaya. Penghormatan dan pengagungan terhadap ulama merupakan tradisi yang diwarisi oleh masyarakat tradisional, sehingga kemudian muncul pembelaan-pembelaan yang luar biasa dari masyarakat terutama santri terhadap pengamanaan sang ulama. Sikap heroik tersebut sebagai bentuk bakti, khidmat dan loyalitas yang tinggi terhadap sang ulama.<sup>70</sup>

Pemikiran dan sikap-sikap sosial ulama memiliki tiga fungsi sekaligus. Pertama, fungsi pertahanan, yaitu mempertahankan tradisi sosial dan keagamaan berhadapan dengan tradisi baru yang datang dari luar dalam sintesisme yang saling menguatkan. Pemikiran sosial keagamaan memberi daya tahan luar biasa pada kehidupan masyarakat sebagaimana terekam dalam perjalanan sejarah ulama dan masyarakat sekitarnya. Kedua, fungsi sebagai daerah sangga, yaitu ketika suatu proses sosial yang berhadapan atau konflik tidak mencapai kompromi, maka ulama

---

<sup>69</sup>Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial...",h.163.

<sup>70</sup>Ali Usman, *Kyai Mengaji SantriAcungkan Jempol* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2013),h. 31.

selalu bisa menyediakan ruang sangga sehingga konflik atau perbedaan tidak mengarah kepada kerusakan yang lebih luas dan sikap ekstrim lainnya. Ketiga, fungsi dinamisasi, di mana pemikiran keagamaan ulama yang mendalam dan menyeluruh mampu menjadi gaya gerak yang dinamis sehingga selalu ada terobosan besar yang dilakukan para ulama dan masyarakatnya. Dinamisasi itu mungkin tidak terlalu nyata di permukaan, tetapi sangat dalam pengaruhnya terhadap cara berfikir dan ruang batin masyarakat.<sup>71</sup> Ketiga fungsi sosial ulama tersebut secara lebih artikulatif akan berpengaruh secara signifikan khususnya dalam masyarakat yang masih memosisikan agama sebagai variabel utama dalam kultur mereka.

Keterlibatan ulama dalam politik praktis, sampai sejauh ini memang terjadi tarik-menarik pendapat, antara kelompok yang mengabsahkan ulama berpolitik dengan kelompok yang menentang dengan keras ulama terlibat dalam politik. Kelompok pertama mengasumsikan bahwa ulama bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik seperti halnya warga Negara yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua mengkritik dengan keras, berdasarkan asumsi bahwa keterlibatan ulama dalam politik lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan yang bisa didapatkan. Hal ini berkaitan dengan realitas politik yang oleh banyak kalangan dianggap “kotor”. Sehingga ketika ulama dan pesantren terlibat dalam politik akan terseret kedalam dunia yang “kotor” pula.<sup>72</sup>

Munculnya perbedaan pendapat tentang bagaimana peran politik ulama di masyarakat, menjadi isu yang *debatable* dan tak akan pernah selesai. Masing-masing akan terus menerus memperkuat argumentasi kelompoknya. Meskipun terdapat

---

<sup>71</sup>Fatimah Zuhrah, “Pergeseran Peran dan Posisi Ulama...”, h.94.

<sup>72</sup>Sadi, “Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi” dalam Jurnal *Khazanah Pendidikan* Volume X Nomor 1 September 2016, h. 82.



kontroversi yang berkepanjangan mengenai keterlibatan ulama dalam Politik, sesungguhnya keterlibatan ulama dan pesantren tidak dapat dihindari. Intensitas ulama dan bentuk keterlibatan ulama dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dapat dilihat melalui keterlibatan ulama dalam momen-momen politik yang penting seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)<sup>73</sup>.

Beragamnya sikap politik Ulama yang terjadi menunjukkan bahwa keterlibatan Ulama dalam politik didorong oleh motif yang beragam. Motif disini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri Ulama sendiri, Pesantren atau bahkan dari luar, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Mencoba memahami motif keterlibatan Ulama dalam politik, bukanlah persoalan yang mudah. Disini kita akan memasuki ruang subjektif Ulama dan dorongan dirinya terlibat dalam politik.

Menurut Miftah Farid, Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor yang saling memengaruhi. Pertama, faktor posisi sosial kiai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi pada tahun 1987, misalnya menunjukkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz menunjukkan kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Meskipun secara politis kiai dikategorikan

---

<sup>73</sup>Sadi, "Kiai dan Politik..", h.84

sebagai sosok yang tidak punya pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan. Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kiai dipandang memiliki kemampuan “luar biasa” untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Ulama bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap “fatwa” politik yang terakhir untuk diikuti. Kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena “nasihat-nasihat” kiai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu.<sup>74</sup>

Terdapat beberapa perbedaan tipologi ulama, setidaknya terdapat empat perbedaan sikap politik yang terjadi di kalangan politisi Islam. Pertama, kelompok yang berpandangan pragmatis dan cenderung mengintegrasikan diri dalam kekuasaan serta meninggalkan label ideologisnya. Kedua, kelompok akomodatif yakni kelompok yang pemikiran dan sikap politiknya reseptif dan kompromis, namun tidak selalu berintegrasi. Ketiga, kelompok transformatif, yaitu kelompok yang memiliki komitmen perubahan yang mendasar tapi menolak cara-cara radikal. Keempat, kelompok prinsipalis adalah kelompok yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar Islam. Pendapat hampir sama disampaikan Ali Maschan Moesa, memberikan penggolongan tipologi ulama juga berdasar atas konstruksi ulama dalam

---

<sup>74</sup>Miftah Farid, “Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia” dalam Jurnal *Sosioteknologi* Edisi 11 Tahun 6 Agustus 2007, h. 238-239.

memaknai Nasionalisme, antara lain Ulama Fundamentalis, Ulama Moderat dan Ulama Pragmatis.<sup>75</sup>

Kehadiran ulama dalam politik praktis diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi moral force dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain adapula sebagian masyarakat yang mengharapkan peran ulama atau elit agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia. Sebagian ulama punya peran ganda sejak dulu itu sudah ada, lalu apakah saat ini peran ganda tersebut kemudian menjadi persoalan. Namun jika simbol ulama yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik dan kekuasaan itu menjadi persoalan, maka dalam politik ulama akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>76</sup>

Sebelum Indonesia merdeka, ulama mempunyai peran penting dalam perlawanan penjajahan terutama dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga ulama menjadi simbol solidaritas perjuangan ummat. Maka dalam konstelasi sejarah di Indonesia dapat dipahami bahwa ulama dengan peran sosial politiknya tidak dapat dipisahkan secara ekstrem. Pada perkembangannya di Indonesia, di mana adanya rekonstruksi politik telah menggeser garis perjuangan ulama seiring dengan perubahan dan perkembangan politik tanah air. Ulama pun mulai merambah wilayah politik dengan segala manuver politik dukung- mendukung

---

<sup>75</sup>Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.334.

<sup>76</sup>Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial...", h. 167

(legitimasi) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturahmi. Proses ini karena adanya simbiosis mutualisme untuk interest tertentu demi mendapatkan bagian dari kekuasaan atau minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung. Sementara elit politik akan mendapatkan legitimasi moral keagamaan dari ulama.

Sejatinya seorang ulama sah-sah saja jika berpolitik, namun politik praktis tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan menanamkan nilai-nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*.<sup>77</sup>

Seorang ulama mengemban amanah kekuatan kultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara etis-profetik mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran ulama akan tetap membumi di masyarakat. Pada akhirnya, moralitas ulama tidak menjadi sekedar bahasa isoterik belaka, tetapi dapat menjadi bahasa dan perjuangan politik demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian bagi umat. Walaupun pada akhirnya pembangunan, industrialisasi

---

<sup>77</sup> Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial...", h. 170.

dan modernisasi dijadikan alasan keterlibatan berbagai elemen termasuk di dalamnya peran ulama, namun menjaga tradisi dan nilai-nilai hidup harus tetap menjadi program yang beriringan, agar tidak mengakibatkan eksese negatif yang harus diterima masyarakat. Sebagaimana digaungkan Sunyoto Usman, bahwa semestinya gerakan keagamaan berorientasi pada pemeliharaan tradisi lokal dengan berpegang pada proses internalisasi ajaran agama dengan tidak harus menghancurkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam kultur lokal, agar tidak terjadi kebangkitan resistensi pada ajaran agama yang diintroduksi.<sup>78</sup>

Menurut Hasnatul Jannah menempatkan seputar dilema tarik-menarik antara peran ganda ulama dalam rentang kehidupan social politik dan agama, maka juga yang menjadi pertimbangan adalah sejarah kerangka teologis yang berakibat pada aksi sosial politik yang dihasilkannya. Maka jika ditelusuri lebih detail akan menghasilkan pemahaman, pertama: bahwa ada kecenderungan ulama akan terlibat dalam urusan politik untuk menempatkan urusan ummat dalam panggung politik praktis dengan asumsi, politik sebagai kendaraan paling praktis. Dalam hal ini biasanya ulama memahami betul konsekuensi yang diterima, yakni berkurangnya peran sosial keagamaannya, sehingga dalam mengantisipasinya dengan menempatkan sanak keluarganya untuk menangani peran tersebut, sehingga ulama bisa lebih fokus pada urusan politik, kedua: ulama yang memandang ringan dan lebih fleksibel pada urusan politik praktis, baginya politik hanyalah menjadi kepentingan sesaat dan menjadi batu loncatan dalam kepentingan pragmatis semata, ketiga: ulama yang konsisten untuk tidak bersinggungan dengan urusan politik.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Suyanto Usman, *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h. 225.

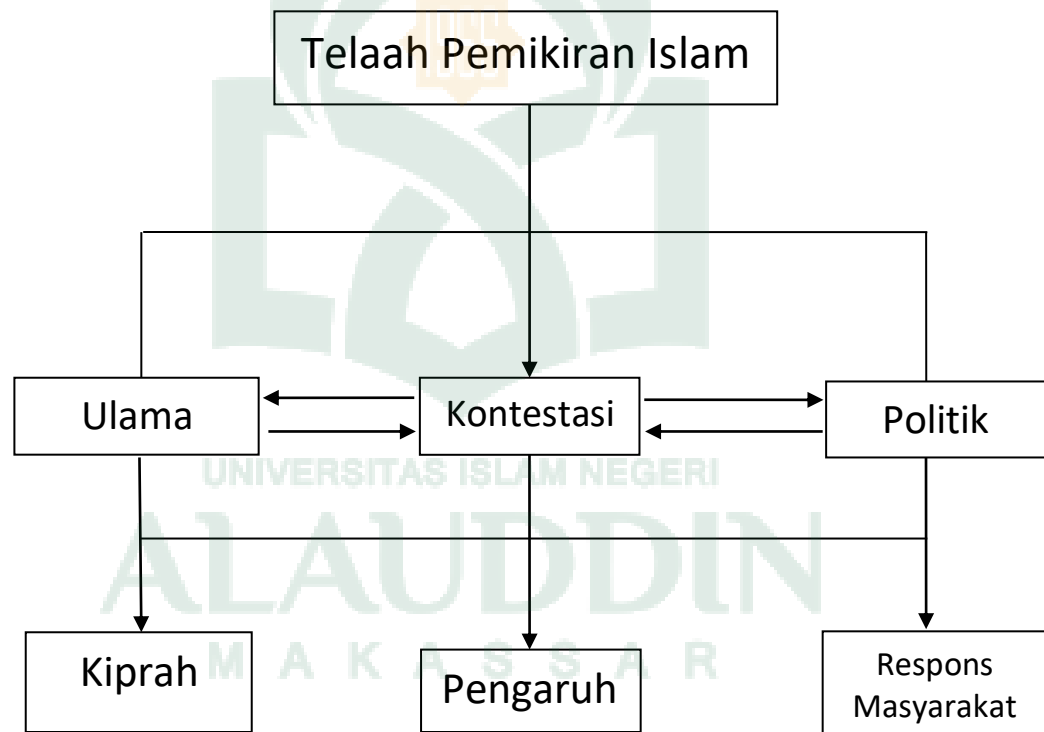
<sup>79</sup>Hasnatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial...", h. 172-173

Dalam konteks politik praktis sudah semestinya sosok ulama muncul dari sebuah pengembangan kepribadian yang terbuka dan memiliki komitmen yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai elemen seorang tokoh agama, sehingga mampu melampaui batas-batas primordialisme namun tetap berdiri di atas kapasitas intelektualnya. Ada juga perubahan tertentu yang kadang salah dan dikaitkan dengan modernisasi. Hal tersebut disebabkan tidak semua modernisasi menjadi seperti semodern barat, itu karena pola modernisasi berbeda-beda. Tradisi dapat berubah tanpa modernisasi, demikian juga modernisasi dapat terjadi tanpa perubahan mendasar dalam tradisi. Unsur-unsur tradisi yang tertanam dalam ketokohan ulama dan kantong-kantong kebudayaan dapat dipertahankan dalam masyarakat modernisasi, karena unsur-unsur tradisional tersebut dapat menyediakan landasan yang kuat dalam memetakan modernisasi..

Secara operasional, ulama dalam penelitian ini merujuk pada seseorang yang memiliki posisi dan peran sentral di bidang keagamaan. Pengkategorian ulama atau dalam istilah lokal Mandar disebut *annangguru* mencakup ketua organisasi Islam, pimpinan pondok pesantren atau pimpinan lembaga pendidikan Islam, pimpinan tarekat, imam mesjid besar yang secara kultural memiliki kharisma dan pengaruh pada masyarakat. Adapun politik yang dimaksud secara operasional dalam tulisan ini mencakup kontestasi pada ranah politik praktis dan kontestasi pada upaya penyusunan kebijakan publik yang bersifat strategis. Cakupan politik itulah, peran strategis ulama menjadi lokus utama penelitian ini dan ulama sebagai *resources* yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini.

### ***E. Kerangka Konseptual***

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah pandangan pemikiran Islam sebagai alat untuk menelaah relasi ulama dan politik di Kabupaten Polman dalam sebuah relasi peran pada arena kontestasi. Konsep peran dalam arena kontestasi politik tersebut dijabarkan dalam tiga aspek praktis, yaitu kiprah politik ulama, pengaruh politik ulama, hingga pandangan masyarakat berkenaan dengan peran politik ulama.



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### *A. Jenis dan Lokasi Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif<sup>80</sup> yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari responden atau pelaku yang dapat diamati.<sup>81</sup> Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan fakta suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>82</sup> Dengan demikian, deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran tentang dinamika peran ulama dalam kontestasi politik dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan batasan duratif waktu penelitian dimulai sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 hingga penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan terarah, pelaksanaan penelitian ini di susun melalui tiga tahap:

Pertama, tahapan persiapan yang menyangkut penyusunan proposal dan pembuatan desain penelitian serta pembuatan instrumen pengumpulan data penelitian sebagai panduan dalam pengumpulan data di lapangan.

---

<sup>80</sup>Penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.

<sup>81</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Komponen MKD* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 36.

<sup>82</sup>Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet, V; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 10.



Kedua, tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan catatan lapangan, transkrip wawancara, dan materi lain berupa dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

Ketiga, tahap pengolahan dan analisis data menyangkut pengkodean, pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis serta ditarik kesimpulan sebagai hasil laporan penelitian.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan pemikiran politik Islam untuk mengulas visi, posisi, peran, kiprah dan pengaruh ulama dalam kontestasi politik di Polman. Pendekatan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik. Melalui pendekatan ini data dikumpulkan terkait ulama dalam kontestasi politik di Polman, baik kiprah maupun pengaruh mereka dalam kontestasi politik tersebut secara sosiologis. Secara operasional pendekatan sosiologi politik memadukan pendekatan historis, komparatif, institusional, behavioral, dan fungsional.<sup>83</sup>

Pendekatan historis menelaah dinamika kekuatan-kekuatan yang terorganisir ke dalam kategorisasi tipe-tipe sistem berdasarkan tipe yang tertuang dalam teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan historis terpaku pada pembatasan ruang dan waktu sebagai batasan tipologis dan ekologis. Pendekatan komparatif digunakan secara operasional untuk mencermati berbagai fenomena politik dalam kaitannya dengan peran ulama dalam kontestasi politik di Polman.

---

<sup>83</sup>Arif Rusyaid, *Metode Penelitian Politik* (Yogyakarta: Politika Publishing, 2011), h. 34.

Pendekatan komparatif meniscayakan suatu generalisasi gejala politik dalam suatu masyarakat karena ada faktor persamaan dan faktor perbedaan yang digunakan untuk menyoroti gejala dalam fenomena kontestasi politik yang terjadi. Pendekatan institusional berfokus pada hal-hal yang legal formal, dimana fenomena dipahami berdasarkan ketetapan undang-undang dan regulasi lainnya. Dalam hal kontestasi politik, pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara normatif berdasarkan regulasi yang ada atas fenomena kontestasi politik yang terjadi. Pendekatan Behaviorial digunakan untuk mencermati tingkah laku dan persepsi-persepsi dari para aktor politik yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini, khususnya ulama. Tingkah laku dan persepsi diamati secara menyeluruh dengan menekankan individu-individu sebagai unit dasar dari analisis, dan untuk memulainya perlu pemisahan antara fakta dan nilai-nilai serta perlu membuat generalisasi terhadap tingkah laku yang diamati. Pendekatan fungsional menelaah bahwa setiap gejala yang diamati itu selalu mencari sasaran-sasaran khusus dan bahwa semua tingkah laku dan fenomena selalu berkenaan dengan tujuan tertentu.<sup>84</sup>

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam dan pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur, dokumen dan sejenisnya yang berkaitan dengan objek pembahasan. Adapun sumber data yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah ulama, politisi, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkompeten sebagai

---

<sup>84</sup>Arif Rusyaid, *Metode Penelitian Politik...* h. 36-37.

kontributor dalam penelitian ini. Pemilihan atas mereka karena dapat memberikan informasi akurat dan substantif tentang data yang peneliti perlukan.

Dalam menentukan informan yang akan peneliti wawancarai secara mendalam, peneliti menggunakan metode *purposive*.<sup>85</sup> Cara *purposive* peneliti pilih karena cara ini yang tepat untuk menggali informasi dari sumber data. Dengan cara *purposive* diharapkan diperoleh informan yang benar-benar memiliki informasi yang komprehensif dan mendalam terkait tema dan substansi penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci (pangkal), informan ahli, dan informan biasa. Kriteria informan kunci ditentukan menurut konsep Bernard, yaitu orang yang dapat bercerita secara mudah, paham terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dengan gembira memberikan informasi kepada peneliti.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini informan kunci adalah pelaku langsung yang terlibat, yaitu ulama yang terlibat dalam kontestasi politik di Polman. Informan ahli berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemerintah yang banyak mengamati dan mengetahui terkait tema penelitian yang dilakukan. Informan biasa adalah masyarakat umum yang peneliti minta pandangan dan testimoninya terkait tema penelitian.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah ulama dalam pengertian *annangguru* yang terdiri atas pimpinan tarekat, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan organisasi Islam. Informan berasal dari ulama yang terlibat dalam politik (politisi) maupun yang tidak (ulama non politisi). Informan kunci juga melibatkan

---

<sup>85</sup>Selain metode *purposive* dalam penentuan informan penelitian dikenal pula metode *snowball*. Mengenai kedua metode tersebut dalam penentuan informan penelitian, lihat Naniek Kasniyah, *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif* (Cet, I; Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 7-12.

<sup>86</sup>Russell Bernard. *Research Method in Cultural Antropology* (Beverly Hill: Sage Publication itd, 1988), 166.

politisi nonulama serta penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Penentuan informan kunci dilakukan secara *purposive* dengan mengambil tokoh kunci sebagai representasi kelompok. Informan kunci yang diambil untuk diwawancarai terdiri atas tiga orang ulama politisi, lima orang ulama non politisi, tiga orang politisi non ulama, serta masing-masing satu orang dari penyelenggara pemilu (KPU Kab. Polewali Mandar dan Bawaslu Kab. Polewali Mandar).

Pemilihan orang-orang tersebut sebagai informan kunci selain dipandang sebagai representasi elemen yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, juga karena peneliti memandang kapasitas mereka yang cukup memahami tema penelitian ini. Informan ahli terdiri atas akademisi dan tokoh masyarakat yang memahami seluk-beuk kiprah ulama dalam kontestasi politik di Polman dan masing-masing diambil dua orang sebagai informan untuk dimintai pandangan mereka tentang tema penelitian.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yaitu data penelitian lapangan (*field research*) dan dilengkapi dengan data penelitian kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan diperoleh melalui buku-buku atau pun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul ini. Data lapangan diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Untuk memahami makna yang terkandung dibalik sebuah perbuatan yang mendasari perbuatan seseorang, maka perlu dilakukan wawancara mendalam yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog dan tanya-jawab dengan para informan. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah penelitian yang

berlangsung secara lisan tentang informasi-informasi dari sumber.<sup>87</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan terkait masalah penelitian secara lebih mendalam.<sup>88</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan baik secara berencana (*standradized interview*) maupun tidak secara berencana (*unstandaridized interview*). Perbedaan keduanya terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mewawancarai informan.<sup>89</sup> Pada informan kunci dan ahli, peneliti menggunakan metode wawancara berencana, sedangkan pada informan biasa, peneliti menggunakan metode wawancara tidak berencana. Dalam melakukan wawancara, meski peneliti sebelumnya telah menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Daftar pertanyaan bukanlah suatu yang bersifat ketat, tetap dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi data yang didapatkan di lapangan.

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian dengan maksud melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>90</sup> Oleh karena itu, peneliti terlibat langsung melakukan pengamatan terhadap aktivitas sosial politik yang dilakukan dalam kaitannya dengan tema penelitian ini. Dalam pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat prilaku dan kejadian

---

<sup>87</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet, I; Yogyakarta: UGM Press, 1980), h. 113.

<sup>88</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Cet, I; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 160.

Setya Yuwana Sudikan, "Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis *life History*, dan Analisis Folklor", dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet, I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)h. 96.

<sup>90</sup> Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial* (Cet, I; Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 99.

sebagaimana yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Parsudi Suparlan, ada delapan hal yang menjadi perhatian peneliti dalam melakukan pengamatan. Yaitu, (1) ruang dan waktu, (2) pelaku, (3) kegiatan, (4) benda atau alat-alat, (5) waktu, (6) peristiwa, (7) tujuan, dan (8) perasaan).<sup>91</sup> Ke delapan hal tersebut saling berkaitan dalam pengamatan peneliti. Dalam melakukan pengamatan, peneliti hadir langsung di tengah-tengah peristiwa yang dilakukan dan mengikutinya secara intensif setiap rangkaian kegiatan. Peneliti mencatat dan merekam semua rangkaian peristiwa secara detail.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai sumber data. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau pun karya monumental.<sup>92</sup> Menurut Burhan Bungin, dokumentasi dalam penelitian sosial adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>93</sup> Khusus penelitian sosial, penggunaan dokumen untuk membantu peneliti “menziarahi” masa lampau ketika suatu kejadian atau peristiwa berlangsung.<sup>94</sup> Selain data historis, dokumentasi juga berfungsi untuk menemukan data-data sekunder seputar demografis maupun geografis lokasi penelitian. Data-data tersebut dapat ditemukan dari BPS (Badan Pusat Statistik) setempat, data dari kantor KPU Polman, dan dari sumber-sumber lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah metode pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam

---

<sup>91</sup>Setya Yuwana Sudikan, “Mengulas Kembali Pengamatan, Wawancara, Analisis *life History*, dan Analisis Folklor”, dalam Burhan Bungin (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet, I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), h. 95-96.

<sup>92</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet, I; Jakarta: Alfabeta, 2007), h. 82.

<sup>93</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, politik, dan ilmu Sosial Lainnya* (Cet, I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 121.

<sup>94</sup>Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 108.

penelitian ini, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel yang merupakan data statistik demografis, geografis, catatan histori, catatan transkrip, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini data yang dimaksud seperti catatan-catatan, berita-berita, atau gambar-gambar yang berkenaan dengan tema penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Secara operasional peneliti dilengkapi dengan instrumen yang digunakan yaitu: Pedoman wawancara, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh jawaban atau keterangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian dari informan yang dianggap berkompoten sebagaimana kriteria informan yang telah ditetapkan. Lembar observasi, guna mencatat tiap-tiap hasil pengamatan/observasi yang dilakukan. Dokumentasi, yaitu peneliti menyiapkan alat untuk mendokumentasikan berbagai hal dan kegiatan yang berhubungan dengan tema penelitian untuk kemudian melakukan pengklasifikasian data sesuai kebutuhan peneliti.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Metode pengolahan data menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif-deskriptif adalah menggambarkan dan memaparkan data-data hasil penelitian, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi,

dengan berupa kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.<sup>95</sup>

Dalam hal teknik pengolahan data digunakan dua teknik yakni, pertama mengidentifikasi data sebagai hasil wawancara yang didapatkan di lapangan dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, hasil kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisa sebagai hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan ketika mendapatkan data di lapangan adalah teknik analisis data kualitatif.<sup>96</sup>

Teknik analisis deskriptif yang dilakukan setelah data terkumpul dari lapangan, dapat dilakukan dalam tiga siklus kegiatan, sebagaimana disebutkan oleh Miles dan Haberman, yaitu tahapan reduksi data, display (penyajian) data, dan penarikan kesimpulan.<sup>97</sup> Berikut ketiga tahapan analisis data dalam penelitian ini:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pokoknya.<sup>98</sup> Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam analisis data selanjutnya. Selanjutnya reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selama kegiatan pengumpulan data

---

<sup>95</sup>Miles dan Huberman, *Qualitatif Data Analisis* (Beverly Hill: Sage Publication itd, 1984), 10.

<sup>96</sup>Analisis data dikerjakan juga di lapangan secara terus menerus ketika sementara data dikumpulkan. Hal ini merupakan upaya untuk memantapkan data sebagai bahan analisis data akhir sebelum peneliti meninggalkan lapangan. Lihat Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* ..h. 223.

<sup>97</sup>Lihat Miles dan Haberman, *Qualitatif Data Analisis* h. 12-18.

<sup>98</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* h. 92.



berlangsung dilakukan analisis data, proses menganalisis data yang dilakukan meliputi beberapa langkah kerja, yaitu :

- a. Menetapkan fokus penelitian
- b. Menyusun temuan-temuan data yang diperoleh
- c. Membuat rencana pengumpulan data berikutnya sesuai temuan-temuan dari data yang dikumpulkan sebelumnya.
- d. Mengembangkan pertanyaan untuk pengumpulan data berikutnya.
- e. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pemanfaatan media para profesional.<sup>99</sup>

## 2. *Display Data*

Mengingat data yang diperoleh cukup banyak, agar tidak kesulitan maka penulis memilah-milah data ke dalam beberapa kategori tertentu atau tema tertentu sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Display atau penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman atas data serta sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.<sup>100</sup> Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang deskriptif-analitis dan kritis.

Setelah data terpetakan dengan jelas. Penulis menyajikan data-data tersebut dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif, karena data yang diteliti adalah data verbal yang tidak berbentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang tertuang dalam naskah atau teks. Penyajian data dilakukan dengan deskriptif-analitik dan kritis. Yaitu, penyajian atas interpretasi terhadap data-data yang dibuat secara sistematis, komprehensif, dan reflektif.

<sup>99</sup>Riyadi Saroyo, *Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Malang: PPs IKIP Malang, 1992), h. 9

<sup>100</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, h. 211.

### 3. *Penarikan Kesimpulan*

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian dan pendekatan penelitian.<sup>101</sup>

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penarikan kesimpulan akan mengarah pada pola pengambilan kesimpulan induktif. Sebagaimana diketahui, metode penelitian kualitatif umumnya berorientasi pada eksplorasi, pengungkapan, dan logika induktif.<sup>102</sup> Oleh karena itu, metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logika induktif.

Kesimpulan induktif artinya cara penyimpulan fenomena untuk menyusun konsep tertentu dengan bertolak dari pendapat-pendapat yang ada di lapangan. Kesimpulan induktif ada dua macam, yaitu induktif analitik dan induktif enumeratif. Induktif analitik adalah kesimpulan yang didasarkan pada data-data empirik di lapangan kemudian ditarik ke pembentukan konsep. Sedangkan kesimpulan induktif enumeratif adalah penyimpulan data lapangan berdasarkan perhitungan angka-angka. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, maka penarikan kesimpulan induktif yang dipilih adalah induktif analitik.

Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara induktif, dimulai analisis dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Fenomenologi mengikuti arus pemikiran induktif yang mencoba mencari dan menemukan (*discovery*) suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Di samping

---

<sup>101</sup>Lihat Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, h. 212.

<sup>102</sup>Michel Quinn Patton, *How to use Qualitative Methods and Evaluation*, Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi dengan Judul, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 15.

itu, fenomenologi mencoba memperoleh gambaran yang bertujuan mencapai pemahaman (*understanding*) tentang kenyataan meski tetap bersifat spekulatif.

Berikut adalah tahapan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan membuat kesimpulan, yaitu:

- a) Membuat ringkasan dan ikhtisar dari keseluruhan penelitian,
- b) Menegaskan hasil penelitian dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan, dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.
- c) Menjelaskan hasil penelitian dengan kemungkinan penelitian lanjutannya,
- d) Menghubungkan hasil penelitian dengan kegunaan penelitian,
- e) Menghubungkan hasil penelitian dengan profesi penelitian,
- f) Menghubungkan hasil penelitian dengan makna-makna dan relevansi sosial,
- g) Menutup penjelasan dengan menawarkan tujuan dan arah penelitian selanjutnya.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi menurut Patton dalam Moleong dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Triangulasi Sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.

- b. Triangulasi Metode adalah metode dengan menggunakan dua strategi yaitu: Pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi Peneliti adalah metode dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.
- d. Triangulasi Teori adalah metode ini dengan melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi model sumber, metode dan teori. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap pihak terkait. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi sumber tertulis lainnya.

---

<sup>103</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h. 46

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Setting Lokasi Penelitian*

##### 1. *Geo-Demografis dan Sosio-Kultur Polewali Mandar*

Kabupaten Polewali Mandar (selanjutnya disebut Polman) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya disebut Sulbar) yang dahulu bernama Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas). Sejak Kabupaten Mamasa dimekarkan pada 2002, nomenklatur nama kabupaten pun berubah menjadi Polman. Polman berjarak  $\pm 195$  Km dari Mamuju (ibukota Sulbar) dan  $\pm 250$  Km dari Makassar (Ibukota Sulsel). Luas wilayah Polman adalah 2.022,3 Km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 16 kecamatan. Sebelah utara, Polman berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, sebelah selatan dengan Selat Makassar, sebelah barat dengan Kabupaten Majene dan sebelah timur dengan Kabupaten Pinrang.

Menurut Poman dalam Angka 2018, jumlah penduduk Polman sebanyak 427.484 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,11%/tahun dan rasio gender 96,3 dengantingkat keadatan penduduk 214 jiwa/Km<sup>2</sup>. Etnis dominan adalah Suku Mandar, terdapat pula Suku Pattae di Kecamatan Binuang, Suku Bugis banyak bermukim di Kecamatan Polwali dan Suku Jawa yang umumnya bermukim di Kecamatan Wonomulyo. Kultur Mandar sangat dominan di wilayah Polman bagian barat sedangkan di wilayah Polman bagian timur cenderung lebih heterogen.

Menurut Prof. Darmawan Mas'ud, pada dasarnya kata "Mandar " bukanlah sebuah penamaan yang terkait dengan geografis atau demografis tertentu, melainkan sebuah kumpulan nilai-nilai yang bertitik tolak pada sebuah sistem nilai sosial budaya luhur yang berasal dari kearifan "*Wcii marandanna odi ada' odi biasa*"

(kejernihan dari adat dan kebiasaan leluhur).<sup>104</sup> Menurut Aco Musaddad untuk menggambarkan karakter orang Mandar dapat dilihat pada simbol yang terdapat dalam perahu Sandeq, yaitu sebuah perahu kayu kahs Mandar berukuran kecil yang biasa digunakan untuk berlayar oleh pelaut Mandar. Adapun nilai yang terkandung dalam simbol perahu Sandeq adalah; Pertama, nilai religious, proses pembuatan perahu Sandeq adalah salah satu bentuk ekspresi keagamaan orang Mandar, dalam hal ini kepercayaan kepada hal-hal gaib yang melahirkan pola keberagaman yang unik. Proses pembuatan perahu Sandeq dipenuhi aneka ritual yang dilakukan berupa pembacaan doa dan hal ini adalah bentuk religiuitas orang Mandar. Kedua, nilai budaya, eksistensi perahu Sandeq merupakan hasil dan cara orang Mandar merespons kondisi alam di mana mereka tinggal. Secara simbolik Sandeq melambangkan karakter kebudayaan Mandar yang *survive* mengarungi lautan nan ganas. Ketiga, nilai identitas, perahu Sandeq melambangkan identitas orang Mandar yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dan terbuka menerima perubahan, gigih, tulus dan berani dalam mengambil keputusan.<sup>105</sup>

Masyarakat Mandar identik sebagai penganut Islam setelah proses Islamisasi yang terjadi pada abad XVII. Meski telah menganut Islam, orang Mandar masih mewarisi beberapa bentuk kepercayaan lama pra Islam. Corak keberagaman orang Mandar adalah Islam tradisional dan sufisme. Corak Islam tradisional pada masyarakat Mandar ditandai dengan kentatnya perpaduan Islam dengan unsure budaya lokal dalam banyak tradisi keislaman, misalnya tradisi *Sayang Pattudduq* di

---

<sup>104</sup>Idham, "Sosialisasi Nilai Budaya Mandar (Studi Kasus pada Generasi Muda Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat) dalam Jurnal *Al-Qalam*. Nomor XX Tahun XIII Edisi Juli-Desember 2007, h. 117

<sup>105</sup>Lihat Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, Polman: Gerbang Virtual, 2018, h. 84-85

Polman. Corak sufisme terlihat jelas pada banyaknya orang Mandar yang berafiliasi pada tarekat diantaranya tarekat Qadiriyyah dan Naqshabandiyah. Ulama (*annangguru*) yang terkenal di Mandar (Polman) adalah sosok ulama sufi seperti Imam Lapeo dan *Annangguru* Saleh. Kultur pendidikan Islam yang bercorak tradisional berupa pengajian kitab masih eksis hingga hari ini di Campalagian dan Pambusuang. Kultur Habaib juga sangat berpengaruh dalam kultur keislaman masyarakat Polman, utamanya Polman bagian Barat.

Penganut Islam di Polman menurut data BPS sebanyak 96,23%, penganut Kristen 2,76%, umat Katolik sebanyak 0,99% dan 0,02% penganut agama lainnya, umat Islam 100% pada 9 dari 16 kecamatan di Polman. Rumah ibadat umat Islam terdiri atas 829 buah masjid dan 105 buah mushala, gereja Kristen sebanyak 47 buah dan gereja Katolik sebanyak 10 buah. Organisasi keislaman yang banyak berpengaruh di Polman adalah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), As'adiyah, NU dan Muhamamdiyah, Wahdah Islamiyah.

Posisi ulama atau *annangguru* pada masyarakat Polman khususnya dan masyarakat Mandar pada umumnya memiliki peran sentral dalam masyarakat. Sosok *annangguru* adalah pemimpin kharismatik, yang berperan sebagai seorang pemimpin agama sekaligus tokoh masyarakat. *Annangguru* berposisi penting di tengah masyarakat Mandar yang dengan posisi tersebut menjadikan *annangguru* sebagai sumber rujukan, panutan sekaligus pelindung bagi masyarakat, Keluasan wawasan dan integritas moral semakin memperkuat posisinya di tengah. Sentralisme posisi *annangguru* juga didukung oleh karakteristik masyarakat Mandar secara umum yang masih sangat religious.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Lihat Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar...*, h. 315.

## 2. *Perpolitikan di Polewali Mandar*

Perpolitikan di Polman masih sangat kental dengan sistem klan, di antara klan yang cukup menonjol adalah klan Masdar dan klan Mengga. Klan yang paling menonjol dan cukup dominan adalah klan Masdar yang saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam politik pemerintahan bukan hanya di Polman tapi juga pada tingkat Provinsi Sulbar. Dalam beberapa even pilkada baik di tingkat kabupaten maupun provinsi kedua klan ini selalu bertarung. Pertarungan terakhir antara kedua klan tersebut adalah pada pemilihan bupati Polman 2018 di mana terjadi *head to head* antara Salim S. Mengga dan Ibrahim Masdar yang dimenangkan Ibrahim Masdar dengan perolehan suara 55,25% berbanding 44,65%. Setahun sebelumnya pada pemilihan gubernur Sulbar 2018 Salim S. Mengga juga bertarung sebagai calon gubernur melawan Ali Baal Masdar (Kakak Ibrahim Masdar), saat pemilihan tersebut ada calon lain yaitu Suhardi Duka. Salim S. Mengga hanya memperoleh suara 23,24%, jauh di bawah Ali Baal Masdar yang memperoleh suara 38,76% dan Suhardi Duka 38,00%. Kedua klan tersebut pada dasarnya memiliki dukungan dari kalangan ulama, hanya saja konsentrasi ulama yang mendukung klan Mengga lebih terfokus pada ulama tradisional di Balanipa dan Tinambung. Berbeda dengan klan Masdar yang memperoleh dukungan ulama yang lebih merata bahkan hingga di luar Polman.

Saat ini gubernur Sulbar adalah Ali Baal Masdar dan bupati Polman adalah Ibrahim Masdar. Modal sosial, kultural dan ekonomi menjadikan klan Masdar berhasil mencapai pengaruh dan berhasil meraih dominasi politik dalam konteks politik-pemerintahan di Polman dan Sulbar. Menurut Harman Alif Pratama, menguatnya peranan keluarga Masdar dalam perpolitikan di Polman dan Sulbar menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polman menjadi birokrasi dengan



corak patrimonial.<sup>107</sup> Dominasi klan Masdar dalam pemilu 2019 juga jelas terlihat dalam perolehan suara caleg yang didukung oleh klan tersebut pada semua tingkatan legislatif (DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR-RI)

Membaca peta perpolitikan di Polman, khususnya pada Pilkada (kabupaten dan provinsi) serta Pemilu 2019, variabel modal sosial, kultural, ekonomi, dan keagamaan cukup memengaruhi elektabilitas. Corak sosio-kultur masyarakat yang masih sangat tradisional dan patrimonial memungkinkan ketiga variabel tersebut bekerja secara efektif sebagai mesin politik. Hal ini tergambar jelas dalam perolehan suara kandidat dalam pemilu 2019. Faktor keagamaan memiliki pengaruh dalam elektoral namun masih kalah signifikan faktor sosial dan ekonomi dalam perolehan suara.

Pada pilpres 2019, pasangan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin unggul di Polman dengan kemenangan 56% terhadap lawannya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Banyak pihak yang menengarai, dukungan elit sosiadan tokoh agama tradisinal di Polman memengaruhi kemenangan pasangan Jokowi. Pada pemilihan calon anggota DPD RI, 3 nama cukup mencuat, yaitu Ajbar, Iskandar Baharuddin Lopa dan Mas'ud Saleh, nama yang terakhir meski seorang pendatang baru namun berhasil meraih suara yang cukup signifikan karena berasal dari "gerbong" Pemuda Anshor NU dan Tarekat Qadiriyyah pimpinan Syibli Shahabuddin. Namun, perolehan suara Mas'ud Saleh tersebut tidak cukup untuk mengantarkannya ke kursi DPD RI mewakili Provinsi Sulbar.

---

<sup>107</sup>Harman Alif S. Pratama, "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmard dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar", dalam *Jurnal Government*, Volume 7, Nomor 1, Edisi Juli 2014, h. 33-48

Istri dari Bupati Polman (Ibrahim Masdar), Hj. Jumriah serta istri gubernur Sulbar (Ali Baal Masdar) Hj. Ruskati Ali Baal berhasil meraih suara tertinggi dalam pileg DPR-RI di Polman. Hj. Jumriah merupakan calon dari PDI-P meraih suara 38.179 suara sedangkan Hj. Ruskati dicalonkan dari Gerindra meraih 36.511 suara. Perolehan suara keduanya jauh melampaui suara AGH. Syibli Shahabuddin yang merupakan ulama dan pemimpin Tarekat Qadiriyyah yang merupakan caleg dari PKB dengan hanya memperoleh 12.265 suara. Hal yang hampir sama juga tampak dalam perolehan suara anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten di Polman, modal sosial, kultural, dan ekonomi calon masih lebih signifikan memengaruhi perolehan suara. Latar belakang keagamaan maupun dukungan dari tokoh agama memperlihatkan pengaruhnya pada peraihan elektoral, khususnya pada wilayah Polman bagian barat yang memang sangat kental kultur keislamannya. Namun, dukungan tokoh agama terbagi kepada beberapa caleg sehingga caleg yang berasal dari kalangan ulama tersebut masih kalah bersaing dengan calon lain. Kalah persaingan khususnya dari caleg yang memiliki modal ekonomi dalam meraih suara pemilih.

## ***B. Kiprah Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar***

### ***1. Kiprah Politik Ulama***

Polman merupakan kabupaten di Sulbar yang paling banyak memproduksi ulama atau *annangguru* dan di masa lampau merupakan pusat penyiaran agama Islam di seluruh Tanah Mandar. Corak keulamaan di Polman masih sangat kental dengan nuansa tradisional dikarenakan kultur keislaman di Polman masih mempertahankan tradisi Islam Mandar.<sup>108</sup> Menurut Musaddad, konteks ulama atau

---

<sup>108</sup> Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar...*, h. 10

*annangguru* di Mandar adalah pemimpin organisasi (khususnya NU), memimpin pengajian kitab, memimpin pesantren, memimpin tarekat, hingga memimpin panti asuhan. Peran sosial-keagamaan ulama di Polman adalah sebagai pengajar dan pendidik, imam masjid, pemimpin upacara keagamaan hingga sebagai konsultan agama, spiritual bahkan pengobatan. Akibat perannya tersebut, *annangguru* berposisi sebagai elit lokal yang menjadi panutan, pelindung hingga sebagai mediator di tengah-tengah masyarakat.<sup>109</sup>

Filosofi perahu Sandeq dapat menjadi gambaran posisi sosio-kultural dan keagamaan yang strategis dari ulama di Polman. Posisi dan peran religious ulama sangat terlihat dalam ritual pembuatan perahu Sandeq termasuk pada kepercayaan akan keberkahan ulama dalam memberkati perahu tersebut. Perahu Sandeq melambangkan karakteristik ulama di Polman yang penuh integritas, komitmen, serta konsisten sebagaimana gambaran Sandeq *survive* mengarungi lautan nan ganas. Filosofi perahu Sandeq yang melambangkan identitas orang mandar yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dan terbuka menerima perubahan, gigih, tulus dan berani dalam mengambil keputusan dipercayai terinternalisasi dalam sosok ulama di Tanah Mandar.

Berdasarkan temuan peneliti, meski Polman merupakan daerah yang memiliki banyak ulama, namun masih sangat sedikit ulama yang terjun ke dalam dunia politik praktis secara langsung. Faktor historis di Tanah Mandar yang memisahkan otoritas politik dan keagamaan tampaknya berpengaruh terhadap kurangnya kecenderungan ulama untuk terjun pada dunia politik praktis. Kekuasaan politik di Mandar pada masa lalu dipegang oleh kalangan bangsawan atau *mara'dia*

---

<sup>109</sup>Lihat Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar..*, h. 19-22.

sedangkan otoritas keagamaan secara terpisah dipegang oleh *annangguru*. Keduanya adalah institusi yang terpisah meski berjalinkan-kelindan dan bersinergi dalam memainkan pengaruh sosial di masyarakat. Kalangan *mara'dia* sebagai pemimpin politik-pemerintahan membutuhkan nasihat dan arahan serta dukungan ulama dalam roda pemerintahannya. Sebaliknya, kalangan uama membutuhkan *back-up* dan *support* penuh dari kalangan *mara'dia* dalam penyebaran dan pengajaran Islam kepada masyarakat Mandar. Dukungan dari kalangan *mara'dia* membuat ulama berhasil mengembangkan penyebaran dan pengajaran Islam di seluruh Tanah Mandar baik melalui institusi pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

Ulama di Mandar yang mendapatkan penghormatan dan posisi strategis di masyarakat, tidak hanya sebatas mereka yang berdarah asli Mandar. Namun, mereka yang berkiprah dalam pembinaan umat di Mandar, meskipun bukan orang asli Mandar. Ulama asal Bugis, Jawa, Melayu bahkan dari Arab utamanya dari kalangan Habaib (keturunan Rasulullah) banyak berkiprah dan memberikan pengaruh kepada masyarakat di Mandar, khususnya di Polman. Ulama dalam penelitian ini mengacu pada sejarah tersebut, sehingga tidak dibatasi hanya ulama yang merupakan "putra asli" Polman secara geneologis saja, melainkan ulama yang berkiprah dalam dunia keagamaan di Polman. Adapun politik yang dimaksud adalah kiprah, strategi dan pengaruh baik dalam kontestasi politik maupun dalam pengaruhnya pada pengambilan kebijakan publik di Polman.

Secara historis posisi ulama memang sangat strategis dalam hal sosio-kultur masyarakat Polman. Dari masa ke masa penghormatan masyarakat terhadap ulama dan posisi strategis ulama secara sosio-kultural di Polman masih sangat tinggi. Namun hal tersebut tidak terlalu tampak dalam peran politik yang secara langsung, di

mana ulama mendapat dukungan penuh untuk terlibat dalam politik praktis. Setelah kemerdekaan Indonesia, ada beberapa ulama yang terlibat pergerakan politik. Diantara ulama Mandar yang cukup menonjol dalam perpolitikan dimasa orde lama adalah HM. Syaifuddin, ulama kelahiran Pambusuang yang terpilih sebagai anggota DPR-RI pada pemilu 1955 dari Dapil Sulawesi Selatan mewakili Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Di masa orde baru ulama di Polman masih belum banyak yang terlibat dalam politik praktis, dan afiliasi politik mereka terpecah antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar). Fenomena ini juga masih bertahan di erareformasi, khususnya ketika terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, yaitu masih kurang ulama di Polman yang masuk dalam politik praktis. Umumnya ulama di Polman banyak yang beraktivitas di dunia pemerintahan, seperti pengadilan agama atau departemen agama. Berikut daftar ulama di Polman beserta kiprahnya yang sempat peneliti inventarisir :

no	Nama Ulama	Pekerjaan	Masa Periode	Ormas/Afiliasi Politik	Keterangan
Pasca Kemerdekaan (Masih Sulsel)					
1	Annangguru Muchsin Thahir (alm)	Kepala Pengadilan Agama Polman	1957 – 1971	NU / PPP	Mantan Dewan Syuro PPP
2	Annangguru Muhammad Shaleh (alm)	Kepala Pengadilan Agama Majene	1959 – 1971	NU	Kelahiran Polman, menetap di Majene sejak menjadi Kepala Pengadilan, Mursyid Tarekat Qadiriyah, kadi Malunda
3	Annangguru Muh. Arif lewa (alm)	Ketua MUI Polman	2005 – 2007	NU	Murid Annangguru Muhammad Shaleh, Mantan Ketua Yayasan STAI DDI Polman, PNS (Kasu

					Urais Kemenag Polmas
4	Annangguru Muhtar Badawi (alm)	Ketua MUI Polmas	2000 - 2005	NU	Da'I, Mantan Kepala Pengadilan Agama (1971-1980)
5	Annangguru Mahmuddin (alm)	Ketua MUI Polman		NU	Mantan Kandepag Polman
6	Annangguru Syuaib Abdullah (alm)	Imam Mesjid Syuhada Polman	1985 - 2017	NU	PNS Kemenag Polman
7	Annangguru Prof. Dr. Sahabuddin (alm)	Dosen PNS UIN Alauddin		NU	Ketua STIKIP DDI (Sekarang Unasman), Mursyid Tarekat Qadiriyyah
8	Habib Ja'far bin Thaha al Mahdaly (alm)	Mantan Anggota DPRD Polman	1994 - 1999	NU	Da'i
9	Muhammad Yusuf Tuali	Ketua PW Muhammadiyah Sulbar	2010 - 2015	Muhammadiyah	Wakil Bupati Polman (2003-2008), Ketua PD Muhammadiyah Polman (2002 - 2007), Da'i
10	Habib Muhammad bin Thaha al Mahdaly (alm)	PNS (Kepala Seksi Kec. Wonomulyo)	2005 - 2007	NU	Da'i
Pasca Reformasi Sulbar (sampai Sekarang)					
1	Annangguru Syahid	Ketua MUI Polman	2017 - sekarang	NU	Da'I, Pengajian Kitab Kuning,
2	Annangguru Syibli Sahabuddin	Ketua Yayasan Unasman	2009 - Sekarang	NU	Mantan Ketua NU Sulbar, PNS Kemenag, Mantan Anggota DPD (2009-2019, Ketua PKB Sulbar (sekarang)

3	Annangguru Bisri	Wakil Ketua MUI,	2017 – sekarang	NU	Imam Mesjid Pambusuang, Pimpinan Ponpes Nuhiyah Pambusuang, PNS Kemenag Polman (Penyuluh)
4	Annangguru Mudir	Wakil Ketua MUI Polman	2017 – sekarang	NU	Pimpinan Ponpes Arrisalah, Binuang
5	Habib Ahmad Fadl al Mahdaly	Imam Mesid Syuhada Polman	2019 – skrg	NU	Dewan Syuro PKB, Caleg DPRD Polman 2019, Bazda Polman
6	Annangguru Razak	Wakil Ketua MUI Polman	2017 – sekarang	NU	Imam Mesjid Campalagian
7	Annangguru Mahyaddin Mahdi	Imam Mesid Campalagian	2017 – sekarang	NU	mantan Pimpinan Ponpes Hasan Yamani Campalagian, Mantan anggota DPRD (2009-2019)
8	Annangguru s Sirajuddin	Wakil Ketua MUI Polman	2017 – sekarang	NU	Guru Ponpes Assalafi Campalagian
9	Annangguru Muhasib	Wakil Ketua MUI Polman	2017 – sekarang	NU	PNS Pemkab Polman (Guru SD Balanipa)
10	Annangguru Tsabit Najamuddin	Ketua MUI Polman	2012-2017	NU	Mantan Kepala Kemenag Polman (PNS)
11	Annagguru Adnan Nota	Pimpinan Ponpes Al Ihsan	2019 – sekrang	DDI	Mantan Kepala Kemenag Polman (PNS), Ketua PW NU Sulbar (2020-Sekarang)
12	Annangguru Mujahid	Pimpinan Ponpes Darul Qur'an	2017 – sekarang	Muhamma diyah	Da'i
13	Annangguru Alauddin	Pengurus Muhammadiyah Polman	2019 – sekarang	Muhamma diyah	Da'I, ASN (Guru SMA 1 Polewali)
14	Annangguru	Pengurus	2019 –	Muhamma	Da'I, ASN (Guru

	Nafi Salim	Muhammadiyah Polman	Sekarang	diyah	SMA 2 Polewali)
15	Annangguru Rudy Tarenre	Pimpinan Ponpes Al Ikhlas Lampoko	2012 – 2017	Muhammadiyah	Da'I, Guru PNS MAN 2 polewali
16	Annangguru Usman Qurtubi	Pengurus MUI Polman	2012 – 2017	Muhammadiyah	Da'I, Majelis Tarjih Muhammadiyah Polman
17	Annangguru Burhanuddin Qasim	Pimpinan Ponpes Darul Khasanah Wonomulyo	2019 – sekarang	Muhammadiyah	Da'i
18	Annangguru Zainal abiding	Imam Mesjid Muhammadiyah Polman	2012 – sekarang	Muhammadiyah	Da'i
19	Annangguru Ismail, M.Pd.I	Sekretaris PW Muhammadiyah Sulbar	2015 – sekarang	Muhammadiyah	ASN (Ka.MTS Ponpes Darul Hasanah
20	Annangguru Junaidi Mattu	Pengurus MUI Polman	2012 – 2017	Muhammadiyah	ASN (Ka. TU Kemenag Polman), Ka. Kemenag Soppeng (Skrng)

Table 1 : Daftar Ulama di Polewali Mandar

Ulama di Polman yang berkiprah secara langsung di kancah politik praktis pada masa pasca reformasi, menurut penuturan beberapa informan masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah ulama yang ada di Polman. Menurut KH. Sa'dong Bani (mantan Ketua Umum MUI Polman dan mantan Anggota DPRD Kabupaten Polman), ulama yang terlibat secara langsung dalam kancah politik di Polman “dapat dihitung dengan jari” atau hanya beberapa saja. Menurut Sa'dong Bani, hal tersebut dikarenakan untuk terjun ke dunia politik harus dilihat dulu potensinya, harus jelas visi-misinya, latar belakangnya, serta paham tentang



penyusunan program pemerintah, dan masih sangat sedikit ulama yang memenuhi kriteria tersebut di Polman.<sup>110</sup>

Menurut Syaifuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Polman, paradigma ulama ikut dalam kontestasi politik di Polman cukup beragam mulai dari murid sampai kepada *mursyid*. Namun biasanya ulama yang terlibat itu adalah yang memiliki basis keagamaan yang secara ideologis tunduk dan patuh terhadap perintah ulama yang bersangkutan walaupun tidak secara langsung, namun murid memahami bahwa kebersamaan dengan *annangguru* itu adalah dunia dan akhirat dalam aspek kehidupan tak terkecuali dalam memilih. Di Polman ulama yang memiliki basis diantaranya adalah Tarekat Qadiriyyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Syaziliyyah dan ada juga ulama yang memiliki basis dalam organisasi keagamaan seperti DDI, NU, Muhammadiyah namun di Polman perannya agak kecil, berbeda dengan kelompok tarekat. Jumlah ulama di Polman yang pernah ikut berkiprah dalam dunia politik masih sedikit, diantaranya yang cukup menonjol adalah KH. Syibli Sahabuddin dan H. Zainal Abidin.<sup>111</sup>

Kedua tokoh ulama tersebut, setidaknya menjadi representasi ulama dari Polman yang menorehkan prestasi dalam kiprah dan strategi politiknya. KH. Syibli Sahabuddin berhasil menjadikan posisinya sebagai salah satu pimpinan Tarekat Qadiriyyah di Tanah Mandar untuk mengantarkannya sebagai senator selama dua periode di DPD RI mewakili Provinsi Sulbar. Menurut penuturan Mas'ud Saleh, KH. Syibli berhasil menjadi senator selama dua periode dengan biaya politik yang sangat minimal. Hal tersebut karena keberhasilannya mengorganisir jamaah Tarekat Qadiriyyah yang dipimpinnya dengan suara bulat. Lolosnya Syibli dengan biaya politik

<sup>110</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali

<sup>111</sup>Wawancara Syaifuddin, tanggal 25 Januari 2020 di Polewali.

yang minimal karena dalam perjuangan suksesinya tidak menggunakan politik uang untuk meraih elektoral.<sup>112</sup> H. Zainal Abidin adalah sosok ulama berlatar belakang Pesantren As'adiyah dan menjadi pimpinan Pesantren As'adiyah Woomulto yang terbilang sukses dalam dunia politik. Meski Zainal Abidin bukan orang asli Mandar, namun ketokohnya sebagai ulama membuatnya mendapat dukungan sehingga berhasil menjadi legislator.

Sedikitnya ulama di Polman yang terlibat langsung di dunia politik dibenarkan oleh Sayyid Fadl al-Mahdali (Imam Masjid Syuhada Polman yang juga Ketua BAZDA Polman dan pada Pileg 2019 menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Polman). Menurut Fadl, ulama yang terlibat langsung dalam dunia politik praktis di Polman tidak sampai lima orang. Fadl menyebut dua nama yang cukup menonjol, yaitu AGH. Syibli Shahabuddin dan Zainal Abidin.<sup>113</sup> Pemaparan Fadhl juga dibenarkan oleh informan lainnya, yaitu Ustaz Rudi Tarenre (Pimpinan Pondok Pesantren al-Ikhlas Lampoko, Polman).<sup>114</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada dua nama yang selalu diidentikkan dengan ulama atau tokoh agama di Polman yang berkiprah secara langsung dalam kancah politik praktis. Kedua nama tersebut adalah AGH. Syibli Shahabuddin dan H. Zainal Abidin Lc. Syibli Shahabuddin adalah tokoh Tarekat Qadiriyyah yang juga pimpinan (rektor) Universitas Al-Asy'ariyah Mandar (Unasman) yang selama dua periode (2009-2019) terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Provinsi Sulbar. Syibli dapat dikatakan sebagai icon ulama yang menjadi sukses politisi di Sulbar. Sedangkan H. Zainal

<sup>112</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>113</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>114</sup>Wawancara Ustaz Rudi Tarenre, tanggal 12 Desember 2019 di Lampoko.

Abidin, Lc adalah Ketua Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo Polman dan alumni LIPIA Jakarta yang juga seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama dua periode menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulbar.

Syibli Shahabuddin lahir di Polewali, 20 Agustus 1968, merupakan putra kedua dari Prof. Dr. AGH. Shahabuddin. Pendidikan keagamaan selain dari ayahnya, ditempuh secara formal di Pesantren IMMIM dan di MAN 1 Ujung Pandang. Pendidikan S1 dan S2 dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sempat mengenyam pendidikan dakwah di House of Knowledge Islamabad Pakisatan selama dua tahun (1988-1990). Selama tujuh tahun menjadi PNS di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Polmas (2002-2009) dan mundur dari PNS seiring pencalonannya sebagai Anggota DPD RI mewakili Provinsi Sulbar pada Pileg 2009 dan selama dua periode duduk sebagai anggota DPD RI. Pada Pileg 2019, karena mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPW PKB Sulbar, beliau maju sebagai calon anggota DPR-RI dari PKB, namun tidak terpilih.

Syibli dikenal sebagai salah satu tokoh atau pimpinan Tarekat Qadiriyyah menggantikan ayahnya yang wafat tahun 2004. Selain mewarisi kepemimpinan dan kharisma ayahnya di Tarekat Qadiriyyah, Syibli juga mewarisi perguruan tinggi Universitas Al-Asy'ariyah Mandar dan menjadi rektor yang pertama. Syibli berhasil mengembangkan kampus Unasman menjadi universitas terbesar di Sulbar yang memiliki enam fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari sepuluh ribu orang yang berasal dari berbagai daerah di Sulbar. Selain sebagai politisi dan akademisi serta tokoh tarekat, Syibli juga adalah seorang organisatoris yang menjadi Ketua Umum PW NU Sulbar yang pertama pada tahun 2006. Secara organisasi, Syibli berlatar belakang aktivis PMII sewaktu kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah.

Melalui modal sosial sebagai tokoh tarekat, pimpinan perguruan tinggi dan Ketua NU, Syibli berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dalam dua kali pencalonannya sebagai anggota DPD yang mengantarkannya menjadi senator mewakili Provinsi Sulbar selama sepuluh tahun. Tahun 2017, Syibli diamanahkan sebagai Ketua Umum DPW PKB Sulbar yang membuat memutuskan untuk bertarung sebagai caleg DPR-RI dari PKB untuk Dapil Sulbar. Pada pencalonan kali ini, meski memperoleh suara yang cukup signifikan, yaitu 23.316 suara. Namun, total perolehan suara partai dari PKB tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi legislator DPR-RI. Hal ini membuat Syibli gagal untuk melenggang kembali ke Senayan sebagai Anggota DPR-RI.

Tokoh yang kedua yang dikenal sebagai ulama politisi di Polman adalah, H. Zainal Abidin, Lc. Adalah keturunan Bugis Wajo yang lahir di Polewali pada 25 Februari 1969. Pendidikan keagamaan diperleh sejak jenjang ibtidaiyah dari MI As'adiyah Wonomulyo Polmas. Jenjang tsnawiyah dan aliyah ditempuh di Pesantren IMMIM Makassar kemudian meraih gelar Lc dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Aktivitas di dunia keislaman adalah sebagai Ketua Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo Polman serta sebagai Dewan Pengurus Masjid Besar Wonomulyo.

Pada kancah politik praktis, selama dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sulbar. Tahun 2004 terpilih sebagai Anggota DPRD Sulsel dari PKS melalui Dapil Mandar, dengan mekarnya Provinsi Sulbar tahun 2004 membuatnya kemudian beralih dari Anggota DPRD Sulsel menjadi Anggota DPRD Sulbar dan kemudian terpilih lagi pada periode berikutnya. Tahun 2008 beliau menjadi calon Bupati Polman untuk periode 2009-2014 berpasangan dengan Abdul Wahab Hassan

Sulur. Pasangan ini hanya berada di urutan keempat dari lima pasang calon dengan memperoleh suara hanya 8.349 atau 4,47% dari total suara sah. Pada pemilu 2014 tidak terpilih lagi sebagai legislator di DPRD Provinsi Sulbar. Pada pilkada Polman 2018 sempat ada wacana akan maju kembali sebagai kandidat Bupati Polman dari PKS. Sejak 2010 beliau menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulbar. Semenjak ada kisruh internal di tubuh DPP PKS pada tahun 2018 yang mengakibatkan hengkangnya kubu Anis Matta dan Fahri Hamzah dari PKS dan mendirikan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI). Zainal Abidin bergabung dalam faksi tersebut yang membuatnya tidak mencalonkan diri dalam Pileg 2019.

Selain kedua tokoh tersebut ulama lain yang pernah terlibat dalam politik praktis di Polman adalah Drs. H. Sa'dong Bani yang pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Polman 2004-2009. Sempat duduk sebagai legislator dari PKB, tahun 2009 pindah haluan kePartai Golkar namun tidak terpilih kembali. Beliau adalah tokoh agama Islam yang menjabat sebagai Ketua MUI Polman 2003-2011. Saat ini Sa'dong Bani menjabat sebagai Ketua FKUB Polman dan aktif sebagai mubaligh. Ketika ditanya alasannya untuk memilih aktif dalam politik praktis. Beliau menyatakan, karena di daerah Polman banyak persoalan-persoalan sosial yang muncul dan masalah tersebut memengaruhi rendahnya pendidikan keagamaan bagi masyarakat. Misalnya persoalan kepemilikan ternak yang diklaim oleh orang lain. Menurut dia, hal ini harus dibuatkan mekanismenya dan dalam Islam hal tersebut bisa terjawab dan tentu ulama memahami konsep tersebut. Persoalan sosial lainnya yang membuatnya terjun di dunia politik adalah kondisi pergaulan generasi muda yang begitu bebas berkeliaran di taman-taman yang dibuat oleh pemerintah, hidup bersama-sama di kost dan persoalan remaja lainnya. Menurut Sa'dong hal

tersebut mesti dibuatkan solusinya baik dengan pendekatan keagamaan atau sosial melalui jalur politik.<sup>115</sup>

Seorang ulama muda keturunan Habaib pada pileg 2014 mencoba peruntungan sebagai caleg DPRD Kabupaten Polman melalui Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu) adalah Ahmad Fadhl al-Mahdali melalui Partai Demokrat. Ahmad Fadhl sebelumnya adalah Dewan Syuro PKB Kabupaten Polman, namun karena ada persoalan internal, akhirnya memilih mundur sebagai caleg PKB hingga akhirnya menjadi caleg Partai Demokrat. Perolehan suara Ahmad Fadhl pada pileg tersebut hanya 325 suara dengan konsentrasi suara sebanyak 302 suara berasal dari Kecamatan Balanipa yang merupakan daerah basisnya. Dengan jumlah suara tersebut, Ahmad Fadhl gagal menjadi Anggota DPRD Polman periode 2019-2024. Sebagai seorang tokoh agama, Ahmad Fadhl adalah Imam Masjid Agung Syuhada Polman dan Ketua BAZDA Kabupaten Polman. Saat ini, Ahmad Fadhl juga aktif sebagai mubaligh yang aktif berdakwah hingga ke luar daerah.

Ketika peneliti menanyakan alasan Ahmad Fadhl memilih terjun di dunia politik praktis sebagai caleg. Beliau menyatakan bahwa ada ruang-ruang tertentu dalam politik yang perlu diisi oleh figur seorang ulama, sehingga dalam politik ada nilai-nilai moralitas keagamaan yang senantiasa diperjuangkan untuk menjadi sikap politik kita. Dalam berpolitik menegaskan tetap komitmen bahwa politik itu adalah sesuatu yang baik, karena bagian dari cara untuk membangun negara dan daerah. Komitmennya bahwa proses politik yang dijalani berada di atas fondasi moralitas keagamaan. Hal ini ditunjukkan, misalnya mencoba untuk tidak memengaruhi orang

---

<sup>115</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

dengan iming-iming atau sesuatu yang bersifat *money* politik sehingga publik memahami bagaimana menyalurkan hak politik yang benar, hal ini tentu bagian dari dakwah Islam.<sup>116</sup>

Tokoh ulama lainnya yang terlibat aktif dalam kancah politik praktis di Polman adalah H, Mahyuddin Mahdy. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi imam pada Masjid Besar Campalagian. Mahyudin merupakan anak dari AGH.Mahdy Burarerah yang merupakan murid dari AGH. Arsyad Ma'dappungan, seorang ulama terkenal di Mandar. Beliau adalah fungsionaris PPP Sulbar, periode 2009-2014, menjadi Anggota DPRD Kabupaten Polman dan periode selanjutnya (2014-2019) terpilih sebagai Anggota DPRD Sulbar melalui Dapil Polman. Ketika menjabat sebagai Anggota DPRD Sulbar, diangkat sebagai Imam Masjid Besar Campalagian, karena hal tersebut beliau memilih untuk kembali menjadi caleg kabupaten, meski saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi. Pada pileg 2019 maju sebagai caleg dari PPP melalui Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Campalagian, Luyo dan Tutar. Perolehan suara Mahyuddin hanya 825 suara dengan konsentrasi suara di Kecamatan Campalagian. Perolehan suaranya masih kalah dengan caleg lain dari internal partainya dan hal ini membuatnya tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polman.

Berdasarkan data yang disebutkan di atas, jumlah ulama yang aktif dalam kancah politik praktis di Polman amatlah minim. Hanya seorang KH. Syibli Sahabuddin, selaku ulama Polman yang sempat berkiprah dalam kancah politik nasional, sisanya hanya dalam kancah politik lokal Polman dan Sulbar itu pun dengan jumlah yang sangat sedikit. Lebih lengkapnya mengenai ulama Polman yang

---

<sup>116</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

sempat atau masih berkiprah dalam dunia politik praktis dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Kiprah keulamaan	Kiprah Politik
1	KH.Syibli Sahabuddin	Tokoh Tarekat Qadiriyyah, Ketua PW NU Sulbar dan Rektor Universitas AS'ariyah Mandar	Anggota DPD-RI (2004-2014) dan Caleg DPR RI dari PKB
2	H. Sa;dong Bani	Ketua MUI dan Ketua FKUB	Anggota DPRD Polman 2004-2009 (PKB) dan Caleg DPRD Polman 2009(Golkar
3	H. Zainal Abidin,Lc.	Pimpinan Pesantren As'adiyah Wonomulyo	Anggota DPRD Polman (2004-2014) dari PKS, calon bupati Polman (2008), Deklarator Partai Gelora Sulbar
4	H. Mahyuddin Mahdi	Imam Masjid Besar Campalagian	Anggota DPRD Polman (2009-2014), Anggota DPRD Sulbar (2014-2019) dari PPP
5	Sayyid Ahmad Fadhl	Imam Masjid Syuhada Polewali, Ketua BAZDA dan tokoh muda NU	Caleg DPRD Polman 2019 dari Partai Demokrat

Table 2 : Ulama yang Mengikuti Kontestasi Politik di Polewali Mandar

Minimnya kiprah ulama dalam politik praktis secara langsung di Polman, bukan berarti ulama di Polman tidak diperhitungkan dalam setiap momen politik dalam skala daerah. Peran politik ulama di Polman tetap terlihat meski dalam peran-peran yang bersifat tidak langsung. Peran-peran tidak langsung dalam bentuk sebagai suksesor baik secara terbuka dengan mendukung calon kepala daerah atau calon legislatif tertentu atau dukungan yang dilakukan secara diam-diam, khusus untuk internal jamaahnya saja. Menurut KH. Syahid Rasyid (Ketua MUI Polman), bentuk



suksesor seperti ini yang lebih banyak dilakukan oleh ulama di Polman.<sup>117</sup> Bentuk peran tidak langsung lainnya seperti yang disebut Ust. Rudi Tarenre adalah dengan memberi masukan kepada pemerintah terkait beberapa langkah atau kebijakan yang dianggap penting.<sup>118</sup>

Peran ulama sebagai suksesor dalam pemilihan kepala daerah misalnya digambarkan oleh Muhammad dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur Sulbar pertama kali yang dimenangkan oleh pasangan Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi. Kemenangan asangan calon tersebut tidak lepas dari dukungan jamaah Tarekat Qadiriyyah yang ada di Sulbar, khususnya di Polman dan Majene. Ketika pemilihan Gubernur Sulbar pertama kali pada 2006 tersebut, Tarekat Qadiriyyah menggunakan istilah, "Instruksi satu komando", hal ini membuat seluruh jamaah Tarekat Qadiriyyah pimpinan Ilham Saleh menyatukan dukungan kepada pasangan Anwar-Amri. Terkhusus di Polman, elit-elit tarekat Qadiriyyah melakukan konsolidasi internal kepada jamaah Qadiriyyah yang umumnya tersebar di Kecamatan Tinambung, Balanipa, Alu dan Polewali untuk memilih pasangan cagub-cawagub Sulbar Anwar-Amri tersebut.<sup>119</sup>

Peran Tarekat Qadiriyyah sebagai suksesor dalam pemilihan kepala daerah juga ditulis oleh M. Armin Arsyad dan M.Basyir Syam dalam kasus pilkada Kabupaten Majene 2011. Pada pilkada tersebut Tarekat Qadiriyyah pimpinan Ilham Saleh secara aktif menyatukan dukungan ke pasangan calon Kalma Katta-Fahmi

---

<sup>117</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali

<sup>118</sup> Wawancara Ustaz Rudi Tarenre, tanggal 12 Desember 2019 di Lampko.

<sup>119</sup>Lihat Muhamamd, "Peran Tarekat Qadiriyyah dalam Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dalam *Jurnal Arajang*, Vol I, No 1, Tahun 2018, h. 14-26.

Massiara yang akhirnya memenangkan Pemilihan Bupati Majene 2011.<sup>120</sup> Menurut banyak sumber, duduknya Syibli Shahabuddin sebagai anggota DPD RI dua periode mewakili Sulbar juga berkat dukungan penuh elit-elit Tarekat Qadiriyyah. Mas'ud Saleh menuturkan, bahwa suaranya yang cukup signifikan kendati tidak lolos empat besar calon anggota DPD RI terpilih mewakili Sulbar, karena berada di posisi enam. Merupakan dukungan penuh AGH. Syibli Shahabuddin yang mendukungnya secara penuh dan disampaikan kepada jamaahnya.<sup>121</sup>

Peran politik ulama lokal di Polman dalam mendukung calon legislatif maupun calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur juga banyak dilakukan meski dengan dukungan yang lebih bersifat terbatas. Ulama-ulama yang memiliki basis jamaah biasanya mensukseskan calon yang ia dukung dengan mengajak jamaahnya untuk memilih calon tersebut. Meski terlibat dalam mendukung calon tertentu, namun para ulama di Polman masih memerhatikan sakralitas dan netralitas mimbar, sehingga mereka tidak menyampaikan dukungannya secara terbuka melalui mimbar khutbah atau pengajian. Peran politik ulama secara tidak langsung dalam pemilu sudah jauh lebih tampak dibandingkan pada pileg. Diantara ulama sendiri kerap terjadi perbedaan dalam memberi dukungan kepada calon-calon yang ada, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu hubungan baik diantara sesama ulama yang ada di Polman.

Syamsul Mahmud, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Polman menuturkan, Partai Golkar biasanya bekerjasama dengan ulama atau tokoh agama lokal ketika menggelar pengajian atau Safari Ramadhan. Pada kegiatan tersebut,

---

<sup>120</sup>M. Armin Arsyad dan M. Basyir Syam, "Preferensi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah di Majene dalam Pemilu Kabupaten Majene 2011, dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol XIV No 1, Tahun 2014, h.44-52.

<sup>121</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

ulama menyampaikan pesan-pesan dakwah, namun tetap menjaga integritasnya sebagai seorang tokoh agama, sehingga materi pengajian atau dakwah yang disampaikan lebih bersifat tema keagamaan tanpa menyinggung politik secara langsung termasuk ajakan memilih Partai Golkar.<sup>122</sup> Mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam atau Safari Ramadhan juga kerap dilakukan oleh para ulama atau tokoh agama lokal tanpa memandang partai apa yang mengundangnya untuk mengisi acara. Karena pada prinsipnya, sebagai ulama bekerjasama dengan siapa saja demi menyampaikan pesan dakwah kepada umat.<sup>123</sup>

Menurut Munawir Arifin, selaku Komisioner KPU Polman, selalu ada perbedaan pola komunikasi dan strategi politik ulama dibandingkan politisi lainnya di lapangan. Fakta di lapangan menurut Munawir menunjukkan bahwa memang semua strategi dapat dilakukan oleh siapapun namun terdapat perbedaan baik jaringan, wacana dalam kontestasi termasuk ketika menawarkan ide tentu berbeda antara ulama dan bukan ulama. Gagasan-gagasan keagamaan yang cukup kental dilihat dari visi misi yang dibawah ulama karena secara umum ulama juga mengembang visi misi yang bersifat umum seperti pendidikan, kesehatan dst juga menjadi bagian dari aspirasi ulama. Namun secara khusus peran kontestasi ulama pasti cenderung keagamaan. Sebagai penyelenggara pemilu di Polman, melihat bahwa ulama yang terlibat dalam kontestasi politik di Polman sangat taat pada aturan main sesuai dengan yang digariskan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku.<sup>124</sup> Hal senada juga diakui oleh Komisioner Bawaslu Sulbar, Fitriela Patonangi, bahwa

<sup>122</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali .

<sup>123</sup>Wawancara Ustaz Rudi Tarenre, tanggal 12 Desember 2019 di Lampko.

<sup>124</sup>Wawancara Munawir Arifin, tanggal 28 Desember 2019 di Polewali

ulama yang terlibat dalam politik praktis sangat taat terhadap aturan kepemiluan yang berlaku.<sup>125</sup>

Peran tidak langsung lainnya secara politik ulama di Polman adalah dengan memberikan masukan kepada politisi atau pemerintah terkait kebijakan atau langkah-langkah strategis yang diambil demi kepentingan rakyat. Sebagaimana yang dituturkan oleh KH.Syahid Rasyid (Ketua MUI Polman), peran strategis ulama sebagai mitra pemerintah (*umara*) harus senantiasa diefektifkan agar terjadi sinergitas antara dua elemen kekuatan tersebut (agama dan politik) demi mencapai kemaslahatan bersama rakyat Polman.<sup>126</sup>

Menurut H. Sa'dong Bani, pemerintah masih minim dalam melibatkan ulama dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah baru berkonsultasi dengan ulama jika berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan, padahal tidak sedikit juga ulama di Polman yang mengerti persoalan-persoalan sosial.<sup>127</sup> Hal yang sama juga diakui oleh Fadhl al-Mahdali, bahwa pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan di Polman masih sangat minim, namun bukan berarti sama sekali tidak ada pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Menurut Fadhl, Seharusnya ulama dilibatkan dan disesuaikan dengan keahlian seorang ulama, namun perlu dipahami bahwa ulama-ulama kita banyak yang ahli dalam hal-hal sosial bukan hanya hal-hal keagamaan, terkadang pemerintah tidak mampu membaca ini sehingga cenderung pemerintah hanya melibatkan ulama jika membahas masalah-masalah keummatan.<sup>128</sup> Pelibatan ulama hanya berkenaan dengan hal-hal keagamaan juga dibenarkan oleh KH. Syahid Rasyid, menurutnya pemerintah cenderung menganggap bahwa ulama

<sup>125</sup> Wawancara Fitrinela Patonangi, tanggal 26 Januari 2020 di Wonomulyo

<sup>126</sup> Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>127</sup> Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

<sup>128</sup> Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali, tanggal 19 November 2019 di Campalagian

hanya mengetahui masalah-masalah keagamaan saja.<sup>129</sup> Sedangkan menurut Ustaz Rudi Tarenre, pemerintah cenderung hanya melibatkan ulama yang seide atau mendukung kebijakan pemerintah, sehingga ulama hanya cenderung menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah daerah.<sup>130</sup> Semua informan dalam penelitian ini mengakui bahwa peran politik ulama masih sangat tidak signifikan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pada skala daerah. Dengan demikian, pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan public di Polman masih sangat minim dan terbatas, sehingga peran politik ulama dalam hal ini masih sangat kurang maksimal.

## 2. *Komunikasi dan Strategi Politik Ulama*

Dalam memainkan peran-peran politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu saja tidak lepas dari komunikasi dan strategi politik yang dimainkan oleh para ulama. Status keulamaan merupakan satu modal sosial yang dapat secara signifikan berpengaruh dalam elektoral jika dimanfaatkan secara strategis oleh ulama maupun oleh calon yang menggunakan ulama sebagai *proxy* politiknya. Komunikasi dan strategi politik juga menjadipenting bukan hanya berkenaan dengan suksesi politik. Namun, yang lebih substantif dari itu adalah bagaimana ulama memainkanperannya sebagai tokoh agama dalam memberikan masukan dan kritik kepada pemangku kekuasaan baik di tingkat eksekutif maupun yudukatif. Komunikasi dan strategi politik tentu saja penting untuk diperhatikan agar saran dan kritik yang disampaikan oleh ulama dapat didengar dan dilaksanakan oleh para pemangku kekuasaan, khususnya di Polman.

Status keulamaan merupakan modal sosial yang sangat efektif guna meraih dukungan elektoral. Seperti yang dituturkan oleh FitriNELA Patonangi, Anggota

<sup>129</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>130</sup>Wawancara Ustaz Rudi Tarenre, tanggal 12 Desember 2019 di Lampko.

Bawaslu Sulbar, bahwa Polman merupakan salah satu wilayah yang memiliki budaya agama yang tinggi dalam hal ini Islam. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi psikologi pemilih untuk lebih cenderung kepada ulama, meski harus diakui masih banyak variabel politik lainnya yang masih tetap perlu diperhatikan karena pengaruhnya juga signifikan. Namun, diakui bahwa untuk konteks Polman, ulama masih cukup berpengaruh bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.<sup>131</sup>

Munawir Arifin, Anggota KPU Polman berpandangan bahwa status keulamaan pengaruhnya sangat besar dalam kaitannya dengan raihan elektoral. Menurutnya pengaruh Ulama cukup besar karena memiliki basis yang jelas, seperti AGH. Syibli yang memiliki basis jamaah tarekat Qadiriyyah, latar belakang organisasinya jelas dari NU apalagi memiliki kampus dengan basis mahasiswa yang cukup besar. Dengan demikian, pengaruhnya cukup besar kadekatan dengan massa bawah yang memiliki ikatan bathin dan ikatan kultural dengan sosok ulama yang menurut mereka cukup kharismatik.<sup>132</sup> Status keulamaan menurut seorang penggiat demokrasi di Polman, Husain Bande pengaruhnya akan besar seiring dengan besarnya basis jamaah serta kharisma ulama tersebut. Hal inilah kenapa ulama tarekat lebih memungkinkan mendapat dukungan elektoral dibandingkan sekadar ulama fikih atau seorang muballigh biasa. Itu pula sebabnya dalam setiap suksesikepala daerah yang lebih didekati oleh para kandidat untuk memberikan dukungan adalah para ulama atau pimpinan tarekat. Hal ini karena mereka memiliki basis jamaah yang jelas dan kharsma spiritual di mata jamaahnya yang membuat

---

<sup>131</sup>Wawancara Fitrinela Patonangi, tanggal 26 Januari 2020 di Wonomulyo

<sup>132</sup>Wawancara Munawir Arifin, tanggal 28 Desember 2019 di Polewali

jamaah akan patuh pada apa pun instruksi politik yang disampaikan oleh ulama atau pimpinan tarekat tersebut.<sup>133</sup>

Mas'ud Saleh mengkritik model komunikasi ulama yang menurutnya masih sangat konvensional. Bentuk komunikasinya masih sangat tradisional, masih konvensional dalam bentuk tatap muka. Semestinya ulama sudah berinovasi dalam melakukan komunikasi politik sesuai dengan zaman milenial saat sekarang ini. Mestinya ulama-ulama yang ingin masuk ruang-ruang public, termasuk ruang politik ikut memanfaatkan tren medsos dalam konteks dakwahnya.<sup>134</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Husain Bande, seorang penggiat demokrasi, bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam komunikasi politik ulama, bukan hanya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik praktis. Namun, juga komunikasi politik ulama dengan pemerintah sehingga peran ulama lebih bisa maksimal dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis dalam skala daerah.<sup>135</sup>

Pola komunikasi politik yang masih sebatas menggunakan pola komunikasi dakwah diakui oleh Sa'dong Bani dan Fadhl al-Mahdali, dua sosok ulama yang terlibat dalam dunia politik praktis. Menurut Fadhl, media komunikasi politik yang digunakan adalah dakwah. Melalui mimbar dakwah beliau mencoba meyakinkan publik bahwa ulama layak untuk masuk dalam kontestasi politik. Karena media komunikasi politik yang dibangun adalah mimbar dakwah, menurutnya tetap memisahkan posisi dirinya sebagai dai dan politisi, dengan penekanan yang lebih pada posisi dan statusnya sebagai seorang dai. Sehingga beliau akan tetap berhati-hati dalam penyampaian, gaya, maupun konten komunikasinya, karena Ahmad Fadl

<sup>133</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

<sup>134</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>135</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

sadar bahwa sejatinya dirinya adalah seorang dai bukan seorang politisi, oleh karenanya dalam komunikasi mimbar beliau senantiasa berhati-hati.<sup>136</sup> Gaya dan konten komunikasi yang khas dari ulama menurut Ustaz Rudi Tarenre adalah senantiasa berbicara dengan membawa nilai-nilai ke ulamaan, sehingga ketika bertemu dengan masyarakat pasti menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya adalah ulama.<sup>137</sup>

Sa'dong Bani juga mengakui tidak adanya pola atau gaya komunikasi yang khusus dalam komunikasi politiknya dengan masyarakat. Baginya ulama dalam dunia politik karakternya tidak boleh berubah, cara komunikasi tetap menjaga pesan-pesan dakwah. Dengan demikian, tidak menggunakan strategi komunikasi yang khusus.<sup>138</sup> Gaya komunikasi yang masih cenderung bersifat konvensional membuat beberapa ulama yang mencoba masuk dalam dunia politik praktis masih kurang memperoleh dukungan elektoral dalam mensukseskan dia untuk lolos sebagai seorang legislator. Dua ulama yang ikut berkontestasi dalam pileg 2019 untuk DPRD Kabupaten Polman, yaitu Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali dan Mahyuddin Mahdy gagal lolos sebagai seorang legislator dan hanya memperoleh dukungan suara yang sangat minim. Itu sebabnya menurut Husain Bande, ulama yang ingin masuk dalam dunia politik praktis harus berinovasi dalam komunikasi politiknya dengan memaksimalkan semua media komunikasi, termasuk dengan memanfaatkan secara optimal media komunikasi digital seperti media sosial.<sup>139</sup>

Sa'dong Bani dan Fadhl al-Mahdali juga menyatakan tidak ada strategi khusus ketika terlibat dalam politik praktis. Menurut Sa'dong Bani, cenderung tidak

---

<sup>136</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali, tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>137</sup> Wawancara Ustaz Rudi Tarenre 12 Desember 2019 di Lampko.

<sup>138</sup> Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

<sup>139</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali



menggunakan strategi khusus, karena menurutnya masyarakat sudah sangat paham latar belakang dan karakter pribadinya sebagai seorang tokoh agama. Beliau melanjutkan sebagai ulama beliau begitu dekat dengan masyarakat sehingga tidak begitu sulit dalam menyusun strategi khusus.<sup>140</sup> Hal yang sama disampaikan oleh Fadhl al-Mahdali, menurutnya tidak memiliki strategi khusus, lebih bersikap *enjoy* saja dengan kondisi masyarakat. Prinsip politiknya, yang harus ditekankan adalah bagaimana menjaga personalitas agar tidak keluar dari nilai-nilai moralitas serta menjaga sikap sosial.<sup>141</sup>

Strategi dan komunikasi politik dalam peran politik ulama dalam mensukseskan seorang calon tertentu, khususnya dalam pilkada tampaknya lebih efektif dalam mencapai target politik. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamamd dalam penelitiannya tentang pengaruh Tarekat Qadiriyyah dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2006. Menurut Muhammad, dalam upaya untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub Sulbar, Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi, Tarekat Qadiriyyah secara umum melakukan dua jenis strategi, yaitu perjuangan di Internal jamaah maupun perjuangan di eksternal jamaah atau kepada masyarakat secara luas. Perjuangan di internal komunitas jamaah tarekat dilakukan oleh elemen tarekat itu sendiri dengan mensosialisasikan tujuan Tarekat Qadiriyyah yang terlibat untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Sulbar sekaligus memaksimalkan dukungan dari internal komunitas tarekat dengan melakukan konsolidasi internal. Peran tokoh atau pemimpin tarekat sangat strategis dalam memengaruhi kecenderungan memilih di internal jamaah. Perjuangan di eksternal komunitas jamaah tarekat dilakukan sebagai upaya yang dilakukan oleh seluruh

---

<sup>140</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

<sup>141</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

elemen tarekat Qadiriyyah yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, sehingga memungkinkan untuk dapat mendulang massa dan elektoral bagi kemenangan pasangan calon Anwar Adnan Saleh -Amri Sanusi. Elemen tarekat yang dimaksud secara garis besar dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu imam mesjid, pejabat/mantan pejabat atau birokrat, politisi dan pengusaha.<sup>142</sup>

Bercermin dari strategi politik komunitas Tarekat Qadiriyyah dalam suksesi Pilkada Gubernur Sulbar tersebut menunjukkan komunikasi dan strategi politik yang cukup efektif dalam mencapai tujuan politiknya. Hal ini dimungkinkan karena besarnya populasi jamaah Tarekat Qadiriyyah di seluruh Sulbar, utamanya di Polman dan Majene. Hal ini membuat pada setiap suksesi kepala daerah baik pada level kabupaten maupun provinsi, komunitas Tarekat Qadiriyyah senantiasa dilirik sebagai sumber pendulang suara yang cukup signifikan. Komunikasi dan strategi politik politik yang dibangun juga terbilang cukup mudah karena berbagai elemen dari Tarekat Qadiriyyah, utamanya pimpinan atau *mursyid* tarekat memiliki kharisma yang penyampaianya diterima secara taklid oleh jamaahnya. Demikian pula dalam strategi dan komunikasi politik di eksternal jamaah, banyaknya elemen tarekat yang menjadi tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing memungkinkan strategi dan komunikasi politik yang dilakukan dapat berhasil secara efektif guna mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh Tarekat Qadiriyyah.

Berkenaan dengan pengambilan dan penetapan kebijakan public oleh pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif. Ulama di Polman masih kurang efektif dalam melakukan strategi dan komunikasi politik guna memengaruhi

---

<sup>142</sup>Muhamamd, "Peran Tarekat Qadiriyyah dalam Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat...", h. 15.

kebijakan public yang akan diambil oleh pemerintah. Menurut Fitrinela Patonangi, ulama masih cenderung bersikap tradisional dalam menyikapi berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, baik pada tataran eksekutif maupun legislatif. Kedua elemen pemerintah tersebut sangat minim dalam melibatkan ulama pada setiap pengambilan kebijakan daerah. Sedangkan di pihak ulama sendiri cenderung lebih banyak bersifat pasif, jika pun melakukan penyikapan tidak disertai dengan strategi dan komunikasi politik yang khusus sehingga dapat memengaruhi arah kebijakan yang akan diambil.<sup>143</sup> Hal yang sama juga diakui oleh Husain Bande, bahwa strategi dan komunikasi politik ulama di Polman masih banyak yang perlu dibenahi agar menjadi mitra sejajar dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan daerah demi kemaslahatan masyarakat Polman.<sup>144</sup>

### ***C. Pengaruh Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar***

Arah penelitian ini pada dua hal, yaitu melihat ulama dan politik di Polman baik sebagai politisi yang terjun dalam politik praktis, juga pada upaya ulama menjadi mitra strategis pemerintah. Sehingga penelitian ini selain mengulas kiprah politik ulama dalam kontestasi politik praktis, baik visi, strategi dan komunikasi politiknya. Penelitian ini juga mengulas peran ulama dalam konteks lokal Polman dalam kaitannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan public.

#### ***1. Pengaruh dalam Suksesi***

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap suksesi peran ulama tidak bisa diabaikan dalam mendulang dukungan elektoral bagi calon tertentu.

---

<sup>143</sup>Wawancara Fitrinela Patonangi, tanggal 26 Januari 2020 di Wonomulyo

<sup>144</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

Posisi utama yang cukup strategis dalam sosio-kultur masyarakat Sulbar dan khususnya masyarakat Polman membuat para kandidat menjadikan ulama sebagai salah satu *proxy* politiknya. Hal ini terbukti dalam beberapa pilkada baik bupati maupun gubernur, demikian pula dalam pemilihan calon anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR-RI dan DPD-RI.

Menurut Sa'dong Bani, posisi strategis ulama sangat efektif dalam meningkatkan elektoral seorang kandidat, karena posisi ulama yang sangat dekat dengan masyarakat dan biasanya masyarakat masih menjadikan ulama sebagai referensi mereka dalam memilih kandidat pada setiap pemilihan.<sup>145</sup> Menurut Fadhl al-Mahdali dalam mendukung kandidat pada sebuah pemilihan, ulama menyampaikan ciri-ciri seorang calon dan hal ini sangat besar pengaruhnya. Intinya menurut Fadhl, ulama sangat efektif dalam mendulang suarabagi kandidat tertentu, karena ulama dekat sama tokoh agama dan masyarakat pada umumnya.<sup>146</sup> Menurut KH. Rusdi Syahid ulama pasti berpengaruh dalam meningkatkan electoral kandidat yang didukungnya. Hal ini karena kondisi masyarakat di Polman yang masih sangat menghormati ulama. Keluarga ulama saja sangat berpengaruh apalagi ulama tersebut yang langsung terjun dan hal tersebut menurut dia sah-sah sepanjang tidak melanggar aturan.<sup>147</sup>

Syamsul Mahmud selaku Ketua Golkar Polman menyatakan hal yang sama bahwa peran ulama sangat efektif dalam mendulang dukungan elektoral bagi kandidat yang didukungnya. Jika ada ulama yang terjun ke lapangan untuk mendukung seseorang pasti banyak orang yang siap membelanya, menurutnya,

<sup>145</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

<sup>146</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>147</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

bahkan pernyataan ulama saja dalam bentuk tulisan untuk mendukung seorang calon akan dibagikan ke masyarakat. Menurut Syamsul, kharisma ulama masih sangat kuat di Polman, bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika ada kegiatan ulama senantiasa dilibatkan. Oleh karenanya, posisi dan kharisma ulama ini sangat penting dalam mendulang dukungan politik dari masyarakat.<sup>148</sup>

Menurut Mukhsin, Sekertaris PDI-P Polman, kharisma ulama sangat berperan penting dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, meski persentasinya berbeda-beda tergantung besaran pengaruh dan jamaah yang dimiliki oleh ulama tersebut. Hal inilah yang membuat ulama Tarekat jauh lebih berpengaruh dibandingkan ulama lainnya, karena kharisma ulama tarekat serta kepatuhan jamaahnya jauh lebih tinggi dibandingkan ulama lainnya.<sup>149</sup> Menurut Mas'ud Saleh, posisi ulama cukup strategis dan diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Polman. Dari pengakuannya bahwa tingginya suara yang diperoleh sebagai seorang pendatang baru pada Pemilihan Calon Anggota DPD, khususnya di Polman tidak lain karena pengaruh ulama yang mendukungnya. Kemenangan Jokowi dua periode di Polman dan di Sulbar secara umum, menurutnya tidak lepas dari dukungan dari ulama tradisional di Tanah Mandar. Apalagi ketika pencalonan Jokowi untuk kedua kalinya yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin membuat solid kalangan ulama tradisional di Mandar untuk mendukung pasangan calon tersebut.<sup>150</sup>

Pernyataan Mas'ud Saleh senada dengan yang disampaikan oleh Husein Bande dan Fitri Nela Patonangi. Menurut Husain Bande, Secara efektif dukungan ulama sebagai tim sukses sangat signifikan pengaruhnya dalam mendulang elektoral.

---

<sup>148</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali .

<sup>149</sup>Wawancara Mukhsin F, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

<sup>150</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

Hal ini karena karakter psikologi pemilih Polman khususnya pada wilayah tertentu masih menjadikan ulama sebagai tempat mereka merujuk dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan politik dan yang paling berpengaruh dari semua kategori ulama adalah ulama tarekat, khususnya Tarekat Qadiriyyah yang paling banyak jamaahnya di Polman. Meski secara internal Tarekat Qadiriyyah mengalami firksi internal, namun dukungan tokoh-tokoh atau *mursyid* Tarekat Qadiriyyah masih sangat efektif dalam memengaruhi kecenderungan dan preferensi pemilih.<sup>151</sup> Fitrinela Patonangi juga sependapat dengan Husain Bande, bahwa secara psikologi pemilih yang masih banyak bercorak tradisional, memungkinkan kandidat yang didukung oleh ulama memperoleh dukungan lebih banyak dari kandidat yang kurang mendapat dukungan dari ulama.<sup>152</sup>

Menilik dari beberapa suksesi pilkada baik pilbup maupun pilgub, menunjukkan kecenderungan kandidat berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari para ulama, utamanya dari ulama yang memiliki pengaruh dan basis massa yang besar. Secara politik ini adalah hal yang wajar, karena kepentingan politisi adalah untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya demi mendapatkan kemenangan dalam pemilihan. Pendekatan kultural dilakukan dengan tokoh ulama utamanya yang kharismatik, seperti dalam kasus pilkada gubernur Sulbar 2006 yang dimenangkan oleh pasangan calon Anwar Adnan Saleh-Amri Sanusi. Kemenangan pasangan calon Anwar-Amri tersebut, tak lepas dari dukungan penuh jamaah Tarekat Qadiriyyah pimpinan AGH. Ilham Saleh yang secara total bekerja untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Dalam upaya memenangkan kandidat gubernur yang didukungnya, seluruh elemen Tarekat

<sup>151</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

<sup>152</sup>Wawancara Fitrinela Patonangi, tanggal 26 Januari 2020 di Wonomulyo

Qadiriyyah bekerja secara penuh baik di internal maupun eksternal komunitas jamaah Tarekat Qadiriyyah.<sup>153</sup>

Signifikansi pengaruh dukungan ulama dalam mensukseskan kandidat kepala daerah bahkan calon presiden yang didukungnya di Polman masih belum berbanding lurus dengan kesuksesan ulama yang terjun secara langsung dalam dunia politik praktis di Polman. Hingga penelitian ini dilakukan, setidaknya hanya AGH. Syibli Shahabuddin sebagai seorang ulama yang berhasil terpilih karena memanfaatkan status keulamannya. AGH. Syibli Shahabuddin berhasil lolos dua periode sebagai senator di DPD-RI mewakili Provinsi Sulbar. Hanya saja pada peruntungan yang terakhir sebagai caleg DPR-RI ia gagal memperoleh suara maksimal untuk lolos ke Senayan. Dengan demikian, peran politik ulama dalam mensukseskan dirinya sendiri sebagai kandidat masih belum optimal dibandingkan ketika ulama tersebut berpartisipasi sebagai tim sukses dari kandidat tertentu. Hal ini tentu saja menjadi perhatian menarik, mengingat minimnya jumlah ulama atau tokoh agama yang bertarung secara langsung dalam kancah politik praktis sangat sedikit. Namun, dengan berdasar pada hasil pileg 2019 takada satu pun kandidat yang berlatar belakang ulama yang sukses mendulang suara yang signifikan sehingga berhasil lolos sebagai legislator.

Menurut Mas'ud Saleh, hal ini dikarenakan pola komunikasi dan strategi politik ulama tersebut yang masih sangat konvensional dan tradisional. Sedangkan era politik sekarang menuntut pola strategi dan komunikasi politik yang sesuai dengan era milenial. Menurut Mas'ud, hal ini menjadi pelajaran ke depannya, khususnya pada suksesi 2024. Ulama yang berniat maju sebagai calon legislatif atau

---

<sup>153</sup>Lihat Muhamamd, "Peran Tarekat Qadiriyyah dalam Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat...", h. 14-26.

calon kepala daerah harus mempersiapkan diri dengan matang serta ditunjang dengan pola strategi dan komunikasi politik yang sesuai dengan zaman dengan memanfaatkan semua saluran teknologi informasi dan komunikasi. Dukungan financial juga menurut Mas'ud menjadi salah satu faktor kegagalan calon dari kalangan ulama, karena dalam politik menurutnya memestikan adanya *cost* atau biaya politik yang tidak sedikit. Untuk mentaktisi hal tersebut, sebenarnya ulama akan lebih mudah dengan memanfaatkan potensi jamaah serta dengan dukungan manajemen tim yang lebih professional dalam mensukseskan ulama tersebut sebagai calon yang terpilih. Menurut Mas'ud, ulama yang telah memilih mauk dalam kancah politik praktis harus siap dengan segala inovasi yang tidak sekedar konvensional dan tradisional dengan tentu saja tetap mempertahankan prinsip, nilai, dan integritasnya sebagai seorang ulama panutan umat.<sup>154</sup>

## 2. *Pengaruh dalam Pengambilan Kebijakan*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah dalam skala daerah, peran ulama di Polman masih terbilang sangat minim. Pertimbangan ulama hanya diminta jika terkait kebijakan yang berkenaan dengan keagamaan, misalnya seperti Peraturan Bupati (perbup) tentang zakat. Menurut Ustaz Rudi Tarenre, ada kecenderungan saat ini bahwa pelibatan ulama oleh pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan hanya melibatkan ulama yang dianggap pro pemerintah saja. Dirinya selama ini tidak pernah dipanggil atau diundang untuk membahas kebijakan-kebijakan pemerintah karena dianggap sebagai ulama yang tidak pro terhadap pemerintah.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>155</sup> Wawancara Ustaz Rudi Tarenre 12 Desember 2019 di Lampko.



Menurut AGH. Syahid Rusdi selaku Ketua MUI Polman, pemerintah pada dasarnya ingin melibatkan ulama dalam pengambilan kebijakan. Namun, pelibatan terseut, hanya sebatas yang berkaitan dalam masalah agama, kalau masalah lainnya menurut Syahid, mungkin pemerintah menganggap bahwa ini bukan keahlian ulama.<sup>156</sup> Hal ini yang dikritik oleh Fadhl al-Mahdali, pelibatan ulama oleh pemerintah yang masih hanya sebatas persoalan kebijakan yang berkenaan dengan agama, padahal keahlian ulama di Polman tidak hanya sebatas menguasai persoalan keagamaan, tak sedikit ulama di Polman yang juga menguasai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Namun, pemerintah sepertinya masih menganggap bahwa kewenangan ulama hanyalah sebatas soal-soal yang berkenaan dengan keagamaan saja.<sup>157</sup>

Kritikan terhadap kurangnya pelibatan ulama oleh pemerintah juga disampaikan oleh Mas'ud Saleh. Menurut Mas'ud pelibatan ulama masih sangat kurang, padahal seharusnya menurut Mas'ud, kalau kita baca sejarah, maka kita akan mengenal konsep *mara'dia* dan *puangkali* antara *syara'* dan adat. Hal ini ada sebelum negara terbentuk, bahwa dulu seluruh kebijakan publik melibatkan tokoh-tokoh *puangkali* dan *puang masigi* yang sekarang kita istilahkan dengan kiai atau *annangguru* (ulama). Jika kondisi hari ini, Mas'ud menilai kurang dilibatkan. Ada hal yang keliru menurut Mas'ud, yaitu nanti ketika ada bencana atau ada masalah besar baru melibatkan ulama-ulama untuk dimintai pertimbangan. Padahal, jika sekiranya ulama dilibatkan lebih jauh, pasti akan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, apalagi karena masyarakat Polman yang umumnya masih

---

<sup>156</sup> Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>157</sup> Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

sangat menghormati ulama.<sup>158</sup> Penuturan yang sama disampaikan oleh Syamsul Mahmud selaku Ketua Golkar Polman. Menurutnya bisa dipastikan ulama akan sangat berpengaruh jika sekiranya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Namun, masalahnya seperti yang disebutkan sejak awal bahwa ulama jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan public oleh pemerintah baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.<sup>159</sup>

H. Sa'dong Bani sebagai orang yang pernah berada di pemerintahan pun mengakui, bahwa pemerintah daerah cenderung masih menganggap bahwa ulama hanya menguasai bidang keagamaan saja. Padahal yang perlu dipahami menurut Sa'dong bahwa ulama di Polman juga banyak yang ahli dalam hal-hal sosial bukan hanya hala-hal keagamaan, terkadang pemerintah tidak mampu membaca ini sehingga cenderung pemerintah hanya melibatkan ulama jika membahas masalah-masalah keummatan.<sup>160</sup>

Menurut penuturan AGH. Syahid Rusdi, selama menjadi ketua MUI kurang lebih tiga bulan, sudah dua kali diundang oleh pemerintah kabupaten untuk membicarakan Perbup yang berkaitan masalah zakat dan pemberian beasiswa terhadap pelajar yang berprestasi hafal Al-Qur'an dan santri penghafal kitab gundul atau kitab kuning. Melalui kesempatan tersebut, selaku Ketua MUI Kabupaten, Syahid menyampaikan atau memberikan masukan terkait hal yang dibahas tersebut. Dalam persoalan ini, bupati tidak mau jika tidak melibatkan ulama atau tokoh agama dalam memutuskan atau merumuskan kebijakan publik yang berkenaan dengan keagamaan. Menurutnya hal ini sangat bagus, jika dalam setiap merumuskan

<sup>158</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>159</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali .

<sup>160</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

kebijakan publik ulama dilibatkan sebagai mitra pemerintah dan bukan hanya pada masalah agama, melainkan ulama dilibatkan dalam penentuan kebijakan terkait masalah-masalah sosial lainnya.<sup>161</sup>

Analisis lain disampaikan oleh Husain Bande, seorang penggiat demokrasi di Polman. Menurut Husain, pemerintah daerah tidak melibatkan ulama dalam hal pengambilan kebijakan daerah diluar masalah-masalah keagamaan, bukan karena ulama yang ada di Polman tidak memiliki kapasitas untuk itu. Melainkan pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif yang tidak mengetahui kapasitas ulama di luar bidang keagamaan, karena ulama yang ada di Polman belum atau tidak menunjukkan kapasitasnya di luar bidang keagamaan sehingga pemerintah tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tugas organisasi kemasyarakatan untuk memberikan “panggung” kepada ulama di Polman untuk membincang persoalan-persoalan sosial masyarakat, khususnya di daerah, sehingga pemerintah mengetahui kapasitas dari ulama tersebut.<sup>162</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pengaruh ulama di Polman dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah masih terbatas hanya pada persoalan keagamaan. Dengan demikian, dari segi pengaruh, pelibatan ini tentu masih sangat minim dari yang semestinya peran ulama sebagai mitra pemerintah selaku *umara*. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dengan membangun komunikasi politik kepada pemerintah secara intensif, agar pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dapat lebih ditingkatkan dan tidak sebatas hanya pada persoalan keagamaan saja.

---

<sup>161</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>162</sup>awancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali..

Dua ulama yang telah disebutkan sebelumnya sebagai representasi ulama Polman yang pernah sukses dalam dunia politik, yaitu KH. Syibli Shahabuddin dan H. Zainal Abidin namun belum dapat berbuat banyak dalam hal prestasi pada penentuan kebijakan yang strategis. Kewenangan institusi DPD RI tempat KH. Syibli menjadi senator selama dua periode yang sangat minim, membuat Syibli tidak bisa berbuat banyak dalam penentuan kebijakan yang strategis. Sebab itulah yang membuat Syibli pada Pileg 2019 mencoba maju sebagai calon legislator DPR-RI, dengan motivasi bisa lebih mampu berbuat banyak dalam penentuan kebijakan yang bersifat strategis termasuk kontribusinya untuk daerah Polman dan Sulbar. Namun, upaya Syibli untuk masuk ke Senayan melalui pintu DPR-Ri harus gagal karena suara partai yang dipimpinnya tak mencukupi.<sup>163</sup>

### 3. *Faktor Pendukung dan Penghambat*

Berdasarkan jawaban dari beberapa narasumber, peneliti merangkum pandangan mereka terkait faktor pendukung dan penghambat kiprah ulama dalam konstalasi politik maupun pengambilan kebijakan di Polman. Menurut Sa'dong Bani yang menjadi faktor pendukung kiprah ulama dalam konstalasi politik di Polman adalah keahlian beberapa ulama dalam segala bidang, termasuk pengalaman sebagai sebuah keahlian dalam memanaj suatu masalah. Beberapa ulama di Polman tidak hanya memiliki kapasitas atau keahlian dalam hal keagamaan saja, hal inilah yang menjadi modal bagi mereka untuk terjun ke dunia politik. Meski harus diakui tidak semua ulama yang memiliki kemampuan tersebut.<sup>164</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Fadhl al-Mahdali, bahwa kemampuan, analisis dan pengalaman ulama menjadi faktor pendukung, yang dalam

<sup>163</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>164</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali.

istilah analisis SWOT hal tersebut adalah *stong* atau kekuatan bagi ulama tersebut untuk terjun dalam kontestasi politik praktis. Fadhl juga mengakui bahwa kapasitas tersebut belum dimiliki oleh semua ulama atau tokoh agama di Polman. Namun, ada beberapa ulama yang pada dasarnya sudah menunjukkan kemampuan tersebut, seperti AGH. Syibli Shahabuddin dan beberapa ulama yang lain meski dengan tingkat kualifikasi yang berbeda.<sup>165</sup>

AGH. Syahid Rusdi menyatakan faktor pendukung kiprah ulama dalam kontestasi politik di Polman adalah semangat dari ulama tersebut untuk melakukan perubahan masyarakat dan daerah ke arah yang lebih baik dengan berbasis dari spirit nilai-nilai keagamaan. Dibandingkan politisi biasa yang bukan ulama, tentu ulama yang politisi dengan bekal pengetahuan keagamaan yang ia miliki mejadi modal tersendiri bagi dalam berkecimpung di dunia politik praktis. Tentu saja ini tidak cukup, dibutuhkan keahlian di bidang manajerial dan kematangan psikologi dalam dunia politik praktis. Namun, menurut Syahid, semangat yang berbasis spirit dan nilai-nilai keagamaan merupakan nilai plus bagi seorang politisi yang berlatar belakang ulama dibandingkan politisi yang sama sekali tidak berlatar belakang ulama<sup>166</sup>

Mas'ud Saleh memandang ada dua faktor utama yang mendukung ulama berkiprah dalam kontestasi politik. Pertama faktor personal, yang berkenaan dengan siapa ulama itu?, dan yang kedua adalah faktor yang bersifat sosial. Faktor sosial yang dimaksud adalah sejauh mana ulama tersebut memiliki basis jamaah yang kuat dan jejaring yang luas. Menurut Mas'ud, ada variabel penting di Polman, bahwa secara personal ulama itu anak siapa, ada *tracking* nasab atau garis keturunan dan

<sup>165</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>166</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

faksum sosialnya. Sehingga ulama yang memiliki trah ulama cenderung memiliki kekuatan charisma dan basis dibandingkan orang yang status keulamaannya tidak ditunjang dengan trah atau nasab.<sup>167</sup>

Dua orang politisi parpol yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini, yaitu Syamsul Mahmud selaku Ketua Golkar Polman dan Mukhsin F selaku sekretaris PDI-P Polman sama-sama menyebut basis elektoral ulama sebagai faktor pendukung kiprah ulama dalam kontestasi politik. Syamsul memberi penekanan padacharisma secara personal yang dimiliki oleh seorang ulama. Sebagaimana Mas'ud, Syamsul juga menekankan faktor nasab juga sebagai variabel yang penting dalam menunjang charisma seorang ulama di tengah masyarakat dan berefek pada kepatuhan masyarakat terhadap ulama tersebut. Akhirnya menurut Syamsul, hanya ulama-ulama tertentu saja yang bisa sampai pada taraf ini, yaitu status keulamaan yang ditunjang dengan charisma dan dukungan nasab dari orang tua atau kakek yang juga seorang ulama.<sup>168</sup>

Hampir senada dengan Syamsul, Mukhsin menekankan basis elektoral sebagai faktor pendukung. Dalam konteks Polman, ulama merupakan salah satu elemen sosialdan katup elit lokal yang memiliki wibawa dan pengaruh sehingga berdampak langsung pada kuanttas elektoral dari para jamaah atau para pengikutnya. Apalagijika ulama tersebut adalah seorang ulama Tarekat yang memiliki charisma di tengah masyarakat, maka pengaruh elektoralnya akan lebih tinggi lagi. Keberadaan basis elektoral menjadi faktor pendukung, namun menurut Mukhsin, hal tersebut masih belum cukup dalam menunjang kesuksesan ulama dalam ruang politik praktis.

---

<sup>167</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>168</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali .

Oleh karenanya, masih perlu ditunjang dengan beberapa variabel lain, seperti kapasitas ulama yang bersangkutan di bidang politik pemerintahan.<sup>169</sup>

Berkenaan dengan faktor pendukung ulama dalam berkiprah pada pengambilan kebijakan publik, menurut Sa'dong Bani dan Fadhl al-Mahdali, sebagaimana faktor yang mendukung kiprah ulama dalam dunia politik praktis, yaitu kapasitas atau keahlian ulama tersebut, khususnya dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Selain kapasitas yang dimiliki, kharisma ulama yang sangat dipercayai oleh masyarakat sebenarnya menjadi faktor pendukung dalam melibatkan ulama untuk pengambilan kebijakan pada skala daerah. Pemerintah mestinya memanfaatkan kharisma ulama tersebut agar setiap kebijakan yang diambil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tentu saja yang dimaksud bukan sekadar menjadikan ulama sebagai legitimator atas setiap kebijakan, melainkan juga adanya *political will* dari pemerintah untuk benar-benar melibatkan ulama sesuai dengan kapasitas dan keahliannya.<sup>170</sup>

Rudi Tarenre memandang faktor pendukung ulama dalam berkiprah pada pengambilan kebijakan di daerah adalah posisi ulama sebagai “penyambung lidah” umat. Posisi ulama yang begitu dekat dengan umat membuat ulama tersebut paham betul persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Sehingga melibatkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan maupun penyusunan regulasi dalam skala daerah semisa perda dan perbup akan menambah bobot dari kebijakan atau regulasi tersebut karena merepresentasikan aspirasi umat yang diwakili oleh ulama sebagai penyampai aspirasi mereka. Ulama adalah komponen masyarakat yang tau persoalan

---

<sup>169</sup>Wawancara Mukhsin F, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

<sup>170</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali dan Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

yang dihadapi oleh masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan urgen dari masyarakat. Oleh karenanya menurut Rudi, hal tersebut merupakan modal sosial yang menjadi penguat dan pendukung bagi kiprah ulama dalam pengambilan kebijakan pada skala daerah di Polman.<sup>171</sup>

Menurut AGH. Syahid Rusdi kapasitas dan integritas personal seorang ulama menjadi faktor pendukung bagiulama tersebut dalam mengambil peran untuk memengaruhi kebijakan pemerintah daerah yang hendak diputuskan, Menurut Syahid, nilai kharismatik ulama tersebut sebagai orang yang taat pada hukum-hukum syariat, di sisi lain keahlian ulama di segala bidang walaupun dalam hal ini diakui masih sedikit ulama yang memiliki kemampuan seperti itu.<sup>172</sup> Syamsul Mahmud dan Mukhsin F, dua politisi yang menjadi informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa kapasitas ulama khususnya dalam bidang keagamaan menjadi faktor pendukung bagi pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan publik pada skala daerah di Polman. Menurut Syamsul, pemerintah sangat membutuhkan keahlian ulama dalam hal keilmuan, khususnya dalam hal ilmu keagamaan, Halini supaya kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum agama, dan yang paling paham tentang hukum-hukum agama itu adalah ulama. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mukhsin, bahwa kehadiran ulama dalam pengambilan kebijakan public di daerah akan sangat efektif dalam menjadikan kebijakan tersebut sesuai dengan hukum-hukum agama atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan dasar dalam agama.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup>Wawancara Ustaz Rudi Tarenre 12 Desember 2019 di Lampko.

<sup>172</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>173</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali dan Wawancara Mukhsin F, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.



Pada kenyataannya dalam kancah politik praktis di Polman masih sangat sedikit ulama yang terlibat aktif dalam dunia politik praktis secara langsung. Dari sedikitnya ulama yang terlibat dalam dunia politik praktis tersebut dan dengan berdasarkan pada hasil pemilu 2019 tak ada ulama dari Polman yang berhasil lolos sebagai legislator dalam pemilu tersebut. Minimnya pengaruh ulama dalam pengambilan kebijakan di Polman dalam pandangan peneliti berbanding lurus dengan minimnya ulama yang terjun secara langsung dalam dunia politik. Fakta ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengeksplorasi faktor yang menghambat keberhasilan kiprah ulama dalam kontestasi politik praktis di Polman. Beragam tanggapan dari informan dalam penelitian ini tentang faktor penghambat tersebut, namun semuanya berkisar pada faktor personal dan faktor sosial yang menjadi penghambat kiprah ulama tersebut dalam kancah politik praktis di Polman.

Sa'dong Bani menyatakan faktor penghambat bagi kiprah ulama dalam kontestasi politik adalah kurangnya ulama yang memiliki kapasitas dalam persoalan sosial-politik, artinya lebih banyak ulama yang hanya fokus pada persoalan keagamaan *an sich*. Kemampuan manajerial ulama yang memilih terlibat dalam politik praktis juga menyebabkan kurang solidnya basis jamaah untuk mendongkrak elektoral ulama tersebut.<sup>174</sup> Sedangkan AGH. Syahid menyoroti terkait dengan kondisi politik praktis khususnya di Polman yang masih cenderung menghalalkan segala cara. Hal ini membuat ulama yang terlibat tidak bisa menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan oleh politisi karena adanya nilai dan prinsip yang masih dipegang oleh ulama tersebut. Hal ini membuat ulama terhambat dalam melakukan konsolidasi dukungan kepada masyarakat. Pada sisi lain menurut Syahid, ulama

---

<sup>174</sup> Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali

memiliki keterbatasan dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, karena semuanya butuh finansial.<sup>175</sup> Sedangkan Syamsul Mahmud, selaku Ketua Golkar Polman berpandangan bahwa sebenarnya ada beberapa ulama yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk terjun dalam dunia politik praktis, hanya saja ulama tersebut kurang memiliki minat untuk masuk dalam sistem dan hal inilah yang menjadi factor penghambat.<sup>176</sup>

Fadhl al-Mahdali berdasarkan pengalamannya terjun di dunia politik praktis sebagai caleg pada pemilu 2019 menyebutkan faktor penghambat kiprah ulama dalam dunia politik praktis adalah persoalan persepsi masyarakat. Menurut Fadhl, bahwa ada pemahaman sebagian masyarakat di Polman yang menganggap bahwa politik itu kurang baik atau kotor sehingga kurang sepakat jika ulama masuk dalam kontestasi politik dan tentu tidak memilihnya dengan alasan biarlah tetap menjadi seorang ulama. Selain itu masyarakat Polman masih cenderung menyukai sistem *money* politik, yang strategi ini tidak mungkin digunakan oleh ulama.<sup>177</sup> Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Syaifuddin selaku Ketua Bawaslu Polman. Menurut Syaifuddin kondisi masyarakat Polman masih banyak berstatus kelas menengah ke bawah sehingga pengaruh *cost* politik untuk membiayai keberlangsungan politik cukup dominan. Sementara dukungan terhadap ulama adalah semata karena keikhlasan sehingga basis massa para ulama cenderung tidak terjaga dengan baik karena kurangnya financial untuk menjaga basis tersebut.<sup>178</sup>

Sementara Mas'ud Saleh dalam memaparkan faktor penghambat kiprah politik ulama dalam dunia politik praktis dengan memberi dua batasan.

---

<sup>175</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

<sup>176</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali

<sup>177</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>178</sup>Wawancara Syaifuddin, tanggal 25 Januari 2020 di Polewali.

Pertama ulama sebagai aktor politik dan kedua ulama sebagai faktor politik. Ulama yang masuk dalam struktur politik baik sebagai tim sukses, kekuasaan, calon, caleg menjadikan dirinya sebagai aktor. Tapi ulama-ulama yang tidak masuk dalam wilayah tersebut memiliki faktor politik yang luar biasa. Persoalan sinergitas ulama dalam kedua konteks ini yang menjadi problem, karena cenderung tidak sinergis antara keduanya. Hal ini disebabkan tidak semua ulama menyadari bahwa kerja-kerja di kultur tersebut berpengaruh pada wilayah ulama.<sup>179</sup>

Kiprah politik ulama dalam hal memengaruhi pengambilan kebijakan dan regulasi di Polman sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya masih sangat minim. Jika pun ulama dilibatkan dalam pengambilan kebijakan atau penyusunan regulasi hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat keagamaan saja. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya peran ulama dalam kancah politik dan pemerintahan daerah di Polman. Untuk itu, peneliti mewawancarai beberapa informan terkait faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya peran dan kiprah ulama di Polman dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan regulasi daerah, seperti perda atau perbup oleh pemerintah daerah Kabupaten Polman, baik legislatif maupun eksekutif.

Menurut Sa'dong Bani, ulama di Polman umumnya kurang fokus pada pengembangan keahlian di bidang lain diluar bidang agama, sehingga membuat pemerintah tidak melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan di luar keagamaan.<sup>180</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh Fadhl al-Mahdali, bahwa ulama tidak terlalu fokus dalam pengembangan keahlian pada bidang lainnya. Sisi lain ulama masih belum memunyai strategi

<sup>179</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>180</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali

khusus untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah bahwa terlibat dalam kebijakan publik itu sangat penting, proses meyakinkan ini yang membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang, dan ulama di Polman belum fokus dan suaranya ke arah tersebut.<sup>181</sup>

Syamsul Mahmud, Ketua Golkar Polman menyorotinya dari sudut pandang yang lain terkait minimnya keterlibatan ulama dalam pengambilan kebijakan di Polman. Menurut Syamsul, persoalan sebenarnya bukan pada ulamanya, tetapi orang-orang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan publik yang cenderung tidak ingin melibatkan para ulama. Hal tersebut boleh jadi karena perbedaan pandangan politik, atau jangan sampai ada keinginannya yang tidak disetujui oleh ulama.<sup>182</sup> Ersoalan yang sama juga menjadi sorotan dari Ustaz Rudi Tarenre, bahwa kecenderungan pemerintah yang hanya melibatkan ulama yang mendukung mereka saja dan mengabaikan ulama yang berbeda haluan politik atau ulama yang tidak mendukung mereka sewaktu pilkada.<sup>183</sup>

Mas'ud Saleh menyoroti hal yang sama, yaitu posisi ulama yang kerap dipandang sebagai lawan politik dari pemerintah yang sekarang berkuasa sebagai faktor penghambat bagi dilibatkannya ulama dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ulama dianggap sebagai lawan politik untuk sebagian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan politik sehingga membuat ulama menjadi kurang atau bahkan tidak dilibatkan. Sisi lain, ada kaidah yang menyebut bahwa tidak semua ulama harus masuk dalam wilayah ulama, itu benar namun kerja-kerja ulama tersebut berpengaruh secara politik. Faktor lain menurut Mas'ud adalah faktor

---

<sup>181</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>182</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali

<sup>183</sup>Wawancara Ustaz Rudi Tarenre 12 Desember 2019 di Lampko.

psikologi, para birokrat tidak membangun komunikasi yang intens dengan ulama sehingga terjadi jarak antara birokrat dengan ulama. Faktor lainnya menurut Mas'ud adalah masalah politik bahwa para penguasa menganggap ulama tersebut akan menjadi lawan kontestasinya. Selain itu, ada faktor paling penting dari segi spiritual bahwa ulama kurang etis berkunjung ke penguasa, ada ulama yang masih menjaga etika ini karena berhubungan dengan ideologi dan adab seorang ulama.<sup>184</sup>

#### ***D. Respons tentang Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Polman***

##### ***1. Respons tentang Kiprah Politik Ulama***

Berkiprahnya ulama di panggung politik tentu saja menuai beragam pandangan dari masyarakat, baik yang mendukung keterlibatan ulama dalam politik praktis, maupun yang kontra dengan hal tersebut. Semua informan dalam penelitian ini pada dasarnya mendukung peran dan kiprah politik ulama di Polman dalam kancah politik praktis meski ada beberapa catatan dan harapan yang mereka ungkapkan terkait hal tersebut. Semua informan berpandangan bahwa peran dan kiprah politik ulama di Polman masih belum optimal.

Sa'dong Bani selaku ulama yang pernah terlibat dalam kancah politik praktis menyatakan bahwa seharusnya ulama memang masuk dalam kancah politik praktis untuk membawa aspirasi umat. Oleh karena itu, ulama yang masuk dalam politik diharapkan mampu menyelesaikan problem-problem umat atau masyarakat selama ini termasuk masalah sosial, namun faktanya ada beberapa ulama yang masuk namun belum maksimal melaksanakan tugas-tugas keummatan dalam politik tersebut.<sup>185</sup> Belum optimalnya kiprah ulama dalam kancah politikpraktis di Polman

<sup>184</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

<sup>185</sup>Wawancara H. Sa'dong Bani tanggal 12 Desember 2019 di Polewali

menurut Fadhl al-Mahdali, karena ulama memiliki peranan ganda, seorang ulama dan sekaligus seorang politisi. Kadang-kadang juga ketika ulama memainkan peranan politik, ada anggapan masyarakat yang memberikan penilaian negatif bahwa nilai-nilai keulamaannya sudah berkurang. Jadi menurut Fadhl publik sendiri yang mengurangi nilai keulamaan seseorang ketika terlibat dalam politik.<sup>186</sup>

Ketua MUI Polman, AGH. Syahid Rusdi menilai menilai masih tidak optimalnya peran ulama dalam perpolitikan di Polman karena jumlah ulama yang melibatkan diri masih sedikit. Senada dengan Fadhl, Syahid juga melihat masih terdapat anggapan masyarakat yang kurang setuju jika ulama terjun dalam wilayah politik, dengan harapan agar ulama menjadi pengayom masyarakat dalam kehidupan beragama. Menurut Syahid, harus ada penguat bagi ulama untuk menunjukkan jati dirinya sebagai ulama, harus dilakukan pemetaan dan mampu menjadi nilai-nilai kharismatik sebagai seorang ulama. Sehingga tidak ada kesan dari masyarakat atau dari berbagai pihak, bahwa ini ulamanya bupati atau dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.<sup>187</sup>

Ketua Golkar Polman, Syamsul Mahmud juga menyebutkan ketidak optimalan kiprah ulama dalam dunia politik praktis di Polman. Menurutnya hal ini merupakan tantangan bagi partai politik untuk memabangun visi kedepan bersama ulama. itulah sebabnya Partai Golkar dalam menyusun kepengurusan partai politik senantiasa melibatkan ulama. Hal senada diungkapkan oleh Salam Harianto, M.Pd, Rektor IAI DDI Polman. Menurutnya kiprah politik ulama kedepannya harus bisa ditingkatkan. Kehadiran ulama dalam politik praktis, menurutnya dapat mengimbangi anggota parpol yang tidak jelas asal-usul pendidikannya. Secara

---

<sup>186</sup>Wawancara Sayyid Ahmad Fadh al-Mahdali tanggal 19 November 2019 di Campalagian

<sup>187</sup>Wawancara AGH. Syahid Rasyid, tanggal 5 Januari 2020 di Polewali.

priabdi, beliau sangat setuju sekali jika para ulama itu masuk politik praktis, yang penting ulama yang benar-benar terjun di dunia politik praktis dengan tujuan untuk membawa misi kemaslahatan bagi umat.<sup>188</sup>

Husain Bande, seorang penggiat demokrasi di Polman juga berpandangan yang sama. Menurutnya, ulama mesti berperan secara signifikan untuk mengawal dan mengarahkan kebijakan-kebijakan politik baik langsung maupun tidak langsung, Dengan terjun di dunia politik praktis, ulama dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan baik sebagai eksekutif maupun sebagai legislatif, baik secara personal maupun structural. Mereka mewakili ummat Islam sehingga mampu memengaruhi kebijakan eksekutif maupun legislatif. Namun, Husain Bande juga menegaskan bahwa sampai sejauh ini peran dan kiprah politik ulama pada kancah politik praktis di Polman masih jauh dari optimal.<sup>189</sup>

## 2. *Respons tentang Pengaruh Politik Ulama*

Meski keterlibatan ulama dalam kancah politik praktis di Polman masih terbilang minim. Namun, sedikit banyaknya posisi sosio-kultural ulama di Polman yang cukup strategis pasti memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan di Polman. Menurut Ketua Bawaslu Polman, Syaifuddin, meski kecil pengaruh ulama dalam perpolitikan di Polman tetap ada. Peran tersebut harus ditingkatkan demi memaksimalkan sinergitas semua elemen dalam suasana demokrasi di Polman. Untuk itu menurut Syaifuddin peran politik ulama angat perlu dilanjutkan namun dengan strategi yang teratur dan terkontrol agar ulama tidak diadu domba sesama ulama. Karena menurutnya hal ini yang terjadi di Polman para elit politik memanfaatkan ulama untuk maju sehingga suara menjadi terbagi dan hanya untuk

<sup>188</sup>Wawancara H. Salam Harianto M.Pd, tanggal 9 Januari 2020 di Polewali.

<sup>189</sup>wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

kepentingan para elit yang lain. Syaifuddin menyarankan ulamamesti membangun komunikasi sesama ulama dan disepakati yang diutus kemudian sama-sama didukung dan juga para ulama wajib memanfaatkan teknologi seperti adanya tim kampanye yang handal, survey lebih awal, dan pemeliharaan basis basis massa secara kontinyu tidak hanya menjelang pemilihan. Hal ini akan meningkatkan peran politik dan pengaruh politik ulama dalam kancan perpolitikan di Polman.<sup>190</sup>

Dr. Fitrinela Patonangi, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulbar juga senada dengan Syaifuddin. Menurut Fitri, suara ulama masih menempati posisi utama dalam hal memengaruhi kebijakan politik masyarakat di Polman. Sehingga merupakan suatu keniscayaan bahwa kiprah ulama dalam dunia politik di Polman khususnya harus tetap diapresiasi. Ulama bukan pada eksistensinya, melainkan yang harus ditingkatkan dan terus dijaga khususnya di Polman bahwa ulama yang melibatkan diri dalam politik praktis harus menjauhkan diri dari perilaku politik yang memecah-belah umat, merusak kedamaian dan kerukunan. Kehadiran ulama dalam dunia politik dapat menjadi agen yang membawa misi kesatuan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.<sup>191</sup>

Husain Bande, penggiat demokrasi di Polman juga berpandangan bahwa sudah semestinya ulama berperan secara signifikan untuk mengawal dan mengarahkan kebijakan-kebijakan politik baik langsung maupun tidak. Ulama mesti terlibat dalam pengambilan kebijaka baik sebagai eksekutif maupun pada ruang legislative. Keterlibatan tersebut menjadi penting agar ulama baik personal maupun structural mampu memengaruhi kebijakan publik yang diambil baik di eksekutif

---

<sup>190</sup>Wawancara Syaifuddin, tanggal 25 Januari 2020 di Polewali.

<sup>191</sup>Wawancara Fitrinela Patonangi, tanggal 26 Januari 2020 di Wonomulyo



maupun legislatif.<sup>192</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh Salam Harianto selaku Rektor IAI DDi Polman. Menurutnya, ulama adalah teladan bagi umat, oleh karenanya ulama harus memberikan pengaruh dalam dunia politik di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh politik ulama yang saat ini masih belum optimal, menurutnya masih perlu ditingkatkan lagi.<sup>193</sup>

Syamsul Mahmud dan Mukhsin F selaku politisi daerah di Polman berpandangan bahwa pengaruh politik ulama yang masih sangat minim, padahal ulama merupakan sumberdaya sosial masyarakat yang sangat strategis guna dimaksimalkan perannya dalam dunia politik. Oleh karena itu, menurut mereka, partai politik di daerah harus intens dalam merangkul ulama dan memerhatikan aspirasi serta masukan dari mereka. Ulama adalah sosok yang paling dekat dengan rakyat, sehingga elit-elit partai harus merangkul ulama dan memberinya kesempatan untuk terlibat serta memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan mengajak ulama tersebut masuk dalam kepengurusan partai. Secara tidak langsung dengan tetap meminta masukan serta menyerap aspirasi mereka, meski mereka tidak terlibat secara langsung dalam kepengurusan partai.<sup>194</sup>

Menurut Mas'ud Saleh pengaruh politik ulama yang masih sangat minim di Polman menurutnya harus dilanjutkan dan memperjuangkan ulama menjadi aktor politik dan mengikuti kontestasi politik. Ulama mesti masuk dalam wilayah pemerintahan/politik, meskipun tersebut tidaklah mudah sehingga harus dipersiapkan lebih awal, ulama memiliki popularitas yang bagus namun publik kurang memahami

---

<sup>192</sup>Wawancara Husain Bande, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

<sup>193</sup>Wawancara H. Salam Harianto M.Pd, tanggal 9 Januari 2020 di Polewali.

<sup>194</sup>Wawancara Syamsul Mahmud, tanggal 30 Januari 2020 di Polewali dan Wawancara Mukhsin F, tanggal 17 Januari 2020 di Polewali.

fungsi-fungsi ulama. Olehnya itu, ulama harus membangun personalitinya, termasuk sosial dan yang lebih penting adalah finansial. Hari ini ulama dalam wilayah personal sudah selesai, begitu juga dalam wilayah sosial, ulama memiliki jamaah dan jejaring sosial yang bagus, namun dalam wilayah finansial untuk *cost* politik yang kurang, inilah kelemahan utama ulama, Hal-hal ini mesti diperhatikan menurut Mas'id guna meningkatkan pengaruh politik ulama dalam pemerintahan daerah di Polman.<sup>195</sup>

Pemikiran yang cenderung menstigmatisasi ulama yang terlibat dalam politik praktis sehingga memunculkan penilaian bahwa politik tersebut kotor sehingga bukan tempat yang baik bagi ulama. Secara historis pemikiran tersebut muncul sejak masa penjajahan bahkan lebih jauh lagi sejak masa kekhalifahan. Hal ini dimaksudkan agar ulama tidak terlibat langsung dalam dunia politik. Sejatinya politik adalah sesuatu yang sangat vital dan strategis karena digunakan untuk menata, mengatur, serta mengelola sebuah wilayah. Sehingga harusnya orang-orang mulia yang mesti masuk dalam politik, dan orang mulia tersebut yang lebih memenuhi kualifikasi intelektual dan spiritual tentu adalah ulama. Hal ini mestinya menjadi alasan yang cukup kuat dalam mendukung ulama untuk terlibat dalam politik praktis, sehingga jelas urgensi seorang ulama masuk dalam politik praktis. Termasuk halnya ulama di Tanah Mandar, khususnya di Polman. Posisi strategis ulama secara sosio-kultural serta integritas mereka yang diakui membuat ulama harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk lebih banyak terlibat dalam dunia politik praktis.

---

<sup>195</sup>Wawancara Mas'ud Saleh, tanggal 11 Januari 2020 di Polewali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat peneliti rumuskan sesuai tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Kiprah politik ulama dalam kontestasi politik di Kabupaten Polman harus diakui masih sangat minim. Masih sangat sedikit ulama yang melibatkan diri secara langsung dalam kancah politik praktis. Terdapat dua nama yang menonjol sebagai representasi ulama yang aktif dalam politik praktis. Kedua nama tersebut adalah AGH. Syibli Shahabuddin (tokoh Tarekat Qadiriyyah) dan .Zainal Abidin Lc (Pimpinan Pesantren As'adiyah Polman), Dalam kancah lokal terdapat nama H. Sa'dong Bani, ulama yang pernah Ketua MUI Polman 2003-2010 dan kini lebih aktif sebagai dai serta sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Polman. Pada pemilu 2019 terdapat dua ulama lokal yang maju sebagai caleg namun keduanya tidak terpilih, yaitu Sayyid Ahmad Fadhl al-Mahdali yang menjadi caleg melalui Partai Demokrat dan Mahyuddin Mahdy yang menjadi caleg dari PPP. Strategi politik yang dimainkan oleh ulama yang terlibat dalam politik praktis di Polman masih sangat konvensional dengan hanya mengandalkan pola sebagaimana seorang muballigh, melalui pengajian atau pendekatan persuasif dengan mengandalkan status keulamaan pada masyarakat utamanya dengan basis jamaahnya. Strategi politik masih belum menggunakan sistem manajemen suksesi yang bersifat modern. Komunikasi politik yang dibangun

oleh ulama pun demikian, masih bersifat konvensional sebagaimana pola komunikasi ulama kepada umat.

2. Pengaruh ulama dalam kontestasi politik praktis di Polman masih sangat minim, ini terlihat dengan masih kurangnya ulama yang terlibat secara langsung sebagai aktor dalam kancah politik praktis. Mereka yang terlibat secara langsung sebagai aktor pun masih tersisih dibandingkan politisi yang tidak berlatar belakang ulama atau tokoh agama. Kiprah politik yang cukup berpengaruh adalah ketika ulama tersebut, utamanya ulama tarekat terlibat sebagai tim sukses dari salah satu pasangan calon kepala daerah baik calon bupati maupun calon gubernur. Hal ini terbukti berhasil, misalnya dalam kasus keterlibatan pimpinan dan jamaah Tarekat Qadiriyyah sebagai tim sukses pasangan calon gubernur maupun calon bupati. Pengaruh politik ulama dalam pengambilan kebijakan publik di Polman pun masih terbilang sangat minim, bahkan dapat dikatakan nyaris tidak ada. Pelibatan ulama untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan publik hanya berkenaan dengan persoalan yang berhubungan langsung dengan keagamaan, misalnya mengenai peraturan bupati tentang zakat. Belum optimalnya peran dan pengaruh ulama dalam kancah perpolitikan maupun pengambilan kebijakan publik di Polman disebabkan minimnya minat ulama ke arah politik praktis atau keterlibatan lebih jauh dalam dunia pemerintahan, kurangnya ulama yang memiliki kapasitas dalam persoalan sosial kemasyarakatan maupun politik pemerintahan, serta kerja-kerja politik ulama yang masih sangat tradisional dan konvensional. Kiprah ulama di Polman memiliki potensi yang dapat menjadi faktor pendukung kiprah dan pengaruh

mereka dalam perpolitikan di Polman. Diantaranya kultur masyarakat Polman yang masih sangat menghargai ulama, posisi ulama yang masih sangat strategis dalam kultur sosial masyarakat Polman, serta adanya beberapa ulama yang pada dasarnya memiliki kapasitas dalam persoalan sosial kemasyarakatan maupun politik pemerintahan, hanya saja kapasitas tersebut belum dimaksimalkan baik oleh ulama itu sendiri maupun oleh pemerintah di Polman.

3. Respon masyarakat tentang pengaruh ulama terhadap perpolitikan di Polman pada dasarnya sangat positif dan apresiatif. Meski ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa ulama tidak cocok terlibat dalam dunia politik. Tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini umumnya sangat mengapresiasi kiprah ulama dalam kancah perpolitikan Polman baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua informan berpandangan sama bahwa peranan pengaruh ulama masih belum optimal sehingga perlu dimaksimalkan agar ulama yang secara sosio-kultur merupakan elemen sosial yang sangat strategis dan berpengaruh di Polman, dapat benar-benar memaksimalkan peran dan pengaruhnya pada politik-pemerintahan di Polman. Untuk itu perlu didorong kepada ulama yang pada dasarnya memiliki kapasitas dan potensi dalam dunia sosial politik untuk melibatkan diri baik secara langsung sebagai aktor politik, maupun peran-peran yang bersifat tidak langsung dalam memengaruhi pengambilan kebijakan publik di Polman.

## B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan dan pembahasan dari masalah penelitian ini, maka implikasi dari penelitian peran politik ulama di Polman adalah:

1. Maksimalisasi peran strategis ulama sebagai pengayom dan “penyambung lidah” umat termasuk dalam bidang politik-pemerintahan dengan aktif dalam dunia politik baik secara langsung sebagai politisi maupun secara tidak langsung dengan mengambil peran penting dalam memengaruhi setiap pengambilan kebijakan publik di Polman.
2. Pentingnya visi, misi, strategi dan komunikasi politik ulama di Polman agar mampu meningkatkan kiprah dan pengaruh politik ulama dalam kontestasi politik di Polman.
3. Pentingnya peningkatan kapasitas dan *skill* ulama yang tidak hanya berkenaan dengan hal-hal keagamaan, melainkan juga dalam persoalan sosial kemasyarakatan dalam skala yang lebih luas termasuk dalam bidang politik-pemerintahan.
4. Pentingnya mengembalikan peran dan posisi strategis ulama sebagai mitra pemerintah sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah dan kearifan lokal suku Mandar agar ulama kembali mendapatkan peran strategisnya di tengah masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- \_\_\_\_\_, “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” dalam *Jurnal Ahkam* Volume XIII Nomor 2 Juli 2013.
- Ahmad, Abdul Kadir. *Ulama Bugis*. Jakarta: Indobis, 2008.
- Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*.; Makassar: Rayhan Intermedia. 2013.
- Arifin, Achmad Zainal. *Charisma and Rationalisation in a Modernising Pesantren: Changing Values in Traditional Islamic Education in Java* Dissertati: The University of Western Sydney. 2013.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Arsyad, M. Armin dan M. Basyir Syam. “Preferensi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah di Majene dalam Pemilu 2011 Kabupaten Majene 2011. dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol XIV. No 1. Tahun 2014. h.44-52
- Baron, Robert A dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Berry, David . *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.1991.
- Bernard, Russell. *Research Method in Cultural Antropology* Beverly Hill: Sage Publication itd, 1988.
- Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, politik, dan ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Burke, Peter J. dan Jan E. Steets, *Identity Theory*. New York: Oxford University Press. 2009.
- Bourdieu, Pierre. *the Field on Cultural Production, Essays on Art and Literature*, Cambridge: Polity Press199.

- Brunnessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Danuri, Ahmad . *Ulama dan Pusaran Kekuasaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam Masa Kini*, Diterjemahkan oleh Tim Postudia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Farid, Miftah. “Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia” dalam Jurnal *Sosioteknologi* Edisi 11 Tahun 6 Agustus 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press. 1980.
- Haryono, Cosmas Gatot. “Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga”, dalam Jurnal *Scriptura* Volume 7 Nomor 1 Juli 2017.
- Idham. “Sosialisasi Nilai Budaya Mandar (Studi Kasus pada Generasi Muda Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat) dalam Jurnal *Al-Qalam*. Nomor XX Tahun XIII Edisi Juli-Desember 2007. h. 115-131.
- Jannah, Hasanatul. ”Kyai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan” dalam Jurnal *Fikrah* Volume 3 Nomor 1 tahun 2015.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama” dalam Jurnal *Walisongo* Volume XXII Nomor1 Mei 2014.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Cet, I; Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Kasniyah, Naniek. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Killer, Suzanne. *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.



- Koiruddin, *Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai dalam Partai Politik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mappangara, Suriadi. dan Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, Makakssar: Lamacca Press, 2003.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Komponen MKD*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Marijan, Kacung. *Demkratisas di Daerah Pelajaran dari Pilkada Langsung*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Maulana, Haris. *Kontestasi Politik dan Demokratisasi Pasca Otonmi Daerah*, Bandung: Almira, 2011.
- Merton, R.K.. *Social Theory and Social Structure*. New York: Press Co inc. 1992.
- Miles dan Huberman, *Qualitatif Data Analisis*. Beverly Hill: Sage Publication itd, 1984.
- MS, Muhammad Amin. *Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Muhamamd. "Peran Tarekat Qadiriyyah dalam Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dalam *Jurnal Arajang*, Vol I. No 1. Tahun 2018. h. 14-26.
- Mu'iz, Utsman Abdul. *Tarbiyah Siyasah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Inter Media. 2000.
- Musaddad, Aco. *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Polman: Gerbang Visual. 2018.
- Nabi, Malik bin. *Musykilat al-Afkar fi al-'Alam al-Islam*, Diterjemahkan oleh Afif Muhammad dan Abdul Adhiem dengan Judul *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung: Mizan. 1995.
- Nashir, Haedar. *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Bgraf, 2000.

- Nuruddin, Sabara. "Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI" dalam Jurnal *Pappasang*. Volume I tahun 2013.
- Pantouw. Stella Maria Ignasia. *Modalitas dalam Kontestasi Politik: Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximillian Lomban Pada Pemilu di Kota Bitung, Sulawesi Utara Tahun 2010*. Tesis Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012.
- Patton., Michel Quinn .*How to use Qualitative Methods and Evaluation*, Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi dengan Judul, *Metode Evaluasi Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Pratama Harman Alif S. "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmad dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar", dalam Jurnal *Government*, Volume 7, Nomor 1, Edisi Juli 2014, h. 33-48
- Prayitno. *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo. 2009.
- Rohaniah, Yoyoh dan Elfridza, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Imrans Publishing, 2015.
- Rush, Michael. dan Philip Althof, *an Introduction to Political Sociology*, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan Judul *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Rusyd, Arif. *Metode Penelitian Politik*, Yogyakarta: Politika Publishing. 2011.
- Sadi, "Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi" dalam Jurnal *Khazanah Pendidikan* Volume X Nomor 1 September 2016.
- Sarojo, Riyadi. *Penelitian Kualitatif Pendidikan* Malang: PPs IKIP Malang, 1992.
- Sarman, Mukhtar. *Banalitas Konetstasi Politik: Refleksi Pemilu Legislatif di Kalimantan Selatan 2014*, Banjarmasin: MSAP UNLAM, 2014.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Sarwono, Sarlito W. dan A.Eko Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba, 2009.
- Sears, David O et.al, *Psikologi Sosial Edisi Kelima Jilid II*. Jakarta: Erlangga. 1991.

- Sen, Amartya. *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*, New York-London: W.W. Norton and Company. 2006.
- Sewang. Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Aplikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Suryanegara, Mansyur. *Islam dalam Sejarah dan Kultur Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Steenbrink, Karel A. . *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta :LP3ES.1994.
- Suharno, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: FIS UNY, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*; Jakarta: Alfabeta. 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu-ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syah, Hakim. “Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangkaraya” dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 15 Nomor 29 Januari-Juni 2016.
- Thaha, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Turner, Bryan S. *Religion and Social Theory* Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dengan judul *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: IRCISOD. 2003.
- Usman, Ali. *Kyai Mengaji Santri Acungkan Jempol*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2013.
- \_\_\_\_\_. *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wertheim, WF. *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change*, Bandung: Van Hove Ltd, 1996.

Yustiningrum, RR. Emilia dan Wawan Ichwanuddin, “Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih pada Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. XII, Nomor 1 tahun 2015, h. 118-135

Zainal, Nur Aliyah dan Ibnu Khaldun , “*Local Strongmen* dan Kontestasi Politik (Studi atas Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muhammad Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015, dalam Jurnal *Sulesana* Volume 11 Nomor 1 tahun 2017.

Zuhrah, Fatimah. ” Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat”, dalam Jurnal *Hikmah* Volume 16 Nomor 1 tahun 2016.



## RIWAYAT HIDUP



Said Usman Umar, dilahirkan di Desa Bumiayu sekarang pasca pemekaran menjadi Desa Bumimulyo, sebuah desa kecil di Kec. Wonomulyo, Kab. Polman. Penulis adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, dari pasangan **S.H. Umar bin Hamid Azuz** yang telah meninggal sejak penulis berusia 5 tahun, dan ibu **Syarifah Azizah bin Hasan bin Sahl** yang banyak mendidik penulis sampai akhir umurnya setahun yang lalu. Dari keluarga sederhana tersebut, penulis dapat menyelesaikan pendidikan SD di Sidodadi pada tahun 1993, SMPN 1 Wonomulyo tahun 1996 dan STM Tumpiling tahun 1999. Pada jenjang pendidikan tinggi penulis baru mulai pada tahun 2002 di STAIN Pare-pare yang selesai tahun 2008, dan akhirnya melanjutkan studi Megister pada tahun 2015 di UIN Alauddin Makassar.

Aktifitas pekerjaan penulis dimulai sebagai guru honorer pada MTs. DHI Mapilli sejak tahun 2002, diangkat menjadi PNS pada tahun 2011. Kepedulian penulis terhadap system demokrasi Indonesia mendorong untuk mencoba menjadi penyelenggara Pemilu, sehingga tahun 2014 penulis menjadi anggota KPU Polman, dan kini sejak tahun 2018 menjadi anggota KPU Prov. Sulawesi Barat.

Cita-cita penulis sebenarnya menjadi Dosen yang sampai hari ini belum tercapai, dengan cita-cita ini tentu akan menjadi semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan. Kini penulis bersama Istri tercinta **Syarifah Alwiyah Habibu Sahel** telah dikaruniai 4 anak, yang senantiasa memberi dorongan tersendiri dalam melanjutkan segenap aktifitas dengan berharap Ridho Allah SWT.